



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111

Telepon: (031) 5953759 Fax: 031-5953759 PABX: 1404,1405,1330

www.its.ac.id/drpm email: drpm@its.ac.id

Nomor : **6495/IT2.IV.1/B/TU.00.09/VI/2024**
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : **BRIN-KONEKSI Joint Call for Proposals Indonesia's Bioeconomy :Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024**

Kepada Yth.
Para Dekan
Para Kepala Departemen
Di Lingkungan Kampus ITS Surabaya

KONEKSI adalah program unggulan Australia di sektor pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) melakukan investasi program bilateral senilai AUD 50 juta / 5 tahun (2023–2027) bertujuan untuk membina hubungan jangka panjang antara Australia dan Indonesia dengan memajukan penelitian di bidang-bidang yang memiliki kepentingan bersama.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan lembaga pemerintah yang fokus pada penelitian dan inovasi. Sebelumnya dikenal sebagai unit di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, BRIN merupakan integrasi dari seluruh lembaga penelitian nasional; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan satuan kerja di lingkungan kementerian yang bertanggung jawab. untuk menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan penerapan penelitian dan teknologi.

A. Joint Call for Proposals BRIN KONEKSI

Joint Call for Proposals BRIN-KONEKSI merupakan inisiatif yang dirancang untuk menjalin kemitraan yang menghasilkan pengetahuan untuk mendukung kebijakan dan inovasi. Skema ini didanai, dirancang dan dilaksanakan bersama sebagai inisiatif khusus oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Hal ini bertujuan untuk mendukung kemitraan antara lembaga-lembaga Australia dan Indonesia untuk melaksanakan dan menyebarkan penelitian terapan multidisiplin yang berkualitas tinggi mengenai prioritas Pemerintah Indonesia.

Joint Call for BRIN-KONEKSI memberikan peluang bagi organisasi Australia dan Indonesia untuk melakukan penelitian kolaboratif hingga dua tahun (2024-2026) dengan tema Bioekonomi Indonesia : Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut Berkelanjutan 2024 (**BRIN-KONEKSI Joint Call for Proposals Indonesia's Bioeconomy : Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024**). BRIN dan KONEKSI akan memberikan peluang kemitraan untuk mengakses keahlian internasional, sumber daya, pelatihan dan informasi relevan untuk mendukung dan memajukan kesetaraan dalam kemitraan.

Pemerintah Australia mendukung tema penelitian untuk seruan bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, sesuai dengan prioritas Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Indonesia.

Pendaftaran online Pernyataan Minat dibuka mulai 21 Juni – 05 Juli 2024.

TAHAP 1 – Pernyataan Minat (Expression of Interest – EOI)

- Tanggal pembukaan EOI : 21 Juni 2024
- Pertanyaan terakhir tentang EOI diterima : 5 Juli 2024
- Tanggal penutupan EOI : **12 Juli 2024**

TAHAP 2 – Panggilan Proposal/Permohonan Hibah :

- Tanggal pembukaan permohonan hibah : 16 Agustus 2024
- Pertanyaan terakhir tahap 2 diterima: 6 September 2024
- Tanggal penutupan permohonan hibah : 13 September 2024

B. Pendaftaran online peer reviewer

Mendukung proses seleksi Panggilan Bersama, BRIN dan KONEKSI mencari individu-individu yang berkualitas dan berpengalaman di semua disiplin ilmu dan sektor, dengan penekanan kuat pada keahlian multidisiplin dan lintas disiplin sebagai reviewer generalis dan spesialis yang mampu menghasilkan penilaian yang adil, independen. dan penilaian berdasarkan informasi pada penelitian.

Pendaftaran online peer reviewer dibuka mulai 21 Juni – 26 Juli 2024.

Silakan temukan informasi lebih lanjut mengenai Seruan Bersama BRIN - KONEKSI tentang Bioekonomi Indonesia : Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut Berkelanjutan 2024 di website BRIN Pendanaan dan KONEKSI di <https://pendanaan-risnov.brin.go.id/> dan <http://bit.ly/BRINKONEKSIJointCall>

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan menghubungi Sekretariat, email: cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id Apabila diperlukan pengesahan pimpinan DRPM ITS bisa dikirimkan melalui <https://linktr.ee/drpm.its> dan konfirmasi ke Admin DRPM ITS wa.me/6281333250025

Demikian pemberitahuan kami, atas kontribusi dan kerjasama yang diberikan kami sampaikan terimakasih.



Surabaya, 25 Juni 2024
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

Fadlilatul Taufany, S.T., Ph.D.
198107132005011001

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital



BRIN-KONEKSI Joint Call for Proposals

“Indonesia’s Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024”

Stage 1

21 June 2024 Expression of Interest (EoI) Opening Date

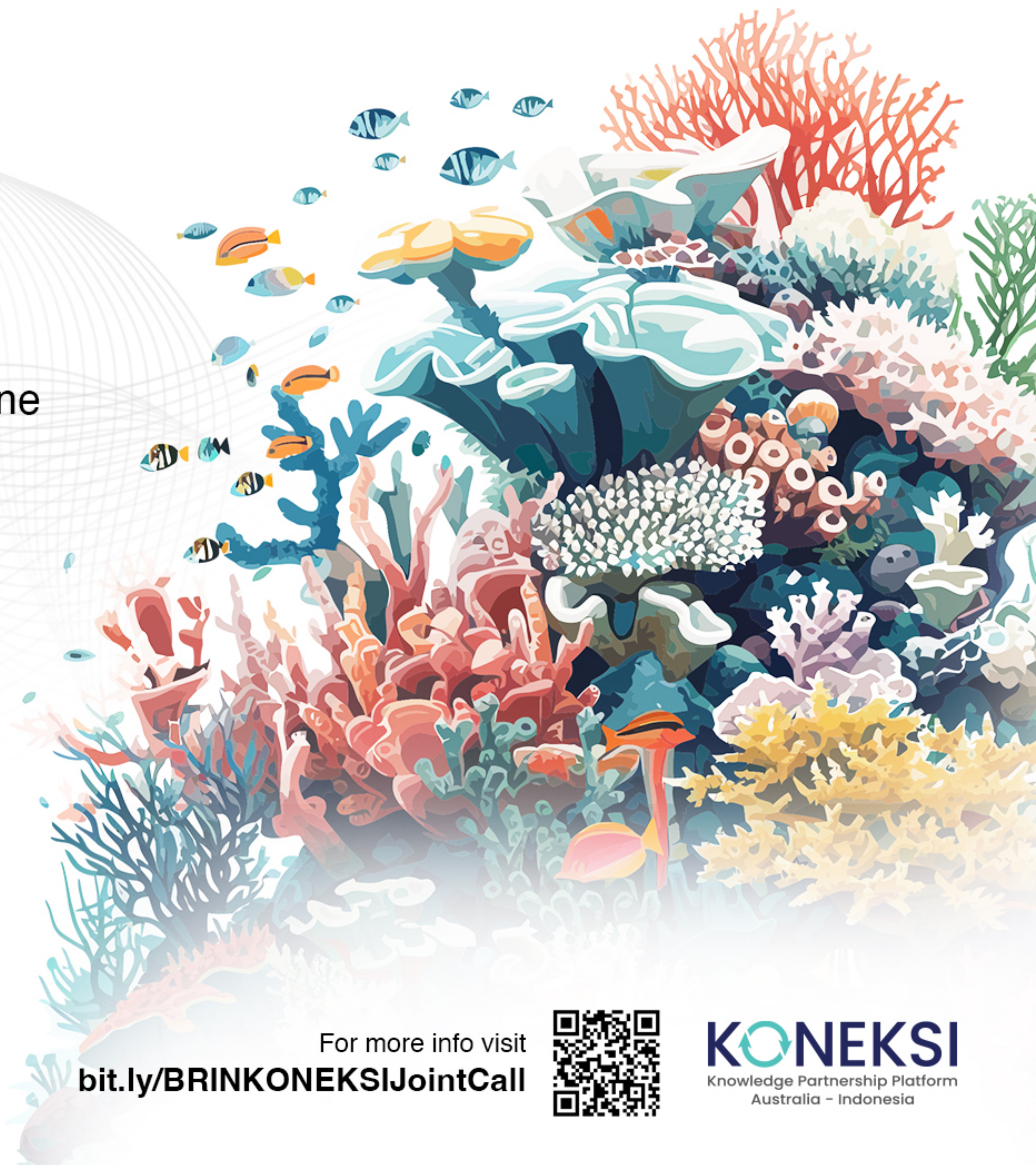
12 July 2024 EoI Closing Date

Stage 2

16 August 2024 Grant Applications Opening Date

13 September 2024 Closing Date for Grant Applications

Expected grant start date: December 2024
Grant duration: Up to 24 months (Up to 30 November 2026)



For more info visit
bit.ly/BRINKONEKSIJointCall



KONEKSI
Knowledge Partnership Platform
Australia - Indonesia

BRIN – KONEKSI Joint Call for Peer Reviewer Indonesia’s Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024

Academic Peer Reviewer Fact Sheet

BRIN and KONEKSI (referred to as The Secretariat) seeks **qualified** and **experienced** individuals in all disciplines and sectors, with strong emphasis placed on multi-disciplinary and cross-disciplinary expertise as generalist and specialist reviewers who are able to make a fair, independent and informed judgement on research.

Timeline for registration for reviewers is 21 June – 26 July 2024

Reviewers are expected to be available for review through the period of 16 September – 2 October 2024

Payment for Peer Reviewers: The Secretariat will use the Australian Research Council standard rate of AUD 90.90/per proposal.

All assessors will be required to undertake the following:

- (i) Familiarise themselves with the Peer Review Guidelines and Assessment Rubric (available after being contracted to maintain confidentiality) and attend the Peer Review Briefing session (to be conducted by the Secretariat in early September 2024).
- (ii) Comply with the Secretariat’s Peer Reviewer Guidelines and Conflict of Interest process.
- (iii) Consider the Secretariat application, assign the scores and comments against the approved and relevant assessment criteria.

Selection of peer reviewers will be conducted using the Secretariat Selection Criteria for Peer Reviewers.

The **Selection Criteria** for the Academic Peer Reviewers is the following:

- (i) Hold a PhD and have 10 years research experience; or 10 years of experience in industry (in R+D areas)
- (ii) Demonstrated experience of research funding assessment.
- (iii) Not applying for BRIN-KONEKSI Joint Call for Proposals : Indonesia’s Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024 (not listed on a proposal).

The Secretariat follows the [Australian Research Council](#) approach of utilising a specialist and a generalist peer reviewer to assess each application. A total of **two peer reviewers** per application will be utilised. This is to ensure that the assessment criteria can be considered from all perspectives.

- **Specialist reviewers** are discipline-specific specialist expertise relevant to the application.
- **Generalist reviewers** are experts in their fields, have relevant expertise to the application, and can provide general assessment of the application.

Review Process

The peer review process constitutes one part of the overall selection process. In the first part, the Secretariat undertakes a general screening of application to ensure that they fit the eligibility criteria and meet the due diligence requirements. The subsequent peer review process ensures that the technical merit of application is assessed by independent academic experts. These recommendations are then scrutinised against funding availability and the Secretariat goals and final decisions are made.

Overview assessment of grant applications

Expression of Interest (Stage 1)
The Secretariat will undertake the assessment of each organisation that submits an Expression of Interest. The Secretariat will reject or approve project concepts based on the EOI assessment criteria.
Full Proposal (Stage 2)
STEP 1: The Secretariat Undertakes a general assessment of proposals and budget, due diligence, and security checks.
STEP 2: Peer review Peer review of the technical component is conducted by Indonesian and Australia research experts. They will assess the technical proposal and budget against the assessment criteria. Incomplete applications will not be assessed.
Grant Decisions are made Based on the peer review results, the Secretariat will prepare a list of top-ranked proposal to be proposed to the BRIN–DFAT Technical Committee for approval. Upon no-objection, the Government of Indonesia and Australia will then endorse the funding and priority of successful grants.

Applications

Interested experts are to apply on <http://bit.ly/BRINKONEKSIJointCall>

Please find more information about the BRIN - KONEKSI Joint Call on Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024 on the websites of BRIN Pendanaan and KONEKSI at <https://pendanaan-risnov.brin.go.id/> and <http://bit.ly/BRINKONEKSIJointCall>.

BRIN–KONEKSI Joint Call for Proposals Indonesia’s Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024 Grant Guidelines

STAGE 1 – Expression of Interest (Eoi)

- Eoi opening date: 21 June 2024
- Eoi final enquiries/questions received: 5 July 2024
- Eoi closing date: 12 July 2024

STAGE 2 – Call for Proposals/Grant Applications:

- Grant Application opening date: 16 August 2024
- Stage 2 final enquiries/questions received: 6 September 2024
- Grant Application closing date: 13 September 2024

Enquiries: If you have any questions, please contact the Secretariat at cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id.

Date grant guidelines released:	21 June 2024
Expected grant start date:	December 2024
Grant duration:	Up to 24 months (Up to 30 November 2026)
Type of grant opportunity:	Open competitive

Contents

Process flowchart for BRIN-KONEKSI Joint Call	4
1. Background to KONEKSI and BRIN.....	7
1.1. About KONEKSI	7
KONEKSI is Australia’s flagship program in Indonesia’s knowledge and innovation sector. In collaboration with the Ministry of National Development Planning (BAPPENAS), the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek), and the National Research and Innovation Agency (BRIN), the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) investment of AUD 50 million / 5-year bilateral program (2023–2027) aims to foster lasting relationships between Australia and Indonesia by advancing research in areas of shared interest.	7
1.2. About BRIN	7
1.3. About BRIN-KONEKSI Joint Call.....	8
1.4. About this document.....	8
2. About the Call for Proposals: Indonesia’s Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024	9
2.1. Challenges and opportunities for Indonesia’s bioeconomy	10
2.2. Goals of CfP: Indonesia’s Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024.....	11
2.3. BRIN-KONEKSI Joint Call – funding thresholds, timeframe and eligible cost.....	11
3. About the grant application process	12
3.1. Overview of application process	12
3.2. The grant selection process.....	12
3.3. Expected timing for the application process	13
3.4. Language and format requirements.....	13
3.5. Questions during the application process	13
4. Eligibility	13
4.1. Eligibility requirements for applications.....	13
4.2. Eligible entities	14
4.3. Eligible grant activities.....	15
4.3.1. What the grant funds can be used for.....	15
4.3.2. What the grant funds cannot be used for	16
5. Funding categories	17
5.1. Grant and project types.....	17
5.2. Past experience and evidence required	18
6. Preparing your application	19
6.1. Partnerships	19
6.2. Partnership plan	19

6.3.	GEDSI in research	20
6.3.1.	GEDSI markers	20
6.3.2.	Gender Equality Marker	21
6.3.3.	Disability Inclusion Marker	22
6.3.4.	Social Inclusion Marker.....	24
6.4.	Impactful research.....	25
6.5.	Use of artificial intelligence in preparing your application.....	25
7.	Stage 1: The Expressions of Interest (Eol) assessment.....	25
7.1.	Assessment criteria for the Eol.....	25
7.2.	Completing the Eol	26
7.2.1.	Create a login.....	26
7.2.2.	Accessing the resource material.....	26
7.2.3.	Begin your application.....	26
7.2.4.	Inviting your research team to assess and edit the application	26
7.2.5.	Submitting your application	26
7.2.6.	Who will assess the Eol?.....	27
7.2.7.	Notification of successful Eol.....	27
8.	Stage 2: grant application process	27
8.1.	Assessment criteria for applications	27
8.2.	Completing your Stage 2 application.....	28
8.3.	Assessment of grant applications.....	29
8.4.	Who will approve grants?.....	30
8.5.	Notification of Stage 2 (grant application) outcomes	30
9.	Successful grant applications	30
9.1.	The grant agreement.....	30
9.2.	How the grant will be paid	31
9.3.	Grant agreement variations	31
9.4.	Public announcement of grants	32
9.5.	Feedback	32
10.	Preparing the commencement of your grant.....	32
10.1.	Fixed Amount Awards	32
10.2.	Engaging partners.....	33
10.3.	Indemnity insurance.....	33
10.4.	Overview of ethics/permit process	33
11.	Delivery of grant activities.....	34
11.1.	Your responsibilities	34

11.2.	The Secretariat' responsibilities	34
11.3.	Reporting and output requirements of a BRIN-KONEKSI Joint Call	35
11.3.1.	KONEKSI Quarterly Progress Updates	36
11.3.2.	KONEKSI Partnerships Plan	36
11.3.3.	Partnerships Health Check	36
11.3.4.	BRIN Financial Report	36
11.3.5.	BRIN Final Financial Report	36
11.3.6.	BRIN Final Report.....	37
12.	Probity	37
12.1.	Complaints and applicant feedback process	37
12.2.	Conflict of interest.....	37
Annexes	39
Annex 1 – Topic map	39
Annex 2 – Technology Readiness Level29F	40
Annex 3 – Due diligence assessment.....	41	
Annex 4 – BRIN-KONEKSI Joint Call Expression of Interest template	46	
Annex 5 – BRIN-KONEKSI Joint Call for Proposals: Indonesia’s Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024 technical proposal template.....	51	
Annex 6 – Partnership health check.....	59	
Annex 7 – Acronyms	61	





List of tables









Table 1: Expected timing for the application process	13
Table 2: Funding categories – grant and project types, purpose and impact	17
Table 3: Funding categories – past experience and evidence required	18
Table 4: Partnerships.....	19
Table 5: Four pillars of the BRIN-KONEKSI Partnership Plan	20
Table 6: Gender Equality Marker	21
Table 7: Disability Inclusion Marker	22
Table 8: Social Inclusion Marker.....	24
Table 9: Overview assessment of grant applications	29
Table 10: Reporting requirements	35
Table 11: Example of Secretariat feedback	37


Process flowchart for BRIN-KONEKSI Joint Call

The BRIN-KONEKSI Joint Call theme titled, *Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024*, is designed to foster knowledge partnership and international collaboration in research for policy and technology. The scheme is jointly funded, designed and implemented collaboratively between the Indonesian and Australian governments.

A special committee comprising of BRIN Pendanaan section staff and KONEKSI has been established to administer the BRIN-KONEKSI Joint Call. This committee is referred to as the BRIN-KONEKSI Joint Call Secretariat (referred to as The Secretariat)

	<p>Grant opportunity opens</p> <p>Guidelines will be published on the websites of BRIN Pendanaan and KONEKSI at https://pendanaan-risnov.brin.go.id/ and http://bit.ly/BRINKONEKSIJointCall.</p>	<p>21 June–12 July 2024</p>
	<p>Create a login on KONEKSI Management Information System (KONEKSI MISI)</p> <p>Australian Principal Organisations Applicants must register through KONEKSI MISI to create login access. Once registered, Australian Principal Organisations can add their Indonesian Principal Organisations and partners into the MISI.</p> <p>Indonesian Principal Organisations applicants must create a log in in the BRIN Pendanaan website at https://pendanaan-risnov.brin.go.id/.</p> <p>The KONEKSI MISI system can be accessed through both the KONEKSI and BRIN Pendanaan websites at http://bit.ly/BRINKONEKSIJointCall and https://pendanaan-risnov.brin.go.id/.</p>	<p>21 June–12 July 2024</p>
	<p>Access materials</p> <p>The Secretariat has made available short videos that explain unique aspects of a BRIN-KONEKSI grant. Applicants must access these short videos before they can start their application.</p>	<p>21 June–12 July 2024</p>
<p>Stage 1 Expression of Interest</p>		
	<p>Stage 1 - Submit an Expression of Interest outlining your concept in brief</p> <p>Interested organisations prepare and submit a short Expression of Interest through KONEKSI MISI system only. This should briefly outline the research topic and response to assessment questions. See for a sample of the Expressions of Interest form, to be completed online in the KONEKSI MISI. The topics for this round can be found in Annex 1 – Topic Map.</p>	<p>21 June–12 July 2024</p>

	<p>Consideration of Expressions of Interest</p> <p>The Secretariat will assess all submitted Expressions of Interest against the assessment criteria.</p>	12 July – 16 August 2024
	<p>The Secretariat will notify you of the outcome</p> <p>Applicants will be informed by email of the outcome of the Expression of Interest application with shortlisted applicants being invited to progress to Stage 2.</p> <p>You may wish to list cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id and dana-risnov@brin.go.id as trusted addresses in your email system.</p>	16 August 2024
Stage 2 – Full application		
	<p>Stage 2 – If invited to progress to Stage 2, you may submit a full grant application through the KONEKSI MISI and BRIN Pendanaan system, building on your Expression of Interest, by the specified deadline.</p> <p>See Annex 5</p>	16 August–13 September 2024
	<p>The Secretariat will assess and rank all complete grant applications</p> <p>Based on the peer review assessments, the Secretariat will prepare a list of top-ranked proposals. Incomplete applications will not be assessed.</p>	Mid-September–mid-October 2024
	<p>Budget review</p> <p>Applicants will be asked to respond to enquiries on budget.</p>	October 2024
	<p>Grant Decisions are made</p> <p>Grant assessment results and recommendations will be proposed to the BRIN–DFAT Technical Committee for approval. This Committee is constituted by the representatives of the Government of Indonesia and the Australian Government. Upon no-objection, both governments will then endorse the funding and priority of successful grants.</p>	October 2024
	<p>Notification of the outcome</p> <p>The Secretariat will advise the applicant – the Principal Organisation – of the outcome. Unsuccessful applicants will be notified after grant agreements have been executed with successful applicants.</p>	November 2024
Research project initiation		
	<p>The Secretariat enters into grant agreements discussion</p>	November 2024

	<p>The Secretariat will enter into a grant agreement with each successful principal organisation. This process will include final discussion on budget, IP clauses, and project deliverables milestones with both Australian and Indonesian principal organisations.</p> <p>KONEKSI will administer the grant for the Australian organisation, while BRIN will administer the grant for the Indonesian organisation.</p> <p>The conditions of each agreement may vary based on the nature of the activity and any project-specific risks.</p>	
	<p>Delivery of grant</p> <p>Grantees undertake the grant activity as set out in their individual grant agreements. The Secretariat will work with the Principal Organisations, monitoring progress and making grant milestone payments. The Secretariat will liaise with the Principal Organisations to consider how to maximise the success of the project in terms of partnerships, GEDSI and impact.</p>	<p>December 2024 onwards</p>

1. Background to KONEKSI and BRIN

1.1. About KONEKSI

KONEKSI is Australia's flagship program in Indonesia's knowledge and innovation sector. In collaboration with the Ministry of National Development Planning (BAPPENAS), the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek), and the National Research and Innovation Agency (BRIN), the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) investment of AUD 50 million / 5-year bilateral program (2023–2027) aims to foster lasting relationships between Australia and Indonesia by advancing research in areas of shared interest.

The objective of the KONEKSI grant program is to provide funding for innovative research and initiatives which strengthen Australia's research and institutional links with Indonesia and deepen mutual understanding and cooperation between Australia and Indonesia. KONEKSI's ultimate goal is to contribute to an enduring relationship between Indonesia and Australia that advances mutual interest and supports Indonesia's inclusive and sustainable development.

The purpose of the program is to increase the use of knowledge-based solutions for inclusive and sustainable policies and technologies. This purpose positions KONEKSI as a vehicle to produce knowledge on complex socio-economic problems, where effective solutions are often beyond a unique sector or category of stakeholders. It supports both the Knowledge-to-Policy (K2P) cycle and the Knowledge-to-Innovation (K2I) cycle, in a complementary and synergistic way.

Building on existing experience, expertise and relationships and reflecting the maturity of the Indonesia–Australia bilateral relationship, KONEKSI seeks to develop knowledge that is relevant to both countries and that contributes to Indonesia's economic transition to a knowledge-based economy.

KONEKSI has two End of Investment Outcomes (EOIOs):

- Australian and Indonesian organisations have increased collaboration and mutual understanding through knowledge partnerships.
- Innovative solutions for inclusive and sustainable policies and technologies are generated by knowledge partnerships.

Further information on the KONEKSI program is available at www.KONEKSI-kpp.id.

1.2. About BRIN

The National Research and Innovation Agency (BRIN) is a government institution focused on research and innovation. Formerly known as a unit within the Ministry of Research and Technology, BRIN is an integration of all national research entities; Indonesian Institute of Sciences (LIPI), the Agency for Assessment and Application of Technology (BPPT), the National Nuclear Energy Agency (BATAN), the National Institute of the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), and work units within ministries responsible for conducting research, development, and the application of research and technology.

BRIN has three primary functions:

1. Policy Support: BRIN provides evidence- and science-based policy recommendations to ministries, agencies, and local governments, aiding in the development of informed policies.
2. Funding Agency: BRIN allocates research and innovation funding to strengthen the national research and innovation ecosystem.

3. Executing Agency: BRIN operates 12 research organisations and 85 research centers responsible for conducting research, development, assessment, and application of research to drive inventions and innovations.

BRIN focuses on three main programs:

1. Enhancing Research Management: BRIN aims to align research management practices with global norms and standards to ensure high-quality research outcomes.
2. Building Research Capacity: To boost research expertise, BRIN emphasises strengthening human resource qualifications through significant engagement with the global diaspora and partnerships within and outside the country.
3. Expanding National Research Infrastructure: BRIN plans to evolve into a comprehensive provider of national research infrastructure, encompassing human resources, hardware, and software. It will also serve as a hub for scientific and technology-driven creative activities, accessible to academics, students, and industry professionals

As a funding agency, BRIN manages various funding schemes, including a collaborative joint funding program. This program is designed to accelerate knowledge and skill transfer through research and collaboration, aligning with BRIN's commitment to global engagement and partnership. By leveraging this collaborative framework, BRIN is redirecting its research efforts to enhance the value of Indonesia's natural resources and its rich biological, geographical, and cultural diversity. The ultimate goal is to position Indonesia as a global leader in research focused on natural resources and diverse ecosystems.

1.3. About BRIN-KONEKSI Joint Call

The BRIN-KONEKSI Joint Call is an initiative designed to forge partnerships that generate knowledge to support policy and innovation. The scheme is jointly funded, designed and delivered as a special initiative by the Government of Indonesia and the Government of Australia. It aims to support partnerships between Australian and Indonesian institutions to carry out and disseminate high-quality, multidisciplinary applied research on priorities of the Indonesian Government.

The BRIN-KONEKSI Joint Call provides opportunities for Australian and Indonesian organisations to conduct collaborative research for up to two years (2024-2026) on the theme of **Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024**. BRIN and KONEKSI will provide opportunities for partnerships to access international expertise, resources, training and relevant information to support and advance equity in partnerships.

The Australian Government supports the research themes for the joint call determined by the Government of Indonesia, in accordance with Indonesia's Long-Term ¹ and Medium-Term Development priorities.

1.4. About this document

This document provides information and guidance on the *BRIN-KONEKSI Joint Call for Proposals: Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024* grants. This document sets out:

- the topic map ([Annex 1](#))
- purpose of the grant opportunity
- eligibility for grants
- assessment processes and criteria for grants
- how grant applications are monitored and evaluated and

¹ Indonesia Emas 2045 - Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045.

- responsibilities and expectations of the Principal Organisations and partners.

You must read this document before filling out an application.

2. About the Call for Proposals: Indonesia’s Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024

BRIN and KONEKSI seek applications from Australia–Indonesia collaborative research partnerships to undertake research to support Indonesia’s priorities on the bioeconomy,² specifically marine biodiversity, which has the potential to futureproof Indonesia’s blue economy. This involves sustaining and enhancing Indonesia’s marine resources and ensuring their benefits are distributed fairly.

In this grant round on Indonesia’s Bioeconomy, BRIN and KONEKSI are interested in funding research on technologies, practices and products that utilise marine biodiversity and systems to ensure their sustainability. BRIN and KONEKSI welcome research proposals on marine biodiversity and sustainability in the three focus areas of food, health and energy sectors.

Indonesia’s blue economy and bioeconomy

Indonesia is positioning itself to harness its blue economy, capitalising on the vast potential of its marine resources.³ The Government of Indonesia’s current National Medium Term Development Plan and the Indonesia Emas Long Term Development Plan both highlight the priorities of self-sufficiency in food, energy and water.⁴ Marine biotechnology offers solutions for food security, environmental health, human well-being, and industrial improvement, contributing to the Sustainable Development Goals (SDGs) agenda, particularly Goal 2 on Zero Hunger, Goal 3 on Good Health and Wellbeing and Goal 14 Life Below Water. Indonesia’s phased plan for blue economy development aims to ensure comprehensive and sustainable growth towards transforming the blue economy into a new growth engine to promote emerging sectors like renewable energy, biotechnology, research, education and marine conservation.⁵

The bioeconomy stands out as a key area of focus within Indonesia’s blue economy strategy. With its extensive marine area and diverse marine assets, Indonesia is well positioned to capitalise on the opportunities presented by marine biotechnology. By leveraging advancements in marine biotechnology, Indonesia has the potential to address critical challenges related to food security, environmental health and societal well-being. Indonesia stands also to benefit from the projected growth of the global marine biotechnology market, valued at USD5.9 billion in 2022, and is expected to reach USD11.7 billion by 2032.⁶ With this potential, Indonesia is positioning itself as a bioeconomy leader in the Southeast Asian region. Through strategic investment and collaboration, Indonesia aims to unlock the full potential of its marine biotechnology sector, contributing to both national development goals and global sustainability efforts.

Indonesia’s marine biodiversity

Indonesia is renowned as the epicentre of global marine biodiversity, boasting nearly 2 million square kilometres of ocean and over 17,000 islands. The country’s rich biodiversity is sustained by vital coastal and marine ecosystems, including coral reefs, mangrove forests and seagrass beds. These ecosystems

² Bioeconomy is a relatively new field of economy. Its aim is the utilisation of renewable biological resources and their transformation into sustainable products for industrial purposes, e.g. biological pharmaceuticals, biosupplements and biofuels.

³ Indonesia Blue Economy Roadmap (2023), BAPPENAS.

⁴Indonesia Emas 2045 - Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 and the Indonesian Government National Medium-Term Development Plan 2020–2024.

⁵ Indonesian Government National Medium-Term Development Plan 2020–2024.

⁶ Indonesia Blue Economy Roadmap (2023), BAPPENAS.

provide essential support to approximately 180 million people – constituting around 70% of Indonesia’s population – who rely on coastal areas for their livelihood and well-being.

Ensuring the sustainable and beneficial management of marine resources necessitates substantial investment in research. This includes acquiring adequate knowledge of Indonesia's biodiversity resources, mitigating ecosystem damage and the risk of species extinction, maximising the benefits of biodiversity, enhancing science and technology related to biodiversity utilisation and conservation and ensuring that the benefits of utilising this biodiversity will be shared by all. To achieve this, it is essential to understand the potential of species, their distribution and abundance, hazards to their survival, and whether they are being managed effectively for the welfare of Indonesian society. In this regard, research and innovation play pivotal roles.

2.1. Challenges and opportunities for Indonesia’s bioeconomy

This grant opportunity is designed to support Indonesia’s Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024 in the following target areas:

- Food
- Health
- Energy

These topics and areas for biodiversity project applications are introduced in further detail in [Annex 1 – Topic map](#) for aligning your research to the goals of this funding call focusing specifically on the **development of policy and technology** and **aims to prioritise projects addressing Technology Readiness Level (TRL) 4–9**.

Food

Food security and nutrition have emerged as priority issues in Indonesia in recent years, particularly given the growing population.⁷ The Government Regulation No. 17 of 2015 on Food and Nutrition Sustainability highlights the issue of adequate, safe, healthy, nutritious, diverse and accessible food. Many important commodities are still being imported to meet domestic demand and therefore research is needed into the diversification of food products from local biodiversity, particularly marine biodiversity, as well as into advances in food processing and packaging technology.

Health

Fostering health resilience for all is a key agenda for Indonesia.⁸ The Government of Indonesia’s commitment to this effort is reflected in Presidential Instruction No. 6 of 2016 on the Acceleration of Development in the Health Sector, which emphasises the need for self-sufficiency in pharmaceuticals and health technology. Research on ocean biodiversity could provide new sources of materials, and lead to breakthroughs and discoveries in enhancing health resilience.

Energy

Indonesia has committed to its goal of net-zero emissions⁹ even as energy demands continue to rise.¹⁰ As the population grows, energy consumption for households, transportation and industry will increase. To meet future energy needs sustainably, Indonesia must accelerate the development of marine resources such as biofuels and biogas will be critical to ensuring that Indonesia broadens its energy options and ensures sustainability.

⁷ Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan and Gizi (2019). Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian/ Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

⁸ Indonesia Emas 2045 - Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 (2024) BAPPENAS.

⁹ Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 (2022). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

¹⁰ Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia (2023). Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia

2.2. Goals of Cfp: Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024

The **Cfp: Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024** grant opportunity aims to encourage research that informs innovative, sustainable, efficient and equitable biodiversity in Indonesia.

The objectives of **Cfp: Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024** are to:

- explore technology and practices to enhance and ensure sustainability of the biodiversity of marine resources in relation to food, health and energy
- identify, explore and develop the sustainable utilisation of marine biodiversity, including research and technology
- understand approaches to and impacts of utilisation and how to ensure sustainable benefits for all
- understand, guide and direct the local and national policies, regulations and strategies required to effectively manage and distribute the benefits of marine biodiversity utilisation.

The desired outcomes of the **Cfp: Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024** are:

- research that contributes to the sustainable use of marine biodiversity
- research for ensuring that communities benefit from the use of marine biodiversity
- research and development of new resources to contribute to the bioeconomy
- development of new technology and practices that will ensure the sustainable use of marine resources.

The **Cfp: Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024** will not support:

- research that does not involve collaboration between Australia and Indonesia
- research that is based outside of either Australia or Indonesia
- research that is not applied research with clear impact outcomes
- research that focuses solely on biodiversity, without consideration of Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) in the research process and outcomes.

2.3. BRIN-KONEKSI Joint Call – funding thresholds, timeframe and eligible cost

The total funding available for the **Cfp: Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024** is up to AUD6,000,000 or IDR 6 billion, which will be dispersed to a select number of high-quality, multi-discipline and diverse research projects across the priority area of marine biodiversity.

For the **Cfp: Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024** the maximum threshold of funding for any individual project will be up to AUD400,000 (*Bertumbuh/Growing*) or AUD500,000 (*Berbuah/Flourishing*) (**Note:** This total amount includes funding from BRIN, which is capped at IDR1,000,000,000/project/year for the Indonesian partner(s)).

The Secretariat encourages consortiums to develop appropriate research budgets based on the objectives and needs of the research. Research budgets will be evaluated based on value for money principles regardless of category. Individual funding tranches will be agreed upon at the outset aligned with key milestones and stipulated in each grant agreement with the Principal Organisations.

The timeframe for every BRIN-KONEKSI Joint project, from commencement to completion, must not exceed 24 months. This timeframe should include the time required to obtain necessary research permits and ethics clearances, all report writing and dissemination processes relevant to the grant. The Secretariat works with BRIN to provide an expedited service for the research permit and ethics approval. Processing time is estimated to be around one month.

3. About the grant application process

3.1. Overview of application process

You must read these grant guidelines and the application form before you submit an application to **CfP: Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024**.

You are responsible for ensuring that your application is complete and accurate. Giving false or misleading information will exclude your application from further consideration, and potentially future grant opportunities under the BRIN-KONEKSI Joint Call.

For any Expression of Interest application (Stage 1) and full application (Stage 2), you must address all eligibility and assessment criteria. Please complete each section of the respective submission forms online through the KONEKSI Management Information System (KONEKSI MISI) and ensure you provide all the information we have requested. It is your responsibility to ensure any clearances and approvals within your university (research office or directors of schools) or other entity have been received prior to submitting your application.

Please keep copies of your submissions and any supporting papers. The Secretariat may contact you regarding your application. You may want to add cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id and dana-risnov@brin.go.id to your approved senders list.

3.2. The grant selection process

The CfP: Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024 grants process will be undertaken through a 2-stage process to help focus the effort of applicants.

Stage 1: Expressions of Interest (Eoi)

Initially, an open call for Expressions of Interest (Eoi) (referred to as Stage 1) will be undertaken for a high-level research concept against the grant focus areas and initial eligibility criteria. These will be assessed by the Compliance Committee from the Secretariat. This will be known as Stage 1.

Approved Eoi applicants will be invited to progress to Stage 2.

Stage 2: grant applications

Invited applicants will be able to submit a full grant application. This will be known as Stage 2 and involve detailed responses to the selection criteria.

These will be reviewed by a Compliance Committee within the Secretariat (for due diligence and budget) and Expert Peer Reviewers (for academic merit) comprising Australian and Indonesian academics and experts.

All eligible partnerships that submit a grant proposal will be assessed against selection criteria and the process and outcome of each selection round will be documented. The criteria ensure selected proposals entail diverse partnerships who investigate pertinent topics with methodological rigour and who can perform and deliver results commensurate with the funding made available in each grant type.

3.3. Expected timing for the application process

To be considered, you must submit your application(s) to the Secretariat by the closing date below.

Table 1: Expected timing for the application process

Activity	Time
Expressions of Interest period	Open: 21 June 2024 Close: 23.59 WIB on 26 July 2024
Invitation to submit full grant application	16 August 2024
Full grant applications due	13 September 2024
Approval of outcomes of selection process	November 2024
Negotiations and award of grant agreements	November 2024
Notification to unsuccessful applicants	November 2024
Activity commences	December 2024
End date	Specified in application
Duration of Grant	Up to 24 months (up to 30 November 2026)

3.4. Language and format requirements

The Expression of Interest (EoI) can be written either in Indonesian or English. The full proposal must be submitted in English. The EoI and Grant Application forms are accessible through the BRIN and KONEKSI websites at <https://pendanaan-risnov.brin.go.id/> and <http://bit.ly/BRINKONEKSIJointCall>.

EoI and the Grant Application must be submitted electronically via the KONEKSI Management Information System (KONEKSI MISI) and BRIN Pendanaan system. Applications sent by fax or mail/post will not be accepted.

3.5. Questions during the application process

If you have any questions during the application period, please contact the Secretariat at cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id. The Secretariat will respond to emailed questions within 5 working days.

Answers to questions may be posted on the KONEKSI website at www.koneksi-kpp.id.

Applicants may seek assistance from the Secretariat in Indonesian and English.

4. Eligibility

4.1. Eligibility requirements for applications

What are the eligibility requirements for applications?

Applications must be comprised of a partnership between at least one Australian and at least one Indonesian institution (see section [4.2 Eligible entities](#) below). The organisations listed in the proposal are expected to stay involve for the duration of the project.

An application must be submitted collaboratively by an Australian and an Indonesian organisation. Only one Australian organisation will be the grant recipient of KONEKSI and one Indonesian organisation will be the grant recipient of BRIN. These organisations will be the 'Principal Organisations'. Any partner entity will be referred to as a 'Partner Organisation' and will become a sub-contractor of one of the Principal Organisations.

The Principal Organisations will need to contract the sub-partner(s). Further details on partnership requirements are found in section [10.1 Fixed Amount Awards](#).

Eligibility criteria for the Principal Organisation are as follows:

- Must meet the Secretariat due diligence requirements and have the administrative and financial capacity to make the necessary disbursements to all other project partners. Please refer to the below [Annex 3 – Due Diligence](#) document and see section [10.2 Engaging partners](#).

Eligibility criteria to be a Partner Organisation are as follows:

- must be relevant to and involved in the project
- must be based in Australia or Indonesia
- must meet the criteria in section [4.2 Eligible entities](#).

Other requirements and guidance

- All Principal Organisations are required to obtain BRIN ethics clearance and research permits. An ethics clearance is issued by BRIN on a per-research-project basis. A research permit is issued on an individual basis for all individuals listed in the project. Indonesian nationals are required to submit the ethics clearance for the research project. However, Indonesian nationals will not be issued with a permit. The time to obtain a permit and visa process must be taken into account in preparing your overall project timeline (estimated up to 2 months).
- **All organisations (Principal and Partner)** must meet The Secretariat's due diligence and integrity policy requirements, ensuring that potential recipients are not included on registers of ineligible firms and organisations, sanctions or terrorist organisations. This includes the capacity for the organisation to undertake any national interest tests required by either Indonesian or Australian research organisations.

4.2. Eligible entities

To be a participating partner in the proposed activity (as either a Principal Organisation or Partner Organisation), you must meet the eligibility requirements below. To be eligible you must:

- be one of the following entity types:
 - an Indonesian research entity with appropriate legal registration for example, university, civil society organisations, women's organisations and organisations for people with disabilities (OPDs)
 - an Australian research entity with an Australian Business Number (ABN), Australian Company Number (ACN) or Indigenous Corporation Number (ICN)
 - an Indonesian entity/company with appropriate legal registration
 - an Australian entity/company with an Australian Business Number (ABN), Australian Company Number (ACN) or Indigenous Corporation Number (ICN)
 - an Australian or Indonesian registered charity or not-for-profit organisation
 - an Australian or Indonesian local government agency/body
 - an Australian or Indonesian state/territory/provincial government agency/body
 - an Australian or Indonesian federal/national government agency/body
 - an Australian statutory authority.

- be willing to provide or develop child protection guidelines for your project if it involves people under the age of 18 years or other vulnerable people and adhere to DFAT Safeguards.
 - [Child Protection Policy](#)
 - [Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy](#)
 - [Environmental and Social Safeguard Policy](#)

All participating organisations must be based in either Australia or Indonesia. You are not eligible to apply if you are not:

- an Australian, a permanent resident of Australia, an Australian organisation or based within an Australian organisation or
- an Indonesian, a permanent resident of Indonesia, an Indonesian organisation or based within an Indonesian organisation.

4.3. Eligible grant activities

4.3.1. What the grant funds can be used for

The grant’s proposed costs must be allowable, reasonable and directly allocable to the supported activity. KONEKSI will fund the costs managed by the Australian organisations, and BRIN will fund the costs managed by the Indonesian organisations.

An application will need to separate the costs to be covered by KONEKSI or BRIN. This will be further explained at the Budget Template which will be made available at Stage 2 – Full Proposal.

KONEKSI	BRIN
<ul style="list-style-type: none"> ● Fee for BRIN Research permits. Note: A project that includes BRIN Research Organisation as a member of the consortium can apply for an exemption from this fee ● A limited contribution to running costs is reasonable, including a percentage of salary or overhead costs. ● All direct research expenses, including travel reimbursement to organisational site(s) of Australian researcher ● Reimbursement of travel for focus group participants ● Costs for software needed ● Data collection (videotapes, web survey preparation), preparation and coding ● Economy flights, modest accommodation costs, meals and travel allowances, other transport. ● Cost of visa to Indonesia and Australia ● Communication and translation ● Venue hire and catering ● Advertising and promotion, graphic design, photography and printed material ● Production costs, including freight and artists’ wages. ● Conference attendance, when at least one participant from the project or meeting is speaking and the conference is of direct relevance to the grant opportunity ● Reasonable accommodation (including carer costs) 	<ul style="list-style-type: none"> ● All direct research expenses, including travel reimbursement to organisational site(s) of Indonesian researcher. ● Rent cost for using BRIN Laboratories. ● Costs for licensed software needed. ● Data collection (videotapes, web survey preparation), preparation and coding (only allowed to rent during the research period). ● Economy flights, modest accommodation costs, meals and travel allowances, other transport directly related to research activities. ● Catering (applicable only if the meeting or focus group discussion takes place within each respective institution, not as part of a package at a hotel or convention centre).

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Costs for Indonesian partners that are deemed unallowable by BRIN (Open Access, editing and publication costs, conference attendance, carer costs) | |
|--|--|

Technology costs should only be included if the technology is a critical component of the proposed project. The grant cannot include tuition payments or any payments to self or advisor.

You will only be able to use the grant to pay for costs detailed and agreed in your budget and grant agreement. Organisations which are currently a recipient of Australian Official Development Assistance (ODA) funding will need to disclose it and demonstrate that the potential BRIN-KONEKSI Joint Call does not duplicate this funding.

4.3.2. What the grant funds cannot be used for

You cannot use a BRIN-KONEKSI Joint Call for:

KONEKSI	BRIN
<ul style="list-style-type: none"> • Capital expenditure, including purchase of real estate and vehicles • Covering of retrospective costs or recurrent funding of activities • Activities that are already commercially viable in their own right • Activities that will provide a commercial advantage to the applicant (e.g. promotion of the applicant's own business) • Costs incurred in the preparation of a grant application or related documentation • Activities for which other Commonwealth, State, Territory or Local Government bodies have primary responsibility (e.g. academic research, assistance to business, development assistance projects) • Activities undertaken by primary or high schools, including study tours, where travel by a significant number of students is the principal element of the proposal • Scholarships to individual students • Completed projects. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scientific publications, including Open Access, editing or translating • Conference attendance • Capital expenditure, including purchase of real estate and vehicles • Covering of retrospective costs or recurrent funding of activities • Activities that are already commercially viable in their own right • Activities that will provide a commercial advantage to the applicant (e.g. promotion of the applicant's own business) • Costs incurred in the preparation of a grant application or related documentation • Activities undertaken by primary or high schools, including study tours, where travel by a significant number of students is the principal element of the proposal completed projects. • Costs for personal assistants or carers in the research team or participants in the research. • Salary for public servants and costs for Indonesian Government institutions.

5. Funding categories

5.1. Grant and project types

Funding amounts will be determined by the maturity of the research stage and activity, existing work in the relevant area and impact strength of the research based on networks and experience. The Secretariat will seek to fund a mixture of development research and mature research activity and encourages all stages of projects to apply. This round of funding will not support seeding applications. Instead, the priority is to develop projects and partnerships that already have a strong foundation, enabling them to advance research towards achieving a greater impact.

Applications for both funding categories will be assessed against other applications in the same category. For example, 'growing' grant applications will only be assessed against other growing grant applications and will not compete against the 'flourishing' category. An indication of the funding categories is represented below.

Table 2: Funding categories – grant and project types, purpose and impact

Grant type	Bertumbuh (Growing)	Berbuah (Flourishing)
Funding duration	2 years (maximum)	2 years (maximum)
Funding amount	Up to AUD400,000 Note: This total amount includes funding from BRIN, which is capped at IDR1,000,000,000/project/year for the Indonesian partner(s). This includes any costs associated with researcher mobility and infrastructure/laboratory expenses.	Up to AUD500,000 Note: This total amount includes funding from BRIN, which is capped at up to IDR1,000,000,000/project/year for the Indonesian partner(s). This includes any costs associated with researcher mobility and infrastructure/cost of laboratory use.
Purpose	To build on existing efforts For moderately developed efforts, with potential for generating relevant impact towards either policy or technology. Existing research efforts to advance the development of policy innovation or technology; refine or improve early-stage concepts or prototypes, evaluate the usability, effectiveness and impact of policy innovation or technology; strengthen collaborative processes and capacity to produce quality research on relevant topics; proof of concept, prototypes. To establish robust engagement that aligns with policy priorities or industry needs; enhances the chances of adoption and implementation;	To advance research For highly developed, mature research efforts towards either policy or technology Well-established and mature projects to produce high-quality research on relevant topics; to shape regulations and guidelines and contribute to evidence-based policymaking through research findings, insights, and recommendations. To promote system-wide change by introducing innovative approaches, tools and solutions that transform conventional practices, processes and attitudes, benefiting entire systems and sectors; contribution to changes in ways of

	contribution to new or changed policy narratives or content locally, nationally, internationally.	working, in beliefs/systems that govern the system.
Impact sought	<p>Early stage applied research; increased government and/or industry awareness and acknowledgement of research outcomes; application of inclusive methodologies; engagement with end-users/policymakers or industry; participation in policy dialogue; contribution to new or improved products or technologies (improvements to the environment, direct development, testing or scaling)/incubation.</p> <p>Technology Readiness Level: 4-5-6 (for full definition see Annex 2) and that products prioritise ethics, safety in all design phases.</p>	<p>Changes to a policy or new policy, practice systems, products, capacity, leading to system-wide change; publication; use of evidence of community perspectives and experiences; or that results in wider socio-economic benefits; user evaluation of prototypes; product testing/acceleration.</p> <p>Technology Readiness Level: 7-8-9 (for full definition see Annex 2) and that products prioritise ethics, safety in all design phases.</p>

5.2. Past experience and evidence required

Table 3: Funding categories – past experience and evidence required

Grant type	Bertumbuh (Growing)	Berbuah (Flourishing)
<p>Evidence of eligibility through the experience of participants and project partners involved.</p> <p>Please address the following, as relevant to your proposed project type, indicating relevant past experience that will be used to conduct the research and strive to make appropriate impact.</p>	<p>Principal Organisation and partners' demonstration of research experience on the issue.</p> <p>Demonstrated technical experience in implementing similar activities (research or projects).</p> <p>Evidence of prior research development relevant to the topic to substantiate opportunity for further development within the grant.</p> <p>Evidence of performance in Indonesia related to the proposed research objective.</p> <p>Track record of previous project/funding/range of outputs (academic articles, policy briefs, technical frameworks, inclusive</p>	<p>Principal Organisation and partners demonstrated knowledge of previous or existing research in the field, demonstrated prior funding and demonstrated range of outputs (academic articles, policy briefs, technical frameworks, commercialisation) relevant to proposal work.</p> <p>Demonstrate past efforts to conduct research in the area of focus; provide evidence that foundational efforts have already been undertaken in the area of interest.</p> <p>Demonstrate relevant stakeholder networks to support building and generating research impact.</p> <p>Demonstrate previous efforts to ensure that a research activity has been able to leave a positive impact, including strategies for translation.</p> <p>Evidence of past joint research aiming for sector reform, policy change or technological advancement.</p>

	methodologies, commercialisation) relevant to proposal work. Demonstrate alignment to Technology Readiness Level: 4-5-6 (for full definition see Annex 2).	Demonstrate experience and strategies used to manage successful international research collaboration between Australian and Indonesian partners. Demonstrate alignment to Technology Readiness Level: 7-8-9 (for full definition see Annex 2).
--	--	--

6. Preparing your application

In preparing your application, please familiarise yourself with the material below on the unique aspects of a BRIN-KONEKSI Joint Call and access the video materials (available at the KONEKSI and BRIN websites at <http://bit.ly/BRINKONEKSIJointCall> and <https://pendanaan-risnov.brin.go.id/>). You will need the information below to prepare for your EoI – and the full proposal, should your project be selected. The below sections also provide information about the three unique aspects of a BRIN-KONEKSI Joint Call: partnerships, GEDSI and impact.

6.1. Partnerships

Partnerships are an integral component of the BRIN-KONEKSI Joint Call design. The Secretariat values Indonesian and Australian research partnerships from a number of perspectives as listed below.

Table 4: Partnerships

Multi-disciplinary approach to address complex problems	Research partnerships bring together complementary skills, knowledge, and researchers, offering a way of working beyond single-discipline approaches
Combining resources for greater impact	Research partnerships provide opportunities for the best use of scarce resources and provide avenues for multiple in-kind and monetary contributions
Combine multiple sets of knowledge in order to create new knowledge	Research partnerships offer the opportunity for new actors to contribute to a transdisciplinary agenda, and define multiple pathways for policy and practice influence
Challenge conventional approaches to production of knowledge	Research partnerships offer the opportunity to build new and more equitable practices in the production and reproduction of knowledge

Applications that are invited to Stage 2 (full proposal stage) are assessed on the strength and suitability of partnerships. The partnerships component of the assessment is weighted 25% of the overall technical component. The focus of the assessment is on suitability and the potential for partnerships to create opportunities to generate innovative forms of knowledge or technology transfer, and the potential for local benefit, for example in skills and networks, including opportunities to engage internationally.

6.2. Partnership plan

The Secretariat aims to support a diverse set of partnerships that spans the 2 nations, state and non-state actors and academic disciplines. The Secretariat supports new and established partnerships to

develop applied research towards Indonesia’s development goals. Equity principles are fundamental to this Partnerships agenda.¹¹

After being awarded a BRIN-KONEKSI Joint Call, consortia partners are expected to develop a short partnership plan together with all partners to acknowledge, identify and respond to existing and potential inequities within partnerships between countries and regions, disciplines, hierarchies, genders and ability/disability. The intent of this partnership plan is to maximise the potential of the proposed partnership to create opportunities to generate innovative forms of knowledge or technology transfer and potential for local benefit (to increase skill, networks and connections).

The 4 pillars of the Partnership Plan are as follows:

Table 5: Four pillars of the BRIN-KONEKSI Partnership Plan

Four pillars of Partnerships	
Goals and Objectives	<ul style="list-style-type: none"> • Are there different, or even competing goal and objectives? e.g. Academic vs NGO goals • Is it possible to co-develop a set of mutual goals or is one dominant and if so, why?
Relationships	<ul style="list-style-type: none"> • What are the ways of working dealing with challenges/disagreements transition of people involved? • Focal points for partnership and communications • Communication protocols internally and externally
Resources	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution of resources across partners • Addressing inequities through resourcing, such as reasonable accommodation for disability, mentoring for juniors, access to journals
Work Processes	<ul style="list-style-type: none"> • Business processes of activities/research outputs • Expected research outputs and responsibility, proportional percentage of contribution towards outputs • Authorship and Intellectual property • Communications and dissemination of research findings, roles and responsibilities

6.3. GEDSI in research

Increasing and advancing gender equality, disability rights and social inclusion (GEDSI) is a core objective of the BRIN-KONEKSI Joint Call. For applications that are invited to Stage 2 (full proposal stage), GEDSI is assessed and weighted 25% of the overall technical component mark.

6.3.1. GEDSI markers

To help articulate your project’s integration of GEDSI, the Secretariat has developed GEDSI markers. This is a way for applicants to identify the project’s intentions about GEDSI, and for assessors to judge

¹¹ KONEKSI developed the KONEKSI Partnerships Approach based on research and interviews with experts. See Bexley and Williams (2024) ‘Partnering for success: four tips for getting research collaborations right in Indonesia.’ <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/partnering-for-success-4-tips-for-getting-research-collaborations-right-in-indonesia/>.

the claims made about GEDSI throughout the application. In line with international best practice,¹² the Secretariat will use 4 GEDSI markers to refer to each of the focus areas of gender equality (Table 6), disability (Table 7) and social inclusion (Table 8). The 4 markers ensure that every project can contribute to BRIN-KONEKSI Joint Call GEDSI outcomes and that **all GEDSI efforts are recognised**.

An application must meet the minimum requirement of at least one of the GEDSI markers to indicate level of effort: emerging, sensitive or transformative. The use of markers provides an opportunity to self-assess, as well as the possibility to choose more than one category across gender, disability and social inclusion to identify intersectionality. Applications will not be disadvantaged on the number of different markers used. Applicants are encouraged to choose the GEDSI markers most relevant to their project.

The markers indicate the level of effort and focus of GEDSI in each project and allows the full spectrum of efforts to contribute towards the Secretariat’s GEDSI goals. Additionally, the GEDSI markers will assist the Secretariat in monitoring its budget targeting GEDSI, towards DFAT’s recommendation that adequate funding be set aside for ensuring the program or strategy development process is gender and disability inclusive and accessible.¹³

6.3.2. Gender Equality Marker

The Gender Equality Marker is a tool for identifying and assessing the degree to which grant applications have adopted considerations to promote gender equality and uphold the rights of women in their objectives, activities and partnership arrangements. Based on this assessment, grant applicants must select a category: none, emerging, sensitive or transformative.

Table 6: Gender Equality Marker

Category	Minimum requirements
No elements of gender equality	Activity or research grant application not expected to contribute to gender equality.
Emerging	Gender equality is not one of the primary objectives of the activity or research grant, but there is at minimum a degree of awareness of gender inequalities. Minimum criteria: <ul style="list-style-type: none"> • Inequalities and differences between genders are identified in the application, with some sex-disaggregated data used.
Sensitive	Activity or grant application does not explicitly address gender equality or women’s empowerment, but it has taken steps to consider the impacts of the activity or grant on gender equality and women’s empowerment. Minimum criteria: <ul style="list-style-type: none"> • Key gender inequalities and differences are identified in the application, different impacts discussed, and disaggregated data included, proposed methods are gender sensitive.

¹² Handbook on the OECD-DAC Gender Equality Policy Marker, <https://www.oecd.org/dac/gender-development/Handbook-OECD-DAC-Gender-Equality-Policy-Marker.pdf>. UN Development Group (2013) [Gender Equality Marker Guidance Note](#); UN Women (n.a.) [Disability inclusion Markers](#), UN In Brief; CARE (2017) [CARE Gender Marker, Case Studies and Lessons Learned](#), CARE. UN (2018) [Quality assurance of Gender Equality Markers – Improving accuracy and consistency, Guidance Note](#), UNSCEB. World Bank (2019) [Good Practice Note Environment & Social Framework for IPF Operations, Gender](#); O’Donnell, M et al. (2021) [Gender Equality Policy Markers: A beginner’s Guide](#), Center for Global Development.

¹³ DFAT (2021) Disability inclusion in the DFAT development program, Good Practice Note April 2021.

	<ul style="list-style-type: none"> Resources to address identified inequalities are detailed against activities. Some engagement with women’s groups is proposed and steps taken to identify and mitigate any potential negative impact. Gender balance has been considered in the composition of the research team.
Transformative	<p>Gender-equality-targeted activities or grant applications, or an activity or research grant application with women’s rights and gender equality as the main outcome.</p> <p>Minimum criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gender inequalities and differences, and impacts, are identified and disaggregated data included. Outputs, outcomes, and recommendations focus on gender equality and women’s rights. Partnerships have a strong commitment to the principle of diversity and inclusion. Engagement of women’s groups or women is critical to the activity or grant applications and steps are taken to identify and mitigate any potential negative impact. Women’s leadership in the research team is considered critical to the project.

Grant applicants will be asked to provide a detailed budget to include those with caring responsibilities. The Gender Marker will be complemented by detail on budget allocations for necessary modifications to enable women and carers to have the same opportunities as people without caring obligations, i.e. reasonable accommodations for people with caring responsibilities. Costings of caring responsibilities may include:

- transport and safety concerns (i.e. will safe transport be made available for women and carers) both in the research team or participants in the research
- costs for carers in the research team or participants in the research.

Guidance on budgeting for caring with responsibilities will be included in the financial instructions for research grant applicants.

6.3.3. Disability Inclusion Marker

The Disability Inclusion Marker provides a tool to allow grant applicants to self-assess the degree to which their proposal has adopted considerations to promote disability rights in its objectives, activities and partnership arrangements. Based on this assessment, grant applicants must select a category: none, emerging, sensitive or transformative.

Table 7: Disability Inclusion Marker

Category	Minimum requirements
No elements of disability inclusion	Activity or research grant application not expected to contribute to disability inclusion.
Emerging	Disability rights is not one of the objectives of the activity or research grant, but there is at minimum a degree of awareness of the issues facing people with disabilities.

	<p>Minimum criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> Barriers faced by people with disabilities are identified in the research grant or activity design, with disaggregated data used to support the proposal.
Sensitive	<p>Activity or grant application does not explicitly address disability inclusion, but it has taken steps to consider the impacts of the activity or grant on people with disabilities.</p> <p>Minimum criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> Key matters surrounding disability inclusion are identified in analysis, different impacts discussed, and disaggregated data in methods are proposed. Resources to address identified barriers are detailed against activities. Engagement of disability inclusion groups is proposed, and steps taken to identify and mitigate any potential negative impact.
Transformative	<p>Disability inclusion grant applications with disability rights as the main outcome.</p> <p>Minimum criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analysis, methods, outputs, outcomes and recommendations focus on disability rights. Disability issues and the impact of the activity or research grant application on people with disability are identified, and disaggregated data included. Partnerships have a strong commitment to the principle of diversity and inclusion, promoting people with disability in the research team. Engagement of people with disability is critical for the activity or grant application and steps are taken to identify and mitigate any potential negative impact.

Grant applicants will be asked to provide a detailed budget for reasonable accommodations. Disability Inclusion Markers will be complemented by detail on budget allocations for necessary modifications to enable people with disabilities to have the same opportunities as people without disabilities, i.e. reasonable accommodations for people with disabilities. Costings of reasonable accommodations may include:

- accessible transport and accessibility (i.e. temporary ramps, assistive devices)
- accessible communications (i.e. subtitles in video announcements, easy-read language formats, sign language interpretation)
- costs for personal assistants or carers in the research team or participants in the research.

Guidance on budgeting for reasonable accommodations will be included in the financial instructions for research grant applicants.

This disability marker will assist the Secretariat in monitoring its budget targeting disability inclusion against DFAT’s recommendation that adequate funding has been set aside for ensuring the program or strategy development process is disability inclusive and accessible (approximately 3 to 5 per cent of the budget).¹⁴

¹⁴ DFAT (2021) Disability inclusion in the DFAT development program, Good Practice Note April 2021.

6.3.4. Social Inclusion Marker

The Social Inclusion Marker provides a tool to allow grant applicants to self-assess the degree to which their proposal has adopted considerations to promote social inclusion in its objectives, activities and partnership arrangements. Social inclusion can include youth, the elderly, marginalised groups and people living in regional and remote areas. Based on this assessment, grant applicants must select a category: none, emerging, sensitive or transformative.

Table 8: Social Inclusion Marker

Category	Minimum requirements
No elements of social inclusion	Activity or research grant application not expected to contribute to social inclusion.
Emerging	<p>Social inclusion is not one of the objectives of the activity or research grant, but there is at minimum a degree of awareness of the issues facing those groups.</p> <p>Minimum criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barriers faced by marginalised groups are identified in the research grant or activity design, with disaggregated data used to support proposals.
Sensitive	<p>Activity or grant application does not explicitly address social inclusion, but it has taken steps to consider the impacts of the activity or grant on marginalised groups.</p> <p>Minimum criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Key aspects of the marginalisation of specific groups are identified in the analysis, different impacts discussed and disaggregated data in methods proposed. • Resources to address identified barriers are detailed against activities. • Engagement of vulnerable groups proposed, and steps taken to identify and mitigate any potential negative impact.
Transformative	<p>Social inclusion targeted activities or grant application, or an activity or research grant application with the rights of a particular marginal group as the focus of its outcomes.</p> <p>Minimum criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analysis, outputs, outcomes and recommendations focus on the rights of a marginal group. • Social inclusion issues and impact of the activity or research grant application on marginal groups are identified and disaggregated data included. • Partnerships have a strong commitment to the practice of inclusion and diversity. • Representations of marginalised groups is critical for the activity or grant application and steps are taken to identify and mitigate any potential negative impact.

6.4. Impactful research

All collaborative research projects funded by the Secretariat are applied research and must contribute new knowledge for policy or technology (known as K2P or K2I). The Secretariat has identified 2 funding categories, which refer to different expectations of purpose and impact, elaborated on in section [5 Funding categories](#). The Secretariat defines impact broadly, from applying new methodologies to making systemic changes. It is recommended that applicants consider innovative approaches to communicating their research throughout the research cycle using both traditional (for example, open access journal articles) and non-traditional approaches (for example, blogs, opinion pieces, short videos).

Impact is weighted 25% in Stage 2 (full proposal) and is assessed on the impact of the research, a stakeholder plan and implementation capacity and partnership impact. These components provide applicants with the opportunity to identify the strength of their partnership towards collaborating and generating maximum impact.

6.5. Use of artificial intelligence in preparing your application

Where applicants use generative AI and AI-assisted technologies in the writing process in preparing the grant applications, these technologies should only be used to improve readability and language of the work. Applying the technology should be done with human oversight and control and applicants should carefully review and edit the result, because AI can generate authoritative-sounding output that can be incorrect, incomplete, or biased. Applicants are ultimately responsible and accountable for the content of the work.

Applicants should not list AI and AI-assisted technologies as an applicant or author of the application, nor cite AI as an author. Authorship implies responsibilities and tasks that can only be attributed to and performed by humans. Each applicant is accountable for ensuring that the accuracy and integrity of the application are appropriately addressed. Applicants are also responsible for ensuring that the work is original, that the stated applicants qualify for eligibility, and that the work does not infringe third party rights before they submit.

7. Stage 1: The Expressions of Interest (Eoi) assessment

7.1. Assessment criteria for the Eoi

Eligible applicants for the Expressions of Interest (EOI) will be assessed using broad assessment criteria:

- Partnership eligibility: partnership must include at least one Australian and one Indonesian organisation, and one Industry Partner.
- Duration eligibility: project to be completed within 2 years (maximum).
- Funding size eligibility:
 - Growing: up to AUD400,000
 - Flourishing: up to AUD500,000

Note: This total amount includes funding from BRIN, which is capped at up to IDR1,000,000,000/project/year for the Indonesian partner(s). This includes any costs associated with researcher mobility and infrastructure/cost of laboratory use.

- Alignment with marine biodiversity themes: the project concept provides a clear and justified statement on objective, methods, anticipated outputs, and outcomes that align with the selected topic.
- GEDSI responsiveness: the GEDSI statement is aligned with the self-nominated categories of GEDSI mainstream or GEDSI specific, as well as the GEDSI markers.

- Projected impact and relevant outcomes: the statement clearly identifies the appropriate benefit and impact of the project according to the selected funding and impact categories.

EoI that fail to demonstrate all the assessment criteria will not proceed to Stage 2.

7.2. Completing the EoI

The assessment components are mapped onto the EoI form (see [Annex 4 – BRIN-KONEKSI Joint Call Expression of Interest template](#) for an indication of submission expectations). The EoI itself will only be accepted through the KONEKSI Management Information System (KONEKSI MISI). The EoI will be assessed and will determine whether your organisations will be invited to participate in Stage 2 (i.e. the full grant application process).

Eligible applicants should follow the process described below.

7.2.1. Create a login

The **Australian** Principal Organisation must create a login to access the KONEKSI MISI.

7.2.2. Accessing the resource material

Applicants should familiarise themselves with the resources in the KONEKSI MISI.

7.2.3. Begin your application

Nominate one Indonesian organisation who will be the Principal Organisation.

- **Principal Organisation:** there should be one Australian **and** one Indonesian organisation who will be the Principal Organisations
- **Indicative partnership:** list other intended partners.

Personnel resource and time allocation must be calculated accordingly to ensure that they are not charging 100 per cent of their time to each project. Organisations and consortiums may make multiple submissions. If a Principal Organisation makes multiple submissions, these must be treated as separate grant proposals.

7.2.4. Inviting your research team to assess and edit the application

The Australian Principal Organisation must invite the Indonesian Principal Organisation to access and collaborate on the application. The Principal Organisation can also invite other members of the research consortium. To do this, click 'Invite a Colleague', enter the email address, and select the option that allows invited colleagues to edit the EoI. Then, click 'Send Invitation Email' followed by 'Save & Close.'

7.2.5. Submitting your application

Applications can be saved and amended online before submission. It is your responsibility to ensure that your application is complete and accurate and submitted in accordance with these Guidelines.

You cannot change your application after the closing date and time without the prior approval of the Secretariat. If you find a mistake in your application after it has been submitted or if there are changes to contact details or other information pertinent to the completion of the project, as long as it does not change the substance of your application, you should contact The Secretariat at cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id.

7.2.6. Who will assess the EoI?

A Compliance Committee, established by the Secretariat, will undertake the assessment of each expression of interest against the EoI selection criteria. The Compliance Committee will then either approve project concepts to proceed to the next round (Stage 2) or reject the proposal.

7.2.7. Notification of successful EoI

Successful and unsuccessful applicants will be notified by email. Successful applicants will be invited to proceed to Stage 2 and submit a full grant application.

8. Stage 2: grant application process

Upon invitation to Stage 2, applicants are required to submit a full grant application, including both technical and financial components.

8.1. Assessment criteria for applications

You will need to address all the following assessment criteria in your grant application. The Secretariat will judge your application based on the weighting given to each criterion. The amount of detail and supporting evidence you provide in your application should be relative to the project size, complexity and grant amount requested.

Due Diligence Assessment

- a. Organisation legal registration.
- b. Physical address and an official website.
- c. Organisation experience.
- d. Relevant organisation policy documents and application.
- e. Audit arrangements.
- f. Financial management practices.
- g. Fraud and corruption.
- h. Integrity systems.
- i. Proscribed list check and risk management.
- j. Prevention of Sexual Exploitation and Harassment (PSEAH) and Child Protection Policy.

Proposal assessment criteria

2.1 Topic choice and project quality – 25%

2.1.1 Topic alignment and project concept

- Project concept aligns with biodiversity priority areas and themes (refer to topic maps).
- Significance, innovation and relevance of the chosen topic in the context of biodiversity.

2.1.2 Research merit, rigour and methodology.

- The research project's focus, question and methodology are of a high standard, and draw on up-to-date and appropriate academic literature.
- Clear and well-designed conceptual framework and methodology.
- Clear and well-supported hypothesis/rationale.
- Clear project design and appropriate research methods.
- The project addresses an issue important to advancing the research area.

2.1.3 Resources, budget and achievability

- The adequacy and appropriateness of the budget, including cash and in-kind contributions pledged by the participating organisations.

- Resources: access to resources, infrastructure, equipment and or facilities for data collection and completion of the project.
- Budget appropriateness: the adequacy and appropriateness of the budget, including cash and in-kind contributions pledged by the participating organisations.
- Achievability of the project's goals within the proposed budget and timeframe.

2.2 Proposed partnerships – 25%

2.2.1 Partnership suitability

- Suitability of Principal Organisation for the chosen research topic and project goals.
- Suitability of the proposed partners for the chosen research topic and project goals.
- Commitment to equity principles in partnership processes and project activities, such as evidence of co-design and plan for co-authoring.

2.2.2 Partnership potential

- Potential of the proposed partnership to create opportunities to generate innovative forms of technology or knowledge transfer.
- Potential for local benefit (skill, networks, connections).

2.3 Impact strategy – 25%

2.3.1 Relevance of proposed impact to policy/innovation

- Appropriateness of proposed impact for the research policy and or innovation area.
- Feasibility of and need to generate impact in the policy/innovation area.
- Appropriateness of the proposed impact for the research activity.

2.3.2 Appropriateness of strategies to achieve impact (including stakeholder plan)

- Relevance and appropriate impact strategies, according to whether the project is seeking to make policy or innovation impact.
- Stakeholder plan, including integration of stakeholder engagement within the research, and strategies for promotion, and/or dissemination of research outcomes.

2.3.3 Implementation capacity for impact

- Clear and feasible roles and responsibilities, and commitment/ownership from each participating partner towards impact goals.
- Capacity of the respective partners to deliver on their planned activities for impact.

2.4 GEDSI responsiveness – 25%

2.4.1 GEDSI-responsive research design and goals

- Articulation of the ways in which the project will address inequalities and advance gender equality, disability rights or social inclusion through research design.

2.4.2 GEDSI-responsive methods and processes

- Level of engagement with GEDSI groups through different stages of the research, including co-design and consultation considerations.
- Identifies appropriate inclusive methodologies.

2.4.3 GEDSI-responsive outcomes and impact strategies

- Identifies appropriate, beneficial and relevant proposed outputs and outcomes of the research.

8.2. Completing your Stage 2 application

Applications will only be accepted through the BRIN-KONEKSI Management Information System (KONEKSI MISI) and BRIN Pendanaan system.

Applications comprise several components:

Australian Principal Organisation:

•

- **Technical proposal:** A template demonstrating the application format for Stage 2 Grant Applications can be found in [Annex 5](#); however, you will need to complete this through the KONEKSI MISI.
- **Activity plan:** A template describing your activity plan will be made available to invited applicants at KONEKSI MISI. You will need to download the template, and upon completion, this file will need to be uploaded to the relevant section of your online application.
- **Financial proposal:** A template demonstrating the budget for Stage 2 Grant Applications will be made available to invited applicants at KONEKSI MISI. You will need to download the template, and upon completion, this file will need to be uploaded to the relevant section of your online application. Supporting documents for the budget should be kept in the applicant’s own online storage and BRIN-KONEKSI should be provided with a link to access them.
- **Due diligence:** You will also need to complete the Due Diligence Assessment online (Australian universities, Indonesian Government agencies, and Indonesian universities (recognised and registered by Indonesian Ministry of Education, Culture, Research, and Technology) are exempted from completing this form *by confirming and certifying their institution status*). This includes a financial and budgetary component.

Indonesian Principal Organisation:

- **Uploading your application to BRIN System:** Both technical and budget proposals **must be downloaded** from KONEKSI MISI and then uploaded to the BRIN Pendanaan system.
- The Indonesian principal investigator **must register** the email addresses of all Indonesian researchers in the research consortium. **Each researcher must confirm** their participation in the project on the BRIN Pendanaan system.

8.3. Assessment of grant applications

Stage 2 Grant Applications will be processed using 2 synchronous streams of assessment reflecting the categories of grant assessment criteria: one stream for general assessment and due diligence, and another for research merit. These will be combined and hierarchised by the Secretariat, who will develop recommendations. See table below.

Table 9: Overview assessment of grant applications

Expression of Interest (Stage 1)
The Secretariat will undertake the assessment of each organisation that submits an Expression of Interest. The Secretariat will reject or approve project concepts based on the Eol assessment criteria.
Full Proposal (Stage 2)
STEP 1: The Secretariat Undertakes a general assessment of proposals and budget, due diligence, and security checks.
STEP 2: Peer review Peer review of the technical component is conducted by Indonesian and Australia research experts. They will assess the technical proposal and budget against the assessment criteria. Incomplete applications will not be assessed.
Grant Decisions are made Based on the peer review results, the Secretariat will prepare a list of top-ranked proposal to be proposed to the BRIN–DFAT Technical Committee for approval. Upon no-objection, the Government of Indonesia and Australian Government will then endorse the funding and priority of successful grants.

The Secretariat Compliance Committee will undertake due diligence and compliance risk assessments of each organisation that submits a grant application. Any applications that do not meet the assessment criteria will be excluded from further assessment at this stage in the process.

All Stage 2 applications that meet the hurdle requirements in the assessment criteria will be reviewed by academic experts with relevant disciplinary expertise. A pool of experts will first be drawn together comprising appropriate Indonesian and Australian academics in relevant fields, including marine biodiversity disciplinary expertise, GEDSI-responsive expertise, and Indonesian country expertise. Then, relevant experts from this pool will be identified for each grant proposal and nominated to form specific Peer Review experts for each application.

Experts will be asked to draw on their academic expertise to review grant applications based on the assessment criteria. All reviewers will be required to comply with the BRIN-KONEKSI Joint Call Reviewer Guidelines and Conflict of Interest processes.

The Secretariat will then report to the BRIN–DFAT Technical Committee for a no-objection review of grant recommendations. This committee is made up of representatives from the Australian Government and Government of Indonesia.

DFAT and BRIN will then review applications against its policies, determine successful applicants and make the final approval of grant applications.

A call for reviewers will be made available on the BRIN-KONEKSI website <http://bit.ly/BRINKONEKSIJointCall> from 21 June to 26 July 2024.

8.4. Who will approve grants?

BRIN–DFAT Technical Committee as the delegates will then make the final decision to approve a grant based on recommendations from the Secretariat.

The delegate’s decision is final in all matters, including:

- the approval of the grant
- the grant funding amount to be awarded.

The Secretariat reserves the right to offer less funding than sought by the applicant. Applicants may choose not to proceed with the grant offered to them. The applicant cannot appeal final grant decisions made by DFAT and BRIN.

8.5. Notification of Stage 2 (grant application) outcomes

You will be advised of the outcome of your application in writing via email.

If you are successful, you will also be advised about any specific conditions attached to the grant.

9. Successful grant applications

9.1. The grant agreement

If you are successful:

- the Australian Principal Organisation will enter into a grant agreement with KONEKSI
- the Indonesian Principal Organisation will enter into a grant agreement with BRIN.

Standard terms and conditions for the grant agreement will apply and cannot be changed. Any additional conditions attached to the grant will be identified in the grant offer or during the grant agreement negotiations.

Note: The Secretariat require each proposed partner in a selected project to submit a letter of intent to become a sub-contracted partner to the Principal Organisations. This letter is one of the necessary requirements for the contract.

BRIN and KONEKSI will negotiate agreements with successful applicants by November 2024. If there are unreasonable delays in finalising a grant agreement, the grant offer may be withdrawn, and the grant may be awarded to a different applicant.

Where a grantee fails to meet the obligations of the grant agreement, BRIN and KONEKSI may withhold or suspend the funding to the grantee and/or require the grantee to repay all or part of the grant. No compensation is payable for termination in these circumstances.

You should not make financial commitments until a grant agreement has been executed by BRIN and KONEKSI.

9.2. How the grant will be paid

The grant agreement will state the maximum grant amount to be paid.

KONEKSI and BRIN will make an initial payment on execution of the grant agreement and on receipt of a valid invoice. We will make subsequent payments, detailed in the grant agreement, progressively based on your interim reports, including acquittals, and receipt of a valid invoice.

Grants will be awarded in the currency reflected in the budget (either AUD or IDR). You are responsible for any financial differences that may occur from the time of the application submission to when the project takes place, due to fluctuations in the exchange rate.

9.3. Grant agreement variations

We recognise that unexpected events may affect the progress of a project. In these circumstances, you can request a project variation, including:

- changing project milestones consistent with the original intent of the project
- reasonable extensions in the timeframe for completing the project.

The BRIN-KONEKSI Joint Call does not allow for an increase to the agreed amount of grant funds

If you want to propose changes to the grant agreement, you must put them in writing before the grant agreement end date. Contact the Secretariat for further information at cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id. The Secretariat will not consider changes after the grant agreement end date.

You should not assume that a variation request will be successful. The Secretariat will consider your request based on factors such as:

- how it affects the project outcome
- consistency with the biodiversity policy objective and any relevant policies of the department
- changes to the timing of grant payments
- availability of program funds.

9.4. Public announcement of grants

If successful, your grant will be listed on the KONEKSI and BRIN websites within 21 days of the date of effect.

9.5. Feedback

If you are unsuccessful, you may ask for feedback from the Secretariat within one month of being advised of the outcome. The Secretariat will give written feedback within 3 months of feedback being requested.

10. Preparing the commencement of your grant

10.1. Fixed Amount Awards

BRIN-KONEKSI Joint Call adopts a 'Fixed Amount Awards' (FAA) approach to grants payment disbursement. Under this approach, tranche payments will be released on approval of 'milestones' or deliverables agreed between KONEKSI and BRIN and each grantee. This enables greater flexibility for partners to manage grants using their own internal financial mechanisms based on auditable accounting standards and avoids overburdening them with detailed financial reporting.

FAA focuses principally on outputs and results, in which the value of the grant to the recipient organisation (grantee) is based on a fixed pre-authorized amount and payment is not based upon the actual costs incurred by the recipient. Grantee accountability is based primarily on performance and results.

FAAs are appropriate when the work that will be performed can be priced with a reasonable degree of certainty in advance. Samples of appropriate mechanisms to establish an appropriate price include the entity's experience with similar types of work for which outcomes and their costs can be reliably predicted, or the entity can easily obtain price estimates (e.g. bids, quotes, catalogue pricing) for significant cost elements.

The characteristics of FAAs include the following:

- **Predetermined amount:** The grant specifies a fixed sum of money that will be provided to the recipient. This amount is determined during the grant application process and is agreed upon by both BRIN-KONEKSI and the grantee.
- Grantees are paid the **exact amount** specified for the deliverable milestone, regardless of whether they spend more or less to complete it.
- Payments are made upon grantee's satisfactory achievement of milestones.
- Verification of actual costs is not a pre-requisite to payment and a financial report is not required.
- **Budget flexibility:** The grantee has discretion to reasonably re-allocate the grant funds during the program implementation according to the project's needs, as long as the overall program objectives are achieved within the allocated budget.

The process

- **Establishing the grant budget:** The proposed grant budget should be established as fair and reasonable. This involves a thorough review and analysis of the budget proposal.
- **Setting the award amount:** Once the grant budget has been approved, the award amount is set. This amount is then allocated among the various milestones of the project.
- **Allocating milestone payments:** The milestone payments are predetermined/preauthorized amounts that are set for each milestone. This amount remains fixed regardless of the actual costs incurred to complete the milestone.

- **Predefined grant amount:** As the grant amount is predetermined, detailed cost reporting based on actual expenses is unnecessary.

Implications for Financial Reporting, Budgeting and Disbursements

Financial Reporting:

- Submission of a financial report with detailed itemised costs, accompanied by expense receipts, is not a prerequisite for grant payment and is not required to be submitted to KONEKSI.
- BRIN-KONEKSI Grantees are required to record all grant financial transactions and prepare a financial report in accordance still with their institution's practices and requirements. KONEKSI and BRIN reserve the right to review the report when requested.
- BRIN-KONEKSI Grantees effectively manage grant allocations to ensure that the predetermined grant amount covers the costs of achieving the milestones.

Budget:

- The FAA mechanism provides reasonable flexibility for grantees to reallocate funds between budget categories, as long as the total approved budget and the agreed-upon objectives and outputs remain unchanged.

Disbursements:

- Grantees are required to adhere to their institution's own policies and procedures in the disbursement of grant funds.
- The FAA mechanism provides reasonable flexibility for grantees to disburse expenses to meet the actual needs arising during project implementation. However, if the actual costs exceed the grant amount, the grantee will be responsible for covering these additional costs.
- This flexibility excludes disbursements intended to cover unallowable costs, as outlined in the BRIN-KONEKSI Joint Call Financial Guidelines.

10.2. Engaging partners

Principal Organisations are responsible for legally engaging all partners, defined as an organisation. Engagement can be in the form of a sub-contract with a Partner Organisation. The Principal Organisation is held accountable for the due diligence of all partners. Principal Organisations are recommended to conduct due diligence processes for all partners.

10.3. Indemnity insurance

For Australian Principal Organisations, as you are preparing your partnerships, it is recommended that you understand your institutions' requirements on professional indemnity insurance. For example, some Australian Universities require individuals to have to a legal entity or professional indemnity insurance. Some Australian professional associations provide indemnity coverage. See the below resource on professional indemnity insurance <https://www.acs.org.au/professionalrecognition/ict-liability-insurance.html>, which covers:

- Professional Indemnity (Errors & Omissions Liability Insurance) – AUD10 million
- Public Liability & Product Liability (General Combined Liability Insurance) – AUD20 million.

10.4. Overview of ethics/permit process

All BRIN-KONEKSI Joint Call are required to obtain BRIN ethics clearance and a research permit. This includes all Indonesian nationals (including those employed by Indonesian and Australian institutions). Ethics clearance and the permit are a single process administered by BRIN. An ethics clearance is issued by BRIN on a research project level. A research permit is issued on an individual basis for all those listed in the project. Indonesian nationals are required to submit the ethics clearance (they will

not be issued with a permit). All grantees must follow all BRIN ethics clearance regulations (), [including requirements](#) regarding data and outputs.

Successful research projects are encouraged to take advantage of the Secretariat expedited service to obtain a research permit for timely commencement of research.

Note: There is a fee associated with the research permits. A project that includes the BRIN Research Organisation as a member of the consortium can apply for an exemption from this fee.

11. Delivery of grant activities

11.1. Your responsibilities

If you receive a grant, you must submit grant activity reports in line with the timeframes in the grant agreement. Sample templates for these reports will be made available by the Secretariat. The Secretariat will expect you to report on:

- progress against agreed project milestones, including GEDSI, specified in your grant agreement
- progress against actively deepening relationships and development of your project
- contributions of participants directly related to the project
- engagement with stakeholders.

You will also be responsible for:

- meeting the terms and conditions of the grant agreement and managing and promoting the activity efficiently and effectively
- complying with record keeping, reporting and acquittal requirements as set out in the grant agreement
- all administrative arrangements associated with your project including visa and travel arrangements, visa charges, airport taxes, ground transport, travel and health insurance for project participants' medical and hospital insurance cover both overseas and in Australia for visitors not covered by Medicare (including evacuation and death cover) and necessary insurance for equipment and accommodation costs and arrangements
- other insurances, including workers' compensation, as required by law and professional indemnity, public health and liability insurance, as required by the project
- complying with all applicable domestic and international laws.

11.2. The Secretariat's responsibilities

The Secretariat will:

- meet the terms and conditions set out in the grant agreement
- provide timely administration of the grant
- evaluate the grantee's performance
- provide technical support on issues of partnerships, impact and GEDSI.

The Secretariat will monitor the progress of your project by assessing reports submitted by the Principal Organisation, may attend project events and conduct site visits to confirm details of your reports if necessary. Occasionally the Secretariat may need to re-examine claims, seek further information, or request an independent audit of claims and payments.

Funding awarded by the Secretariat to your organisation does not imply that the Department of Foreign Affairs and Trade and BRIN endorse the views of grantees involved in any funded activity.

11.3. Reporting and output requirements of a BRIN-KONEKSI Joint Call

The main purpose of the BRIN-KONEKSI Joint Call is to fund research. The Secretariat aims to be as 'light touch' as possible in its reporting requirements. The process of partnerships and the experiences of preparing and implementing research as well as sharing the results of the research are of interest to the Secretariat. The grant cycle begins when the Principal Organisation signs the grant agreement. Below is a short overview of the reporting requirements and responsibilities.

Table 10: Reporting requirements

Requirement	Deadline	Responsible party
Quarterly Progress Update	End of the first annual quarter and each quarter for the duration of the grant	Australian Principal Organisation in collaboration with Indonesian Principal Organisation and partners
Partnership Plan	End of the first annual quarter	Australian Principal Organisation in collaboration with Indonesian Principal Organisation and partners
Partnership Health Check	In the first month and every tenth month thereafter	Australian and Indonesian principal organisations, and each partner in a research partnership
BRIN Financial report	Before requesting an additional payment instalment	The Indonesian principal organisation should report finances exclusively for the approved BRIN grants. Financial reporting for the Australian principal organisations under the KONEKSI grant is not required.
BRIN Final Financial report	At the end of the research period	Indonesian Principal Organisation
BRIN Final report	Fourteen days prior to the grant's end.	Indonesian Principal Organisation

Required Outputs for Indonesian Principal Organisations, as required by the Indonesian Government:

1. Two journal articles where the Indonesian lead must be first author or co-author and/or corresponding author, and accepted in a Q1 or Q2 international journal; and/or
2. Intellectual Property registered with minimum status; and
3. Letter of Intent commitment to commercialisation pathway from industry

11.3.1.KONEKSI Quarterly Progress Updates

The KONEKSI Quarterly Progress Updates are required from Australian Principal Organisation in collaboration with Indonesian Principal Organisation and partners.

The KONEKSI Quarterly Progress Updates are aimed at providing timely information on activity progress, implementation risks, key outputs and the ‘reach’ of these outputs among ‘knowledge users’ – intermediaries, policy makers, industry groups or other networks and coalitions. Tracking ‘reach’ or ‘engagement’ with these actors is particularly important for understanding how well a piece of collaborative research is positioned to influence policy (K2P) or innovation practice (K2I). The following 5 monitoring questions will be addressed throughout the grant implementation process:

- Did we do what we expected to do?
- What challenges affected our research project?
- How did we work together?
- How did we engage the relevant stakeholders, networks and potential users of our research activities?
- What signs of uptake, use and influence have we seen?

11.3.2.KONEKSI Partnerships Plan

The KONEKSI Partnerships Plan is required from the Australian Principal Organisation in collaboration with Indonesian Principal Organisation and partners.

The KONEKSI Partnerships Plan encourages partners to consider how they will address issues in each partnership plan pillar, and what indicators the project team will develop to measure activity success and team engagement. Within the first quarter of a successful grant, the plan should be developed together with all partners and tailored specifically to ensure the success of the research project. A set of questions are developed by the Secretariat to guide this process as described in section [6.2 Partnership Plan](#). The Secretariat will provide information sessions and workshops to support to the development of the Partnership Plan in the first quarter of a grant.

11.3.3.Partnerships Health Check

The Partnerships Health Check is required from the Australian and Indonesian Principal Organisations, and each partner in a research partnership.

A checklist on [Annex 6 – Partnership Health Check](#) is structured around the 4 key partnership pillars: Context, Relationships, Resources and Work Processes for each partner in a research partnership to complete.

11.3.4.BRIN Financial Report

The Indonesian Principal Organisation should report finances exclusively for the approved BRIN grants. Financial reporting for the Australian Principal Organisations under the KONEKSI grant is not required. A financial report showing that **at least 80% of the grant** has been used is required for Indonesian Principal Organisations **requesting an additional payment instalment**.

11.3.5.BRIN Final Financial Report

A final financial report showing how the BRIN grant has been used is to be submitted by the Indonesian Principal Organisation at the end of the research period.

11.3.6. BRIN Final Report

A final research project report is to be submitted by the Indonesian Principal Organisation 14 days before the end of the specified research period. All outputs produced by the project must include the logo of BRIN and LPDP. Inclusion of the KONEKSI logo must follow the KONEKSI Brand Guidelines.

12. Probity

The Secretariat will make sure that the grant process is fair, accords with published guidelines, incorporates appropriate safeguards against fraud, unlawful activities and other inappropriate conduct.

Note: The Secretariat retains the right to revise the BRIN-KONEKSI Joint Call Guidelines. When this happens, the revised guidelines will be published on KONEKSI and BRIN's website.

12.1. Complaints and applicant feedback process

The Secretariat will make available all questions submitted to the Secretariat in the Frequently Asked Questions page on the KONEKSI website at <http://bit.ly/BRINKONEKSIJointCall>.

All complaints about the grant process must be lodged in writing to cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id.

The Secretariat will not provide feedback to unsuccessful applicants at the EoI stage.

The Secretariat will only provide feedback to unsuccessful Stage 2 grant applications who request feedback. There are 3 components of feedback, graded to assist applicants in identifying the relative overall position of their application. The Secretariat will provide requested feedback within 3 months of an email request.

The table below provides an example of the feedback that the Secretariat will provide from the Stage 2 peer review assessment of a research proposal. The Secretariat will provide information on your application's quartile from 1st to 4th for each criteria, with 1st being the lowest scoring quarter of unsuccessful applications, and 4th being the highest scoring. This information is based on the expert peer reviewers scores form.

Table 11: Example of Secretariat feedback

Proposal title	Research ABC				
Requestor	Dr XYZ		Email:		
Assessment Criteria	Topic Choice and Project Quality	Proposed Partnership	Impact Strategy	GEDSI Responsiveness	Overall Score
Score 1					
Score 2					
Overall Rank	Fourth quartile of unsuccessful applications within the scheme round				

12.2. Conflict of interest

Any conflict of interest could affect the performance of the grant. There may be a conflict of interest, or perceived conflict of interest, if the Department of Foreign Affairs and Trade, Government of Indonesia, or any member of the assessment committee and/or you or any of your personnel:

- has a professional, commercial or personal relationship with a party who is able to influence the application selection process, such as an Australian or Indonesian civil servant
- has a relationship with an organisation which is likely to interfere with or restrict the applicants from carrying out the proposed activities fairly and independently or
- has a relationship with, or interest in, an organisation from which they will receive personal gain if the organisation receives funding under the biodiversity grant.

You will be asked to declare, as part of your application, any perceived or existing conflicts of interests or that, to the best of your knowledge, there is no conflict of interest.

If you later identify that there is an actual, apparent or potential conflict of interest or that one might arise in relation to a grant application, you must inform the Secretariat in writing immediately. Committee members and other officials must also declare any conflicts of interest.

Annexes

Annex 1 – Topic map

BRIN-KONEKSI Joint Call

Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024

The following topic map identifies priority topics for the Government of Indonesia on the issue of bioeconomy. Only those topics which fall within these categories will be eligible. The research focus provides examples of the type of research that will be funded. Close alignment with the example research focus is recommended.

The Secretariat welcomes research project applications in the following areas:

Topic	Example of research focus
Biodiversity utilisation for food	<ul style="list-style-type: none">• Research to identify and develop technology and practices for deriving marine products for development as sustainable food resources and assessing the impacts and mechanism or resources use on communities and ecosystems• Research to identify and develop sustainable technology for processing potential marine biodiversity for food• Research to identify and develop technology for sustainable food packaging, storage and distribution using materials from marine biodiversity• Research to identify and develop ways for optimisation technologies and data to support food security and resilience through utilisation of marine biodiversity
Biodiversity utilisation for health	<ul style="list-style-type: none">• Research to identify, explore and develop potential compounds in marine biota for pharmaceutical development and sustainable impacts on communities and ecosystems• Research to identify, explore and utilise marine biodiversity for vaccine development and treating a range of illness, including infectious disease, cancer and degenerative disease
Biodiversity utilisation for energy	<ul style="list-style-type: none">• Research to identify, explore and utilise marine biota (microalgae, macroalgae, plankton, phytoplankton) to produce biofuels (biodiesel and bioethanol), biogas, hydrogen and marine bioremediation with sustainable impacts on communities and ecosystems• Research for monitoring and surveillance technologies to test the viability of renewable energy derived from marine biodiversity in rural and remote areas

Annex 2 – Technology Readiness Level.¹⁵

TRL 1	Basic Research. Initial scientific research has been conducted and reported. Principles are qualitatively postulated and observed. Focus is on new discovery rather than applications. Note: The present collaborative grant scheme does not fund this.
TRL 2	Basic Research. Concept formulation and/or formulation application. Initial practical applications are identified. Potential of material or process to solve a problem, satisfy a need or find an application is confirmed. Note: The present collaborative grant scheme does not fund this.
TRL 3	Basic Research. Critical Function or Proof of Concept Established. Applied research advances and early-stage development begins. Studies and laboratory measurements validate analytical predictions of separate elements of the technology. Note: The present collaborative grant scheme does not fund this.
TRL 4	Applied Research. Lab testing/validation of alpha prototype component/process: design, development and lab testing of components/processes. Results provide evidence that performance targets may be attainable based on projected or modelled systems.
TRL 5	Applied Research. Validation process of component and/or subsystem is achieved in a relevant environment.
TRL 6	Applied Research. System/process prototype demonstration in an operational environment (beta prototype system level).
TRL 7	Developmental Research. Prototype system verified: system/process prototype demonstration in an operational environment (beta prototype system level).
TRL 8	Developmental Research. System incorporated in commercial design: actual system/process completed and qualified through test and demonstration (pre-commercial demonstration).
TRL 9	Developmental Research. System proven and ready for full commercial deployment: actual system proven through successful operations in operating environment and ready for full commercial deployment.

¹⁵ Ministerial Regulations of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 42 of 2016 concerning on Measurement and Establishment of Technology Readiness Level

Annex 3 – Due diligence assessment

Both Principal Organisations (Australian **and** Indonesian) are required to submit this due diligence assessment at Stage 2 (full proposal)

Disclaimer:

If your organisation is an Australian Education Institution, Indonesian Universities (recognised and registered by Indonesian Ministry of Education, Culture, Research, and Technology), and Indonesian government agencies, you are exempt from the Secretariat’s due diligence process. To confirm your organisation’s status as an Australian Education Institution, Indonesian Universities (recognised and registered by Indonesian Ministry of Education, Culture, Research, and Technology), and Indonesian government agencies please mark the checkbox provided below, complete only Indicator Number 1 to ensure your organisation/institution is registered in the Australian Register of Higher Education Providers and sign the certification section at the bottom of this form.

Principal Organisation’s legal name:	
Partner Organisation(s):	
Research title:	
Grant period:	
Research location:	

Our organisation/institution is registered with the Indonesian and Australian legal and policy compliance standards and accountability mechanisms.

No.	Indicator	Applicant response Please provide detailed and comprehensive responses for each indicator. This will enable the Secretariat to thoroughly assess your organisational capacity to manage grants and give us confidence regarding any risks associated with partnering with your organisation. If you provide a simple 'Yes' or 'No' response without further explanation, it will be considered insufficient, and the Secretariat may view your organisation as posing a high risk for partnership.	Evidence/supporting documents Please provide supporting documentation or a link to the information to substantiate your responses.
1	<p>Organisation legal registration</p> <p>The Secretariat requires this to verify the legitimacy of the Applicant. If your organisation/institution is an Australian education institution, please confirm it is registered in the National Register Tertiary Education Quality and Standards Agency (teqsa.gov.au).</p>		<p>a. Institution registration from relevant government/accreditation body(ies).</p> <p>b. If the organisation operates in Australia, registration information such as Australian Business Number (ABN), Australian Company Number (ACN), Indigenous Corporation Number (ICN), or Australian Charities and Not-for-profits registration details.</p> <p>c. Tax registration number.</p>
2	<p>Physical address and an official website</p> <p>The Secretariat requires the establishment of the Applicant's existence by obtaining its physical address and the official website that serves as the primary source of information about the organisation. This enables the Secretariat to assess the alignment of the organisation with the Secretariat's objectives and gain insights into the organisation's transparency and commitment to public engagement.</p>		<p>a. Current physical address</p> <p>b. Official website</p>
3	<p>Organisation's experience</p> <ul style="list-style-type: none"> • Any recent and relevant performance information (e.g. external or independent evaluations and reviews or professional referees). • List of recent activities or projects that demonstrate partnerships and collaborations with other organisations or details of sub-granting arrangements. 		<p>a. Independent evaluation reports or letter of reference from previous activities. This letter should verify previous work or grants undertaken.</p> <p>b. List of activities or links to publications from previous projects.</p>

4	<p>Relevant organisation policy documents and applications</p> <p>The Secretariat is required to ensure that grant funds are provided to organisations which demonstrate strong governance, ethical conduct and a commitment to preventing fraud and corruption that aligns with DFAT and BRIN’s mission and values.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Does the organisation have the following documents in place: General Administrative Policy, Accounting and Financial Policy, Procurement Policy, Code of Conduct, Fraud Control Policy, Anti-Corruption Bribery Policy and Conflict of Interest Policy? • Does senior leadership, including the board, demonstrate commitment to these policies through consistent adherence and promotion? • Are these policy documents easily accessible to all employees? • Are these policy documents regularly reviewed and updated to ensure clarity and relevance? • Do employees, including board members, acknowledge their understanding of and commitment to complying with these policies? • Does the organisation conduct regular training sessions and orientation programs to ensure that employees understand these policies? • Does the organisation send regular reminders and updates about these policies to employees to keep them informed? 		<ul style="list-style-type: none"> a. Copy of or link to the relevant policies or business process SOPs. b. Copy of or link to the acknowledgement or consent forms from employees and board members indicating their commitment to policy compliance. c. Copy or link to the training materials and content (evidence that trainings were conducted).
5	<p>Audit arrangements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is the organisation subject to audit, and how often? • Who conducted the audits and what were the audit outcomes for the last 3 years? • How does the management of the organisation follow audit findings? 		<ul style="list-style-type: none"> a. Copy of or link to financial audit reports for the last 3 years

6	<p>Financial management practices</p> <ul style="list-style-type: none"> • Who prepares, reviews and approves the budget? • How is the budget used to support planning, performance assessment/monitoring and decision making? • Who has the authority to issue payments? • Who performs the bookkeeping and accounting and who reviews their work? • Are the accounting and finance function shared with others? • How does the organisation make payments (cash, bank transfer etc.)? • Do you use a computerised accounting system to record financial transactions and generate statements? • How are accounting and financial documents stored and secured and for how long are they retained? 		<p>a. Copy or link to relevant policies or business process SOPs related to financial management practices.</p>
7	<p>Fraud and corruption</p> <ul style="list-style-type: none"> • If applicable, details of current or recent (last 2 years) fraud or corruption related investigations by external parties on the organisation or related entities • Does the organisation sign a statement to express commitment and accept responsibility for not allowing fraud or corruption? • Does the organisation provide training and awareness programs on fraud and corruption prevention? • Does the organisation have a whistleblower protection mechanism? 		<p>a. Identify any previous case of fraud and corruption and its resolution (if any). b. Copy or link to the anti-fraud policies and procedures.</p>
8	<p>Integrity systems</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do you have robust ethics policies in place? • Are conflict of interest mechanisms established? • Is financial transparency maintained to ensure openness and accountability? • Are internal controls and governance practices regularly evaluated? 		<p>a. Copy of the organisation's written code of conduct and ethics policies. b. Documentation of conflict-of-interest disclosure procedures. c. Documentation of any public financial disclosures or reports. d. Documentation of corrective actions taken in response to audit findings.</p>

9	<p>Proscribed list check and risk management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirm that the organisation is not on any government sanction lists. • Confirm that the organisation does not engage with individuals or entities involved in illegal activities or terrorism. • How does the organisation check the CV integrity of prospective employees, contractors or project partners? • Does the organisation use criminal history checks to screen prospective employees, contractors or project partners? If so, under what circumstances? 		<p>a. https://www.nationalsecurity.gov.au/what-australia-is-doing/terrorist-organisations/listed-terrorist-organisations</p> <p>b. https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list</p>
10	<p>Prevention of Sexual Exploitation and Harassment (PSEAH) & Child Protection Policy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Does the organisation have a PSEAH & Child Protection policy and manual? • Does the organisation have a PSEAH & Child Protection risk assessment policy, system or practice? • Does the organisation have evidence of PSEAH & Child Protection training for its staff? 		<p>a. Include any relevant policy or SOPs on PSEAH and Child Protection.</p>

Certification

I hereby certify that the information provided in this form is true and correct to the best of my knowledge. On behalf of the organisation, I also acknowledge that any deliberate dishonesty may result in the rejection of this application or the immediate termination of the grant.

Signature:

Name:

Title:

Date:

Annex 4 – BRIN-KONEKSI Joint Call Expression of Interest template

Applicants must use the KONEKSI MISI system to enter the information detailed below.

Call for Proposals: Indonesia’s Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024

INSTRUCTIONS

1. The Principal Organisation is required to complete all sections of this application on the KONEKSI Management Information System (KONEKSI MISI) and submit before the deadline
2. Please avoid use of acronyms, quotation marks and upper-case characters, apart from KONEKSI, BRIN, GEDSI, K2P and K2I

If you have any technical difficulties filling out this form, please contact: cfpjointcallbrin@KONEKSI-kpp.id.

Part 1: Application details

Project title	<<Insert Text – this may be edited for Stage 2 applications>>
Field of Research (FoR) Code Select up to two FoR codes that relate to your proposal	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Activity start & end date	Projected Start: Projected End:
Total funding request proposed (AUD)	

Part 2: Project categories

Please nominate your desired project streams.

Nominate your proposed impact path:

Proposed impact	Please select one
Policy	
Technology	

Nominate your level of GEDSI engagement:

Proposed GEDSI engagement	Please select one
GEDSI mainstream	
GEDSI specific	

Nominate your project funding category:

Proposed funding category	Please select one
Growing (up to AUD400,000)	
Flourishing (up to AUD500,000)	

Part 3: Partnership eligibility

Your partnership must have at least one Australian and one Indonesian organisation.

Principal Organisations

Australian Principal Organisation	
Name of organisation	<<Insert name of organisation>>
Type of organisation	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal entity status	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal registration number (Australian Business Number)	
Address of organisation	<<Insert address of organisation>> State Country
Website of organisation	<<Insert organisation website>>
Name of contact person from the Principal Organisation	<<Insert name of contact person from the Principal Organisation>>
Email of the contact person	<<Insert email address of contact person>>
Mobile phone/WhatsApp number of the contact person – optional	<<Insert mobile phone/WhatsApp number of contact person>> – optional

Indonesian Principal Organisation	
Name of organisation	<<Insert Name of Organisation>>
Type of organisation	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal entity status	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal registration number (Indonesian institutional registration number)	
Address of organisation	<<Insert address of organisation>> Province Country
Website of organisation	<<Insert organisation website>>
Name of contact person from the Principal Organisation	<<Insert name of contact person from the Principal Organisation>>
Email of the contact person	<<Insert email address of contact person>>

Mobile phone/WhatsApp number of the contact person – optional	<<Insert mobile phone/WhatsApp number of contact person>> – optional
---	--

Partner Organisation(s)

To be eligible, you must nominate at least one Australian and one Indonesian partner. Stage 2 full grant applications should include a comprehensive list of all Partner Organisations involved in the project. Beyond the second Partner Organisation, we invite you to add any known and potential additional partners at the EoI stage.

Proposed Partner Organisation(s) to be involved	
Name of organisation (1)	<<Insert name of organisation>>
Type of organisation	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal entity status	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal registration number (Indonesian institutional registration number, Australian Business Number)	
Name, email and mobile phone/WhatsApp number of contact person in Partner Organisation 2	<<Insert name, email, and mobile phone/WhatsApp number of contact person in Partner Organisation 1>> <i>This contact should</i>
Name of organisation (2)	<<Insert name of organisation>>
Type of organisation	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal entity status	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal registration number (Indonesian institutional registration number, Australian Business Number)	
Name, email and mobile phone/WhatsApp number of contact person in Partner Organisation 2	<<Insert name, email, and mobile phone/WhatsApp number of contact person in Partner Organisation 2>>
Name of organisation (3)	<<Insert name of organisation>>
Type of organisation	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal entity status	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal registration number (Indonesian institutional registration number, Australian Business Number)	

Name, email, and mobile phone/WhatsApp number of contact person in Partner Organisation 3	<<Insert name, email, and mobile phone/WhatsApp number of contact person in Partner Organisation 3>>
Option to add more Partner Organisation(s)	

Part 4: Proposed research & approach

Nominate topic(s)

Choose relevant theme and topic (See [Annex 1 – Topic Map](#)):

Theme	Sector	Please select topic(s) from dropdown menu (can be more than one)
Marine biodiversity	Health	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
	Food	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
	Energy	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)

Project Concept

Describe your chosen topic and approach as per the EoI assessment criteria. Provide a Project Concept statement of no more than 300 words with a summary of the proposed research, including objective(s), methods, anticipated outputs and outcomes.

Projected title: (Please re-provide here. This will not be part of the word limit)

<<Insert text>>

GEDSI responsiveness

Select one or more categories and the degree to which your project impacts the following categories (see section [6.3 GEDSI in research](#) or click the marker description icon).

Disability Inclusion Marker	Select one or more categories (see KONEKSI MISI)
Gender Equality Marker	Select one or more categories (see KONEKSI MISI)
Social Inclusion Marker	Select one or more categories (see KONEKSI MISI)

Describe your chosen approach to GEDSI (with regard to your selection of ‘mainstream’ or ‘specific’ approach). Please do not exceed 200 words and aim to summarise GEDSI analysis, objectives, methods, outputs and outcomes. (We accept that there may be overlap from your answer in the Project Concept section above).

<<Insert text>>

Proposed impact strategy

Outline your proposed strategy to generate impact, in relation to the intended benefit and impact of the project. Refer to the funding types in the Guidelines (see section [5.1 Grant and project types](#)). Please do not exceed 200 words.

<<Insert text>>

Annex 5 – BRIN-KONEKSI Joint Call for Proposals: Indonesia’s Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024 technical proposal template

INSTRUCTIONS

1. All applicants are required to complete all sections of this application form and submit this application form by the deadline.
2. There are some pre-populated sections from your Expression of Interest application. Please review and edit them accordingly.
3. Please avoid use of acronyms, quotation marks and upper-case characters, apart from KONEKSI, BRIN, GEDSI, K2P and K2I.
4. By signing and submitting this application, the applicant attests to the Anti-Terrorism Certification (Part 8).
5. Fill out the form in the field identified with <<text>> (add as necessary).

If you have any technical difficulties filling out this form, please contact: cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id.

Part 1: Application details

Project title	<<Insert text>>
Field of Research (FoR) code	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Activity start & end date	Projected start: Projected end:
Total funding request proposed (AUD)	

Part 2: Project categories

Please nominate your desired project streams.

Nominate your proposed impact path:

Proposed impact	Please select one
Policy	
Technology	

Nominate your level of GEDSI engagement:

Proposed GEDSI engagement	Please select one
GEDSI mainstream	
GEDSI specific	

Nominate your project funding category:

Proposed funding category	Please select one
Growing	
Flourishing	

Part 3: Partnership eligibility

Your partnership must have at least one Australian and one Indonesian organisation.

Principal Organisation

Australian Principal Organisation	
Name of organisation	<<Insert name of organisation>>
Type of organisation	(Dropdown menu: see KONEKSI MISI)
Legal entity status	(Dropdown menu: see KONEKSI MISI)
Legal registration number (Australian Business Number)	
Address of organisation	<<Insert address of organisation>> State Country
Website of organisation	<<Insert organisation website>>
Name of contact person from the Principal Organisation	<<Insert name of contact person from the Principal Organisation>>
Email of the contact person	<<Insert email address of contact person>>
Mobile phone/WhatsApp number of the contact person – optional	<<Insert mobile phone/WhatsApp number of contact person>> – optional
Name of the Principal Investigator	<<Insert name of the Principal Investigator>>
Email of the Principal Investigator	<<Insert email address of the Principal Investigator>>
Mobile phone/WhatsApp number of the Principal Investigator	<<Insert mobile phone/WhatsApp number of the Principal Investigator>>

Indonesian Principal Organisation	
Name of organisation	<<Insert name of organisation>>
Type of organisation	(Dropdown menu: see KONEKSI MISI)
Legal entity status	(Dropdown menu: see KONEKSI MISI)
Legal registration number (Indonesian institutional registration number)	
Address of organisation	<<Insert address of organisation>> Province Country

Website of organisation	<<Insert organisation website>>
Name of contact person from the Principal Organisation	<<Insert name of contact person from the Principal Organisation
Email of the contact person	<<Insert email address of contact person>>
Mobile phone/WhatsApp number of the contact person – optional	<<Insert mobile phone/WhatsApp number of contact person>> – optional
Name of the Principal Investigator	<<Insert name of the Principal Investigator
Email of the Principal Investigator	<<Insert email address of the Principal Investigator>>
Mobile phone/WhatsApp number of the Principal Investigator	<<Insert mobile phone/WhatsApp number of the Principal Investigator>>

Partner Organisation(s)

To be eligible, you must nominate at least one Australian and one Indonesian partner. Stage 2 full grant applications should include a comprehensive list of all Partner Organisations involved in the project. Beyond the second Partner Organisation, we invite you to add any known and potential additional partners at this EoI stage.

Proposed Partner Organisation(s) to be involved	
Name of organisation (1)	<<Insert name of organisation>>
Type of organisation	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal entity status	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal registration number (Indonesian institutional registration number, Australian Business Number)	
Name, email and mobile phone/WhatsApp number of contact person in Partner Organisation 1	<<Insert name, email and mobile phone/WhatsApp number of contact person in Partner Organisation 1>>
Name of organisation (2)	<<Insert name of organisation>>
Type of organisation	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal entity status	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal registration number (Indonesian institutional registration number, Australian Business Number)	
Name, email and mobile phone/WhatsApp number of contact person in Partner Organisation 2	<<Insert name, email and mobile phone/WhatsApp number of contact person in Partner Organisation 2>>

Name of organisation (3)	<<Insert name of organisation>>
Type of organisation	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal entity status	Dropdown menu (see KONEKSI MISI)
Legal registration number (Indonesian institutional registration number, Australian Business Number)	
Name, email, and mobile phone/WhatsApp number of contact person in Partner Organisation 3	<<Insert name, email and mobile phone/WhatsApp number of contact person in Partner Organisation 3>>
Options to add more Partner Organisation(s)	

Part 4: Proposed research & approach

Nominate topic(s)

Theme	Sector	Please select topic(s) from dropdown menu (can be more than one)
Marine biodiversity	Health	(Dropdown menu: see KONEKSI MISI)
	Food	(Dropdown menu: see KONEKSI MISI)
	Energy	(Dropdown menu: see KONEKSI MISI)

Project Concept and approach

Confirm the Project Concept statement of no more than 300 words with a summary of the proposed research, including objective(s), methods, anticipated outputs and outcomes.

Projected title: (Please re-provide here. This will not be part of the word count.)

<<Insert text>>

Resources, budget and achievability

In no more than 300 words, describe the adequacy and appropriateness of the proposed resources in your budget.

<<Insert text>>

Feasibility statement

In no more than 100 words, please indicate why you believe your proposed research and impact is achievable within the proposed budget and timeline.

<<Insert text>>

Proposed partnership
Partnership suitability

In no more than 200 words, describe why your organisation and partners are best suited for the proposed project and committed to BRIN-KONEKSI equity principles.

<<Insert text>>

Partnership potential

In no more than 200 words, describe how your proposed partnerships will create innovative forms of knowledge and potential for local benefit.

<<Insert text>>

Impact strategy

Describe your research impact goals as per your intended impact path

In no more than 200 words, provide a statement outlining your strategy to achieve the intended benefit and impact of the project. See section [5 Funding categories](#) (Seeding, Growing, or Flourishing)

<<Insert text>>

Stakeholder plan

In no more than 200 words, provide a statement outlining your plan to engage appropriate stakeholders to achieve your impact strategy. 'Stakeholders' refers to a group of actors who are not listed as partners on your proposal but nonetheless play a critical role in ensuring that your project has maximum impact throughout your project cycle. Applicants should articulate a plan to identify the most appropriate and relevant groups of actors who will be engaged, understand and assist your project to achieve impact.

<<Insert text>>

Implementation capacity for impact

In no more than 200 words, provide a statement outlining each institutional partner's roles and responsibilities to achieve impactful implementation.

<<Insert text>>

GEDSI responsiveness

Confirm the categories and the degree to which your project impacts on the following categories (see section [6.3 GEDSI in research](#)) or click the marker description icon on the KONEKSI MISI.

GEDSI-responsive research design and goals

In no more than 200 words, identify the ways in which the project will address inequalities and advance GEDSI. We accept that there may be some duplication from the section of Project Concept and approach. (relating to your GEDSI marker).

<<Insert text>>

GEDSI-responsive methods and processes

In no more than 200 words, identify the project's level of engagement with GEDSI groups through different stages of the research, including consideration for co-design and consultation.

<<Insert text>>

GEDSI-responsive outcomes and impact strategies

In no more than 200 words, identify relevant proposed outputs and outcomes of the research

<<Insert text>>

Part 5: Industry Partner letter of commitment

Please upload a commitment letter from the Industry Partner (to take part in the research project) to the KONEKSI MISI.

Part 6: Activity plan

Please download the template provided to submit the activity plan and upload to the KONEKSI MISI.

Part 7: Due diligence

Please complete the Due Diligence Assessment online (Australian universities are exempted from completing this form *by confirming and certifying their institution status*).

Part 8: Budget

Please download the template provided to submit the proposed budget and upload to the KONEKSI MISI.

Supporting document(s) for the budget should be kept in the applicant's own online storage and BRIN-KONEKSI should be provided with a link to access them. BRIN-KONEKSI will ask applicants to submit supporting documents for the financial proposal. Applicants are welcomed to submit the supporting document early.

Part 9: BRIN-KONEKSI Joint Call Public Statement

In no more than 100 words, provide a plain language statement that demonstrates how the proposed activity can be of value to supporting equitable collaborative research partnerships between Australia and Indonesia. Write your statement clearly and in plain language. This statement will be used on the BRIN-KONEKSI website if your application is successful.

<<Insert text>>

Part 10: Certification

1. **The applicant, to the best of its current knowledge** did not provide, within the previous 10 years, and will take all reasonable steps to ensure that it does not and will not knowingly provide, material support or resources to any individual or entity that commits, attempts to commit, advocates, facilitates or participates in terrorist acts, or has committed, attempted to commit, facilitated or participated in terrorist acts, as that term is defined in Paragraph 3 below.
2. The applicant must use its best endeavours to ensure that funds provided under the contract do not provide direct or in-direct support or resources to organisations associated with terrorism. If, during the contract, the Applicant discovers any link whatsoever with any organisation or individual associated with terrorism it must inform BRIN-KONEKSI immediately. A full list of listed persons and entities is available from DFAT at <https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list>. A list of listed 'terrorist organisations' is available from National Security Australia at: www.nationalsecurity.gov.au.
3. **The following steps may enable the applicant to comply with its obligations under Paragraph 1:**
 - a) Before providing any material support or resources to an individual or entity, the applicant also will verify that the individual or entity has not been designated by the United Nations Security (UNSC) sanctions committee established under UNSC Resolution 1267 (1999) (the 1267 Committee) [individuals and entities linked to the Taliban, Osama bin Laden, or the Al Qaida Organisation]. To determine whether there has been a published designation of an individual or entity by the 1267 Committee, the recipient should refer to the consolidated list available online at the Committee's website: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>
 - b) Before providing any material support or resources to an individual or entity, the applicant will consider all information about that individual or entity of which it is aware and all public information that is reasonably available to it or of which it should be aware.
 - c) The applicant also will implement reasonable monitoring and oversight procedures to safeguard against assistance being diverted to support terrorist activity.

4. For purposes of this Certification:

- a) 'Material support and resources' means currency or monetary instruments or financial securities, financial services, lodging, training, expert advice or assistance, safe-houses, false documentation or identification, communications equipment, facilities, weapons, lethal substances, explosives, personnel, transportation and other physical assets, except medicine or religious materials
- b) 'Terrorist act' means: an act prohibited pursuant to one of the 12 United Nations Conventions and Protocols related to terrorism (see the United Nations terrorism conventions website: <http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp>)
- an act of premeditated, politically motivated violence perpetrated against non-combatant targets by sub-national groups or clandestine agents
 - any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organisation to do or to abstain from doing any act.
- c) 'Entity' means a partnership, association, corporation or other organisation, group or subgroup.
- d) The applicant's obligations under Paragraph 1 above are not applicable to the procurement of goods and/or services by the applicant that are acquired in the ordinary course of business through contract or purchase, e.g. utilities, rents, office supplies, gasoline etc., unless the applicant has reason to believe that a vendor or supplier of such goods and services commits, attempts to commit, advocates, facilitates or participates in terrorist acts, or has committed, attempted to commit, facilitated or participated in terrorist acts.
5. On behalf of the applicant organisation, I understand and acknowledge that this concept note's submission does not guarantee any funding or technical support from the BRIN-KONEKSI Joint Call. The solutions proposed do not contravene the intellectual property or other rights of any other organisation.

Organisation: <<Insert text>>	Date: <<Insert text>>
Name of authorised personnel: <<Insert text>>	Signature:

Annex 6 – Partnership health check

The partnership health check is conducted twice in one grant: after the grant agreement is signed, and at the end of the grant period. All partners are expected to conduct the health check. The information is used by the Secretariat to chart changes and provide evidence of changes in partnerships which contribute to the KONEKSI end of program goal of increased mutual understanding.

Partnership 'good health' indicators			
1. Context			
Partners understand the research and policy context of the proposed project.			
Partners are aware of prior projects in this area, and the Knowledge-to-Policy/Knowledge-to-Innovation gap in this area.			
Partners have identified and familiarised themselves with key literature on their project.			
Partners are aware of any significant challenges facing the project (if challenges exist, please list and discuss in your team).			
2. Goals and objectives			
The partnership's goals are well articulated internally and externally.			
Partners are motivated and inspired towards a common goal.			
Objectives are mutually agreed upon by partners.			
The partnership maintains relevance and stays on track to achieve its goals and objectives.			
The partnership is doing what it set out to do.			
3. Relationships			
Partners understand each other's points of view or interests and are clear about each other's motivations.			
There is trust in the partnership.			
Partners can rely on each other to complete agreed tasks.			
Partners offer to help each other and collectively solve problems.			
Partner roles are clearly defined within the team.			
Partners feel empowered and enabled in the project.			
Partners are able to learn from each other and share best practices openly.			

Partners have considered their own positionality in the team, and how it might affect the project.			
Partners have considered their own unconscious bias(es), and how it might affect the project.			
4. Resources – the partnership has sufficient access to:			
General skills, e.g. communication and organisational skills			
Technical skills to complete the project			
Knowledge and skills on the role of GEDSI in research			
Knowledge and skills in Knowledge-to-Innovation			
Knowledge and skills in Knowledge-to-Policy			
Partnering and other relevant experience			
Important networks or spheres of influence			
Facilities, e.g. office and meeting space, equipment			
Financial or other resources			
5. Work processes			
Project deliverables and timeframes are clear.			
Individuals take responsibility for their deliverables.			
Process for receiving/distributing funding is effective.			
Communication and documentation processes are effective.			
Monitoring and reporting process is effective, and partners have an equal say in its design and implementation.			
There is clarity around project objectives at the start of the process and beyond.			
Communication of all kinds is sufficiently frequent.			
Information is accessible and translation of materials provided where necessary.			
Partners are transparent about their assumptions, goals, needs, drivers and constraints.			
Partners are regularly and consistently present at meetings.			
Adequate records are kept of team meetings and documentation supports partners in making decisions.			

Annex 7 – Acronyms

AI	Artificial Intelligence
ABN	Australian Business Number
ACN	Australian Company Number
BAPPENAS	National Development Planning Agency (Indonesia)
BRIN	National Innovation and Research Agency (Indonesia)
CfP	Call for Proposals
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade (Australia)
EoI	Expression of Interest
EOIO	End of Investment Outcomes
FAA	Fixed Amount Award
GoI	Government of Indonesia
GEDSI	Gender Equality, Disability and Social Inclusion
GST	Goods and Services Tax
ICN	Indigenous Corporation Number
Kemendikbudristek	Ministry of Education Culture Research and Technology (Indonesia)
KONEKSI	<i>Kolaborasi Pengetahuan, Inovasi, dan Teknologi</i> or Knowledge, Innovation, and Technology Collaboration, also known as the Knowledge Partnership Platform, KPP). The English translation is 'connection'.
K2I	Knowledge-to-Innovation
K2P	Knowledge-to-Policy
MISI	KONEKSI Management Information System
ODA	Official Development Assistance
TRL	Technology Readiness Level
WIB	Western Indonesia Time



Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024

The BRIN-KONEKSI Joint Call is a special initiative designed to forge research partnerships that generate knowledge to support policy and innovation. This initiative will be jointly delivered by Australia and Indonesia. The purpose is to support partnerships between Australian and Indonesian knowledge organisations to carry out and disseminate high-quality, multidisciplinary applied research that responds to the priorities of the Indonesian Government.

BRIN-KONEKSI

Joint Call for Proposals

The objectives of **CfP Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024** are to:



Explore technology and practices to enhance and ensure the sustainability of the biodiversity of marine resources in relation to food, health, and energy



Understand approaches to and impacts of utilisation and how to ensure sustainable benefits for all



Identify, explore, and develop the sustainable utilisation of marine biodiversity, including research and technology



Understand, guide, and direct the local and national policies, regulations and strategies required to effectively manage and distribute the benefits from marine biodiversity utilisation

In this grant round – CfP Indonesia’s Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024 – KONEKSI and BRIN are interested in funding research on technologies, practices and products that utilise marine biodiversity and systems sustainably. KONEKSI and BRIN welcome research proposals on the three focus area of marine biodiversity and sustainability in the food, health, and energy sectors.

The **CfP Indonesia’s Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024** will not support:

Research that does not involve collaboration between Australia and Indonesia



Research that is not applied research with clear impact and outcomes



Research that is based outside of either Australia or Indonesia



Research that focuses solely on Biodiversity, without consideration of Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) in the research process and outcomes



Stage 1

IMPORTANT DATES

Expression of Interest (Eoi)
Opening Date

21 June 2024

Expression of Interest (Eoi)
Closing Date

12 July 2024

IMPORTANT DATES

Stage 2

Grant applications
Opening Date

16 August 2024

Closing date for
grant applications

13 September 2024

Expected grant start date: **December 2024**
Grant duration: **Up to 24 months (Up to 30 November 2026)**

See further information of BRIN-KONEKSI Joint Call for Proposals on bit.ly/BRINKONEKSIJointCall



BRIN-KONEKSI Panggilan Proposal Bersama Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan Pedoman Hibah

TAHAP 1 – Pernyataan Minat (Expression of Interest – EOI)

- Tanggal pembukaan EOI : 21 Juni 2024
- Pertanyaan terakhir tentang EOI diterima : 5 Juli 2024
- Tanggal penutupan EOI : 12 Juli 2024

TAHAP 2 – Panggilan Proposal/Permohonan Hibah :

- Tanggal pembukaan permohonan hibah : 16 Agustus 2024
- Pertanyaan terakhir tahap 2 diterima: 6 September 2024
- Tanggal penutupan permohonan hibah : 13 September 2024

Pertanyaan: Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan menghubungi Sekretariat, email:

cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id

Tanggal pedoman hibah dikeluarkan :	21 Juni 2024
Tanggal hibah diharapkan dimulai :	Desember 2024
Masa hibah :	Hingga 24 bulan (sampai 30 November 2026)
Jenis kesempatan hibah :	Bersaing terbuka

Daftar Isi

Bagan alur proses untuk BRIN-KONEKSI Joint Call	5
1. Latar belakang KONEKSI dan BRIN	8
1.1 Tentang KONEKSI.....	8
1.2. Tentang BRIN.....	8
1.3 Tentang BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama	9
1.4 Tentang dokumen ini.....	10
2. Tentang Panggilan Proposal Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati yang Berkelanjutan 2024.....	10
2.1. Tantangan dan peluang bioekonomi di Indonesia	11
2.2. Tujuan-Tujuan CfP: Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024.....	12
2.3. BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama – ambang batas pendanaan, kerangka waktu, dan biaya yang memenuhi syarat	13
3. Tentang Proses Permohonan Hibah	14
3.1. Gambaran umum proses permohonan	14
3.2 Proses seleksi hibah.....	14
3.3. Perkiraan waktu untuk proses permohonan	15
3.4. Persyaratan Bahasa dan Format.....	15
3.5. Pertanyaan selama proses permohonan.....	15
4. Persyaratan Kelayakan	16
4.1. Persyaratan kelayakan untuk permohonan	16
4.2 Entitas yang memenuhi persyaratan.....	16
4.3 Kegiatan hibah yang memenuhi persyaratan.....	17
4.3.1 Untuk apa saja dana hibah dapat digunakan	17
4.3.2. Untuk apa saja dana hibah tidak dapat digunakan	18
5. Kategori Pendanaan	19
5.1. Jenis hibah dan proyek	19
5.2. Pengalaman masa lampau dan bukti yang diharuskan	21
6. Mempersiapkan Permohonan Anda	22
6.1 Kemitraan	22
6.2 Rencana kemitraan.....	22
6.3. GEDSI dalam penelitian	23
6.3.1 Penanda GEDSI	23
6.3.2. Penanda Kesetaraan Gender.....	24
6.3.3. Penanda Inklusi Disabilitas	25

6.3.4. Penanda Inklusi Sosial	27
6.4. Penelitian yang Berdampak.....	28
6.5. Penggunaan kecerdasan buatan di dalam menyusun permohonan Anda	28
7. Tahap 1: Penilaian Pernyataan Minat (Eol)	29
7.1. Kriteria penilaian untuk Eol	29
7.2 Pengisian Eol	29
7.2.1. Membuat sebuah login.....	29
7.2.2. Mengakses bahan-bahan sumber	29
7.2.3. Memulai permohonan Anda	29
7.2.4. Mengundang tim peneliti Anda untuk menilai dan mengedit permohonan.....	30
7.2.5. Menyerahkan permohonan Anda	30
7.2.6. Siapa yang akan menilai Eol?.....	30
7.2.7. Notifikasi untuk Eol yang berhasil	30
8. Tahap 2: Proses Permohonan Hibah	30
8.1. Kriteria penilaian permohonan	30
8.2. Pengisian permohonan Tahap 2 Anda.....	32
8.3. Penilaian permohonan hibah	33
8.4. Siapa yang akan menyetujui hibah?	34
8.5. Pemberitahuan hasil Tahap 2 (permohonan hibah).....	34
9. Permohonan hibah yang berhasil.....	34
9.1. Perjanjian Hibah	34
9.2. Bagaimana hibah akan dibayarkan.....	35
9.3. Variasi perjanjian hibah.....	35
9.4. Pengumuman hibah publik.....	35
9.5. Umpan Balik	35
10. Mempersiapkan Mulainya Hibah Anda	35
10.1. Pemberian dalam Jumlah Tetap (<i>Fixed Amount Awards</i>).....	35
10.2. Melibatkan mitra	37
10.3. Asuransi ganti rugi.....	37
10.4. Gambaran Umum proses etika/perizinan	37
11. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan hibah	38
11.1. Tanggung Jawab Anda	38
11.2. Tanggung Jawab Sekretariat.....	38
11.3. Persyaratan Pelaporan dan Keluaran BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama.....	38
11.3.1. Laporan Perkembangan per Kuartal KONEKSI	39
11.3.2. Rencana Kemitraan KONEKSI	40

11.3.3. Pemeriksaan Kesehatan Kemitraan.....	40
11.3.4. Laporan Keuangan BRIN	40
11.3.5. Laporan Akhir Keuangan BRIN.....	40
11.3.6. Laporan Akhir BRIN.....	40
12. Kejujuran	41
12.1. Keluhan dan proses umpan balik pemohon	41
12.2. Konflik Kepentingan	41
Lampiran	43
Lampiran 1 – Peta Topik.....	43
Lampiran 2 – Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)29F	44
Lampiran 3 – Penilaian Uji Kelayakan.....	45
Lampiran 4 – Format Pernyataan Minat Hibah BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama.....	50
Lampiran 5 – BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama: Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024 Format Proposal Teknis .	55
Lampiran 6 – Pemeriksaan Kesehatan Kemitraan	63
Lampiran 7 – Akronim	65

Daftar Tabel


Tabel 1: Perkiraan waktu untuk proses permohonan	15
Tabel 2: Kategori Pendanaan – Jenis, tujuan dan dampak hibah dan proyek.....	19
Tabel 3: Kategori Pendanaan – pengalaman masa lampau dan bukti yang dipersyaratkan	21
Tabel 4: Kemitraan	22
Tabel 5: Empat Pilar Rencana Kemitraan	23
Tabel 6: Penanda Kesetaraan Gender	24
Tabel 7: Penanda Inklusi Disabilitas	26
Tabel 8: Penanda Inklusi Sosial.....	27
Tabel 9: Penilaian gambaran umum permohonan hibah	33
Tabel 10: Persyaratan pelaporan	39
Tabel 11: Contoh Umpan Balik Sekretariat	41








Bagan alur proses untuk BRIN-KONEKSI Joint Call



BRIN-KONEKSI *Joint Call* tema berjudul *Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024* dirancang untuk mendorong kemitraan pengetahuan dan kolaborasi internasional dalam penelitian untuk kebijakan dan teknologi.

Skema ini didanai, dirancang, dan dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Sebuah komite khusus yang terdiri dari seksi Pendanaan BRIN dan staff KONEKSI telah dibentuk untuk mengelola BRIN-KONEKSI Joint Call ini. Komite ini disebut sebagai BRIN-KONEKSI Sekretariat (Sekretariat)

	<p>Kesempatan hibah dibuka</p> <p>Pedoman akan diterbitkan di situs-situs Pendanaan BRIN dan KONEKSI berikut https://pendanaan-risnov.brin.go.id/ dan http://bit.ly/BRINKONEKSIJointCall.</p>	<p>21 Juni – 12 Juli 2024</p>
	<p>Membuat login untuk Sistem Informasi Manajemen KONEKSI (KONEKSI MISI)</p> <p>Pelamar Organisasi Utama Australia harus mendaftar melalui KONEKSI MISI untuk membuat akses login. Setelah terdaftar, Organisasi Utama Australia dapat menambahkan Organisasi Utama Indonesia dan mitra Indonesia mereka ke dalam MISI.</p> <p>Pelamar Organisasi Utama Indonesia harus membuat <i>log in</i> di situs Pendanaan BRIN yaitu https://pendanaan-risnov.brin.go.id/</p> <p>Sistem MISI KONEKSI dapat diakses dari baik situs KONEKSI mau pun situs Pendanaan BRIN pada tautan berikut http://bit.ly/BRINKONEKSIJointCall dan https://pendanaan-risnov.brin.go.id/.</p>	<p>21 Juni – 12 Juli 2024</p>
	<p>Akses ke material</p> <p>Sekretariat telah menyediakan beberapa video singkat yang menjelaskan aspek-aspek unit dari hibah BRIN-KONEKSI. Para pemohon harus mengakses video-video singkat ini sebelum memulai dengan permohonan mereka.</p>	<p>21 Juni – 12 Juli 2024</p>
<p>Tahap 1 Pernyataan Minat</p>		
	<p>Tahap 1 – Menyerahkan Pernyataan Minat yang menguraikan konsep Anda secara singkat</p> <p>Organisasi yang berminat menyusun dan menyerahkan sebuah Pernyataan Minat singkat hanya melalui sistem MISI KONEKSI. Di dalamnya secara singkat menguraikan topik penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penilaian. Lihat untuk contoh formulir Pernyataan Minat, untuk diisi secara daring di MISI KONEKSI. Pilihan topik untuk putaran ini dapat dilihat di Lampiran 1 – Peta Topik.</p>	<p>21 Juni – 12 Juli 2024</p>

	<p>Pertimbangan untuk Pernyataan Minat</p> <p>Sekretariat akan menilai semua Pernyataan Minat yang telah diserahkan berdasarkan kriteria penilaian</p>	12 Juli – 16 Agustus 2024
	<p>Sekretariat akan memberitahukan Anda akan hasilnya</p> <p>Para pemohon akan diberitahukan melalui email akan hasil dari permohonan Pernyataan Minat bersama daftar pendek dari para pemohon yang diundang untuk maju ke Tahap 2.</p> <p>Anda mungkin perlu memasukkan cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id dan dana-risnov@brin.go.id sebagai alamat yang dapat dipercaya di sistem email Anda.</p>	16 Agustus 2024
Tahap 2 – Permohonan lengkap		
	<p>Tahap 2 – Jika diundang maju ke Tahap 2, Anda dapat menyerahkan permohonan hibah yang lengkap melalui sistem KONEKSI MISI dan Pendanaan BRIN, dikembangkan dari Pernyataan Minat Anda, berdasarkan tenggat waktu yang diberikan.</p> <p>Lihat Lampiran 5</p>	16 Agustus – 13 September 2024
	<p>Sekretariat akan menilai dan membuat peringkat dari semua ponan hibah lengkap</p> <p>Berdasarkan penilaian komite ahli penelitian independen, Sekretariat akan menyusun daftar proposal-proposal dengan peringkat tinggi. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dinilai.</p>	Pertengahan September – Pertengahan Oktober 2024
	<p>Kajian Anggaran</p> <p>Para pemohon akan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang anggaran</p>	Oktober 2024
	<p>Keputusan mengenai seleksi penerima hibah</p> <p>Hasil dan rekomendasi penilaian hibah akan diusulkan ke Komite Teknis BRIN-DFAT untuk mendapatkan persetujuan. Komite ini terdiri dari para perwakilan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Jika tidak terdapat keberatan, kedua belah pemerintah akan menerima dan menyetujui pendanaan dan prioritas permohonan hibah yang berhasil.</p>	Oktober 2024
	<p>Pemberitahuan tentang hasil</p> <p>Sekretariat akan memberitahukan pemohon – Organisasi Utamanya – akan hasil permohonan mereka. Pemohon yang tidak berhasil akan diberitahukan setelah perjanjian hibah telah dijalankan oleh para pemohon yang berhasil.</p>	November 2024

Inisiasi proyek penelitian		
	<p>Sekretariat melakukan diskusi perjanjian hibah.</p> <p>Sekretariat akan melakukan perjanjian hibah dengan masing-masing organisasi utama yang berhasil. Termasuk di dalamnya diskusi akhir tentang anggaran, ketentuan-ketentuan IP, dan pencapaian proyek bersama dengan organisasi utama dari Australia dan Indonesia.</p> <p>KONEKSI akan menangani hibah untuk organisasi Australia, sementara BRIN yang akan menangani hibah untuk organisasi Indonesia.</p> <p>Ketentuan untuk masing-masing perjanjian dapat bervariasi berdasarkan sifat dari kegiatan dan risiko-risiko yang spesifik untuk setiap proyek.</p>	November 2024
	<p>Pelaksanaan hibah</p> <p>Penerima hibah melakukan kegiatan hibah seperti yang dijabarkan di dalam perjanjian hibahnya. Sekretariat akan bekerja bersama Organisasi Utama, memantau perkembangan dan melakukan pembayaran berdasarkan tonggak-tonggak hibah. Sekretariat akan berhubungan dengan Organisasi Utama di dalam mempertimbangkan bagaimana memaksimalkan keberhasilan proyek dalam hal kemitraan, GEDSI dan dampak.</p>	Dari Desember 2024

1. Latar belakang KONEKSI dan BRIN

1.1 Tentang KONEKSI

KONEKSI merupakan program unggulan Australia di sektor pengetahuan dan inovasi Indonesia. Melalui kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), investasi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) sebesar 50 juta dolar Australia untuk program bilateral selama 5 tahun (2023-2027) bertujuan untuk membina hubungan jangka panjang antara Australia dan Indonesia dengan memajukan penelitian di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama.

Tujuan program hibah KONEKSI adalah menyediakan pendanaan untuk penelitian dan inisiatif inovatif yang memperkuat hubungan penelitian dan kelembagaan Australia dengan Indonesia serta memperdalam pemahaman bersama dan kerja sama antara Australia dan Indonesia. Tujuan utama KONEKSI adalah berkontribusi pada hubungan jangka panjang antara Indonesia dan Australia yang memajukan kepentingan bersama serta mendukung pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan program ini adalah meningkatkan penggunaan solusi berbasis pengetahuan untuk kebijakan serta teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini menempatkan KONEKSI sebagai wadah untuk menghasilkan pengetahuan mengenai permasalahan sosio-ekonomi yang kompleks, di mana solusi efektif sering tidak terbatas pada sektor atau kategori pemangku kepentingan saja. KONEKSI mendukung siklus pengetahuan-ke-kebijakan (K2P) dan siklus pengetahuan-ke-inovasi (K2I), dengan cara yang saling melengkapi dan sinergis

Berdasarkan pengalaman, keahlian, dan hubungan yang ada serta mencerminkan kematangan hubungan bilateral Indonesia-Australia, KONEKSI berupaya mengembangkan pengetahuan yang relevan bagi kedua negara dan berkontribusi terhadap transisi perekonomian Indonesia dari ekonomi berbasis sumber daya ke ekonomi berbasis pengetahuan

KONEKSI berfokus pada dua Hasil Akhir Investasi (*End of Investment Outcomes – EOIOs*):

- Organisasi-organisasi Australia dan Indonesia telah meningkatkan kolaborasi dan saling mengerti melalui kemitraan pengetahuan; dan
- Solusi inovatif untuk kebijakan dan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan dihasilkan oleh kemitraan pengetahuan.

Informasi lebih lanjut mengenai program KONEKSI dapat dilihat di www.KONEKSI-kpp.id.

1.2. Tentang BRIN

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah sebuah lembaga pemerintah yang berfokus pada penelitian dan inovasi. Sebelumnya dikenal sebagai sebuah unit di dalam Kementerian Riset dan Teknologi, BRIN adalah sebuah penggabungan dari semua lembaga-lembaga penelitian nasional seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta beberapa unit kerja lainnya yang melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan riset dan teknologi pada kementerian-kementerian yang ada.

BRIN memiliki tiga fungsi utama:

1. Pendukung kebijakan: BRIN mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti – dan sains – bagi kementerian, instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Badan pendanaan: BRIN memiliki tugas memberikan pendanaan penelitian dan inovasi untuk memperkuat ekosistem penelitian dan inovasi nasional.
3. Badan pelaksana: BRIN terdiri dari 12 organisasi penelitian dan 85 pusat-pusat penelitian, yang memiliki tugas untuk menjalankan tugas-tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan pelaksanaan, serta juga penemuan dan inovasi.

BRIN memprioritaskan tiga program utama:

1. Memperkuat Manajemen Riset: BRIN bertujuan untuk menyelaraskan praktik manajemen riset dengan norma dan standar global untuk memastikan riset berkualitas tinggi.
2. Membangun Kapasitas Riset: meningkatkan keahlian riset, BRIN menekankan penguatan kualifikasi sumber daya manusia melalui keterlibatan yang signifikan dengan diaspora global dan kemitraan di dalam dan luar negeri.
3. Memperluas Infrastruktur Riset Nasional: BRIN berencana untuk berkembang menjadi penyedia infrastruktur riset nasional yang komprehensif, meliputi sumber daya manusia, perangkat akan berkembang untuk menjadi penyedia prasarana penelitian nasional (sumber datif ilmiah dan teknologi, yang dapat diakses oleh akademisi, mahasiswa, dan profesional industri).

Sebagai badan pendanaan, BRIN mengelola beberapa skema pendanaan, termasuk program kolaboratif melalui pendanaan bersama. Program ini bertujuan untuk mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan melalui penelitian dan kolaborasi, selaras dengan tujuan BRIN untuk mempromosikan keterlibatan dan kolaborasi global. Melalui program kolaboratif ini, BRIN memfokuskan kembali program penelitiannya untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam lokal serta keanekaragaman hayati, geografis, keragaman budaya. Tujuan utamanya adalah untuk menempatkan Indonesia sebagai pemimpin global dengan riset yang berfokus pada sumber daya alam dan ekosistem yang beragam.

1.3 Tentang BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama

BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama adalah inisiatif bersama yang dirancang untuk membangun kemitraan yang menghasilkan pengetahuan untuk kebijakan dan inovasi. Skema ini didanai, dirancang, dan diimplementasikan bersama sebagai inisiatif spesial untuk mendukung kemitraan antara institusi Australia dan Indonesia untuk melakukan dan menyebarkan penelitian terapan multidisiplin berkualitas tinggi tentang prioritas-prioritas Pemerintah Indonesia.

BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama menyediakan kesempatan bagi organisasi Australia dan Indonesia untuk melakukan penelitian kolaboratif selama dua tahun (2024-2026) dengan tema **Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024**. BRIN dan KONEKSI akan memberikan kesempatan bagi kemitraan untuk mengakses keahlian internasional, sumber daya, pelatihan, dan informasi relevan untuk mendukung dan memajukan kesetaraan dalam kemitraan.

Pemerintah Australia mendukung tema-tema penelitian untuk Joint Call yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia, sesuai dengan prioritas Pembangunan Jangka Panjang¹ dan Menengah Indonesia.

¹ Indonesia Emas 2045 - Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045.

1.4 Tentang dokumen ini

Dokumen ini menyediakan informasi dan pedoman tentang BRIN-KONEKSI Panggilan Proposal Bersama: Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024. Dokumen ini menjabarkan:

- Peta Topik Keanekaragaman Hayati Laut ([Lampiran 1](#))
- tujuan dari peluang hibah
- persyaratan kelayakan hibah
- proses penilaian dan kriteria hibah
- bagaimana permohonan hibah dimonitor dan dievaluasi; dan
- tanggung jawab dan pengharapan terhadap Organisasi Utama dan mitranya.

Anda harus membaca dokumen ini sebelum mengisi permohonan.

2. Tentang Panggilan Proposal Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati yang Berkelanjutan 2024

BRIN dan KONEKSI mencari permohonan dari kemitraan-kemitraan penelitian kolaboratif Australia-Indonesia untuk melakukan penelitian demi mendukung prioritas-prioritas tentang bioekonomi Indonesia,² khususnya keanekaragaman hayati laut yang memiliki potensi bagi ekonomi biru Indonesia yang berjaya di masa depan. Hal ini melibatkan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan sumber daya laut Indonesia serta memastikan manfaat dari penggunaan sumber daya alam dan ekosistem berkelanjutan yang didistribusikan secara adil.

Di dalam putaran Bioekonomi Indonesia ini, BRIN dan KONEKSI tertarik untuk mendanai penelitian tentang teknologi, praktik, kebijakan dan produk yang menggunakan keanekaragaman hayati dan sistem-sistem laut untuk memastikan keberlanjutan penggunaannya. BRIN dan KONEKSI menyambut proposal pada tiga (3) bidang fokus keanekaragaman hayati dan keberlanjutan laut dalam sektor pangan, kesehatan dan energi.

Ekonomi Biru dan Bioekonomi Indonesia

Indonesia menempatkan diri pada posisi yang strategis untuk memanfaatkan ekonomi biru, memanfaatkan potensi sumber daya lautnya yang sangat luas.³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Emas saat ini pemerintah Indonesia menyoroti prioritas swasembada pangan, energi, dan air.⁴ Bioteknologi kelautan menawarkan solusi untuk keamanan pangan, kesehatan lingkungan, kesejahteraan manusia, dan peningkatan industri, berkontribusi pada agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 2 tentang Pangan Secara Berkelanjutan, Tujuan 3 tentang Kesehatan dan Kesejahteraan, dan Tujuan 14 tentang Kehidupan di Bawah Air. Rencana berjenjang Indonesia untuk pengembangan ekonomi biru bertujuan untuk memastikan pertumbuhan yang komprehensif dan berkelanjutan menuju transformasi ekonomi biru menjadi mesin pertumbuhan baru untuk

² Bioekonomi adalah bidang ekonomi yang relatif baru. Tujuannya adalah memanfaatkan sumber daya biologis terbarukan dan mengubahnya menjadi produk berkelanjutan untuk tujuan industri, misalnya farmasi biologis, biosuplemen, dan biofuel.

³ Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia (2023), BAPPENAS.

⁴ Indonesia Emas 2045 - Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 and the Indonesian Government National Medium-Term Development Plan 2020-2024.

mempromosikan sektor-sektor baru seperti energi terbarukan, bioteknologi, riset, pendidikan, dan konservasi laut.⁵

Bioekonomi menjadi fokus utama dalam strategi ekonomi biru Indonesia. Dengan luasnya area laut dan beragamnya aset laut, Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh bioteknologi kelautan. Dengan memanfaatkan kemajuan dalam bioteknologi kelautan, Indonesia memiliki potensi untuk mengatasi tantangan-tantangan krusial terkait keamanan pangan, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia juga berpotensi mendapatkan manfaat dari pertumbuhan yang diproyeksikan dari pasar bioteknologi kelautan global, yang bernilai USD5,9 miliar pada tahun 2022, dan diperkirakan akan mencapai USD11,7 miliar pada tahun 2032.⁶ Dengan potensi ini, Indonesia sedang memosisikan diri sebagai pemimpin bioekonomi di kawasan Asia Tenggara. Melalui investasi strategis dan kolaborasi, Indonesia bertujuan untuk mengungkapkan potensi penuh sektor bioteknologi kelautannya, berkontribusi baik pada tujuan pembangunan nasional maupun upaya keberlanjutan global.

Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia

Indonesia terkenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut global, dengan hampir 2 juta kilometer persegi lautan dan lebih dari 17.000 pulau. Kekayaan keanekaragaman hayati negara ini didukung oleh ekosistem pesisir dan laut yang penting, termasuk terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun. Ekosistem-ekosistem ini memberikan dukungan esensial bagi sekitar 180 juta orang – yang mencakup sekitar 70% dari populasi Indonesia yang bergantung pada daerah pesisir untuk mata pencaharian dan kesejahteraan mereka.

Memastikan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan bermanfaat memerlukan investasi besar dalam riset. Hal ini termasuk memperoleh pengetahuan yang memadai tentang sumber daya keanekaragaman hayati Indonesia, mengurangi kerusakan ekosistem dan risiko kepunahan spesies, memaksimalkan manfaat keanekaragaman hayati, meningkatkan ilmu dan teknologi terkait pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati, serta memastikan bahwa manfaat dari pemanfaatan keanekaragaman hayati ini akan dinikmati oleh semua pihak. Untuk mencapai hal ini, penting untuk memahami potensi spesies, distribusi dan kelimpahannya, ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka, dan apakah mereka dikelola secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, riset dan inovasi memainkan peran penting.

2.1. Tantangan dan peluang bioekonomi di Indonesia

Peluang hibah ini dirancang untuk mendukung Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan Indonesia 2024 di tiga bidang sasaran:

- Pangan
- Kesehatan
- Energi

Topik dan bidang untuk permohonan proyek keanekaragaman hayati diperkenalkan lebih mendetail di dalam [Lampiran 1 – Peta Topik](#) untuk menyelaraskan penelitian Anda khususnya terhadap tujuan-tujuan undangan pendanaan ini yang secara khusus berfokus kepada **pengembangan kebijakan dan teknologi** dan **tujuan untuk memprioritaskan proyek-proyek yang menangani Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 4-9**.

⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah Indonesia 2020–2024.

⁶ Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia (2023), BAPPENAS.

Pangan

Ketahanan pangan dan gizi telah muncul menjadi sebuah permasalahan penting di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, khususnya karena populasi penduduk yang meningkat.⁷ Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menyoroti permasalahan tentang pangan yang memadai, aman, sehat, bergizi, beragam dan bisa diakses. Banyak komoditas penting masih diimpor untuk memenuhi permintaan domestik sehingga diperlukan penelitian tentang diversifikasi produk pangan dari keanekaragaman hayati lokal, khususnya keanekaragaman hayati laut, serta kemajuan dalam teknologi pengolahan dan kemasan pangan.

Kesehatan

Memperkuat ketahanan kesehatan merupakan agenda kunci bagi Indonesia.⁸ Komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya ini tercermin dalam Instruksi Presiden No. 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan di Sektor Kesehatan, yang menekankan perlunya swasembada dalam farmasi dan teknologi kesehatan. Penelitian tentang keanekaragaman hayati laut dapat memberikan sumber-sumber bahan baru, dan menghasilkan terobosan serta penemuan dalam meningkatkan ketahanan kesehatan.

Energi

Indonesia telah berkomitmen akan aspirasinya untuk emisi nol bersih⁹ pada saat yang sama dengan meningkatnya permintaan energi.¹⁰ Seiring dengan pertumbuhan penduduk, konsumsi energi untuk rumah tangga, transportasi, dan industri akan meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan secara berkelanjutan, Indonesia harus mempercepat pengembangan sumber daya laut seperti biofuel dan biogas akan menjadi kritis untuk memastikan bahwa Indonesia memperluas pilihan energinya dan memastikan keberlanjutan.

2.2. Tujuan-Tujuan CFP: Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024

Peluang hibah **CFP: Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024** berkeinginan untuk mendorong penelitian yang menjadi sumber informasi bagi pendekatan-pendekatan penggunaan keanekaragaman hayati laut yang inovatif, berkelanjutan, efisien, dan berkeadilan di Indonesia.

Tujuan dari **CFP: Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024** adalah untuk:

- mengeksplorasi teknologi dan praktik untuk meningkatkan dan memastikan keberlanjutan keanekaragaman hayati sumber daya-sumber daya laut terkait dengan pangan, kesehatan dan energi
- mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan mengembangkan penggunaan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan, termasuk penelitian untuk teknologinya
- memahami pendekatan dan dampak penggunaan serta bagaimana memastikan manfaat bagi semua
- memahami, membimbing dan mengarahkan kebijakan, peraturan dan strategi daerah dan nasional yang diperlukan untuk mengelola dan mendistribusikan secara efektif manfaat penggunaan keanekaragaman hayati laut.

⁷ Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan and Gizi (2019). Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian/ Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

⁸ Indonesia Emas 2045 - Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 (2024) BAPPENAS.

⁹ Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 (2022). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

¹⁰ Buku Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia (2023). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia

Hasil yang diinginkan dari **CfP: Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024** adalah:

- penelitian yang berkontribusi terhadap penggunaan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan
- penelitian untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari penggunaan keanekaragaman hayati laut
- penelitian dan pengembangan sumber daya-sumber daya baru untuk berkontribusi terhadap bioekonomi
- Pengembangan teknologi dan praktik-praktik baru yang akan memastikan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan

CfP: Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024 tidak akan mendukung:

- Penelitian yang tidak melibatkan kolaborasi antara Australia dan Indonesia
- Penelitian yang berbasis di luar Australia mau pun Indonesia
- Penelitian yang bukan penelitian terapan dengan hasil-hasil dampak yang jelas
- Penelitian yang hanya berfokus pada Keanekaragaman Hayati, tanpa mempertimbangkan Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Sosial (GEDSI) di dalam proses dan hasil penelitiannya.

2.3. BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama – ambang batas pendanaan, kerangka waktu, dan biaya yang memenuhi syarat

Total pendanaan yang tersedia untuk **CfP: Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024** adalah hingga 6.000.000 Dolar Australia atau 6 Miliar Rupiah, yang akan disalurkan ke sejumlah proyek penelitian terpilih yang bermutu tinggi, multidisiplin, dan beragam di lintas bidang prioritas keanekaragaman hayati laut.

Untuk **CfP: Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024** maksimum ambang batas pendanaan untuk satu proyek adalah hingga 400.000 AUD (*Bertumbuh/Growing*) dan 500.000 AUD (*Berbuah/Flourishing*) (**Catatan:** Jumlah total kini sudah termasuk pendanaan dari BRIN yang dibatasi hingga Rp. 1.000.000.000/ proyek / tahun untuk mitra Indonesia).

Sekretariat mendorong konsorsium untuk mengembangkan anggaran penelitian yang pantas berdasarkan tujuan dan kebutuhan penelitian. Anggaran penelitian akan dievaluasi berdasarkan prinsip *value for money* untuk kategori mana pun. Tahapan pembayaran masing-masing akan disepakati di awal selaras dengan tahap pencapaian dan diatur di dalam masing-masing perjanjian hibah dengan Organisasi Utama.

Jangka waktu untuk proyek BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama terhitung sejak awal hingga selesai, tidak boleh melebihi 24 bulan. Jangka waktu ini juga sudah termasuk waktu yang diperlukan untuk mendapatkan perizinan penelitian dan izin etika yang diperlukan, semua proses penulisan pelaporan dan diseminasi yang relevan terhadap hibah. Sekretariat bekerja bersama BRIN untuk menyediakan percepatan layanan bagi perizinan penelitian dan etika, dan waktu pemrosesan diperkirakan satu bulan.

3. Tentang Proses Permohonan Hibah

3.1. Gambaran umum proses permohonan

Anda harus membaca pedoman hibah ini dan formulir permohonan sebelum Anda menyerahkan permohonan untuk **CfP: Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024**.

Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahwa permohonan Anda lengkap dan akurat. Memberikan informasi yang salah atau menyesatkan akan membuat permohonan Anda tidak akan diikutsertakan untuk pertimbangan lebih lanjut, serta untuk potensi kesempatan pendanaan ke depannya di bawah BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama.

Baik untuk permohonan Pernyataan Minat (Tahap 1) dan permohonan lengkap (Tahap 2), Anda harus memenuhi semua kriteria persyaratan dan penilaian. Mohon untuk mengisi setiap bagian dari masing-masing formulir yang diserahkan secara daring melalui Sistem Manajemen Informasi KONEKSI (MISI) dan pastikan Anda menyediakan informasi yang kami minta. Adalah tanggung jawab Anda untuk memastikan segala bentuk perizinan dan persetujuan dari dalam Universitas Anda (dari kantor penelitian atau pimpinan lembaga) atau entitas lainnya telah didapatkan sebelum menyerahkan permohonan Anda.

Mohon simpan salinan formulir yang diserahkan beserta segala berkas pendukungnya. Sekretariat mungkin akan menghubungi Anda terkait permohonan Anda. Anda mungkin perlu menambahkan cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id dan dana-risnov@brin.go.id ke dalam daftar pengirim email yang disetujui.

3.2 Proses seleksi hibah

Proses hibah CfP: Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024 akan dilakukan melalui dua tahap untuk membantu fokus bagi upaya dari pemohon.

Tahap 1: Pernyataan Minat (*Expressions of Interest – Eoi*)

Di awal, sebuah undangan Pernyataan Minat (Eoi) (disebut sebagai Tahap 1) akan dilakukan untuk konsep penelitian tingkat tinggi terhadap bidang-bidang fokus hibah dan kriteria persyaratan awal. Ini kemudian akan dinilai oleh Komite Kepatuhan dari Sekretariat. Ini dikenal sebagai Tahap 1.

Pemohon Eoi yang disetujui akan diundang untuk maju ke Tahap 2.

Tahap 2: Permohonan Hibah

Para pemohon yang diundang akan dapat menyerahkan sebuah permohonan hibah lengkap. Ini akan dikenal sebagai Tahap 2 dan melibatkan respons yang mendetail terhadap kriteria pemilihan.

Ini kemudian akan dikaji oleh Komite Kepatuhan di dalam Sekretariat (untuk uji kelayakan dan anggaran) dan oleh Penilai Sejawat Ahli (untuk kelayakan akademis) yang terdiri dari para akademisi dan ahli Australia dan Indonesia.

Semua kemitraan yang memenuhi syarat yang menyerahkan proposal hibah akan dinilai berdasarkan kriteria seleksi, dan proses serta hasil dari setiap putaran seleksi akan didokumentasikan. Kriteria ini memastikan proposal terpilih akan memiliki kemitraan yang beragam untuk menyelidiki topik-topik penting dengan kekuatan metodologi, dan yang dapat melakukan dan memberikan hasil sepadan sesuai dengan pendanaan yang disediakan untuk setiap jenis hibah.

3.3. Perkiraan waktu untuk proses permohonan

Untuk dapat dipertimbangkan, Anda harus menyerahkan permohonan Anda ke Sekretariat berdasarkan tanggal di bawah.

Tabel 1: Perkiraan waktu untuk proses permohonan

Kegiatan	Waktu
Periode Pernyataan Minat	Dibuka: 21 Juni 2024 Ditutup: Pukul 23.59 WIB pada 26 Juli 2024
Undangan untuk menyerahkan permohonan hibah lengkap	16 Agustus 2024
Batas waktu penyerahan permohonan hibah lengkap	13 September 2024
Persetujuan hasil proses seleksi	November 2024
Negosiasi dan penganugerahan perjanjian hibah	November 2024
Pemberitahuan akan permohonan yang tidak berhasil	November 2024
Kegiatan dimulai	Desember 2024
Tanggal berakhir	Disebutkan di dalam permohonan
Durasi Hibah	Hingga 24 bulan (sampai 30 November 2026)

3.4. Persyaratan Bahasa dan Format

Pernyataan Minat (Eol) dapat ditulis baik dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Proposal lengkap harus diserahkan dalam Bahasa Inggris. Formulir Eol dan Permohonan Hibah dapat diakses melalui situs KONEKSI dan BRIN di <https://pendanaan-risnov.brin.go.id/> dan <http://bit.ly/BRINKONEKSIJointCall>.

Eol dan Permohonan Hibah harus diserahkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen KONEKSI (KONEKSI MISI) dan sistem Pendanaan BRIN. Permohonan yang dikirim melalui faks atau surat/pos tidak akan diterima.

3.5. Pertanyaan selama proses permohonan

Jika Anda memiliki pertanyaan selama periode permohonan, silakan menghubungi Sekretariat, cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id. Sekretariat akan merespons terhadap pertanyaan yang dikirimkan melalui email dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan dimasukkan ke situs KONEKSI di www.koneksi-kpp.id.

Pemohon dapat meminta bantuan dari Sekretariat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

4. Persyaratan Kelayakan

4.1. Persyaratan kelayakan untuk permohonan

Apa saja persyaratan kelayakan untuk permohonan?

Permohonan harus terdiri dari sebuah kemitraan antara setidaknya satu lembaga Australia dan satu lembaga Indonesia (lihat bagian [4.2 Entitas yang memenuhi syarat](#) di bawah). Organisasi yang terdaftar di dalam proposal diharapkan terus terlibat selama proyek berlangsung

Sebuah permohonan harus diserahkan secara kolaboratif oleh sebuah organisasi Australia dan organisasi Indonesia. Hanya satu organisasi Australia yang akan menjadi penerima hibah dari KONEKSI dan satu organisasi Indonesia akan menjadi penerima hibah dari BRIN. Organisasi-organisasi ini yang akan menjadi 'Organisasi Utama'. Semua entitas mitra akan dirujuk sebagai 'Organisasi Mitra' dan akan menjadi sub kontraktor dari satu Organisasi Utama.

Proyek setidaknya harus memiliki 1 (satu) mitra industri. Pada tahap proposal, sebuah surat komitmen dari mitra industri harus diikutsertakan sebagai bagian dari permohonan.

Organisasi Utama akan perlu membuat kontrak dengan sub mitra(-mitra). Detail lebih lanjut tentang persyaratan kemitraan dapat dilihat di bagian [10.1 Fixed Amount Awards](#).

Kriteria persyaratan kelayakan untuk Organisasi Utama adalah sebagai berikut:

- Harus memenuhi persyaratan uji kelayakan dan memiliki kapasitas administratif dan keuangan untuk menyalurkan dana yang diperlukan kepada semua mitra proyek. Silakan merujuk ke dokumen [Lampiran 3 – Uji Kelayakan](#) di bawah dan lihat bagian [10.2 Melibatkan mitra](#).

Kriteria persyaratan kelayakan untuk organisasi mitra adalah sebagai berikut:

- relevan terhadap dan terlibat di dalam proyek
- berbasis di Australia atau Indonesia
- memenuhi kriteria di bagian [4.2 Entitas yang memenuhi persyaratan kelayakan](#)

Persyaratan dan pedoman lainnya

- Semua Organisasi Utama diwajibkan untuk mendapatkan izin etika dan persyaratan penelitian BRIN. Sebuah izin etika dikeluarkan BRIN untuk per proyek penelitian. Perizinan penelitian dikeluarkan berbasis individu untuk semua individu yang terdaftar di dalam proyek. Warga negara Indonesia dipersyaratkan untuk menyerahkan izin etika untuk proyek penelitiannya. Akan tetapi, warga Indonesia tidak akan perlu mendapatkan perizinan penelitian. Waktu untuk mendapatkan perizinan dan proses visa harus diperhitungkan di dalam penyusunan lini masa proyek secara keseluruhan (diperkirakan hingga 2 bulan)
- **Semua organisasi (Utama dan Mitra)** harus memenuhi uji kelayakan dan persyaratan kebijakan integritas Sekretariat, untuk memastikan calon penerima: tidak termasuk ke dalam daftar perusahaan dan organisasi yang tidak memenuhi syarat, daftar sanksi atau organisasi teroris. Termasuk di dalamnya kapasitas organisasi untuk mengambil tes kepentingan nasional yang diwajibkan baik oleh organisasi penelitian Indonesia mau pun Australia.

4.2 Entitas yang memenuhi persyaratan

Untuk menjadi mitra peserta di dalam kegiatan yang diusulkan (baik sebagai Organisasi Utama atau Organisasi Mitra), Anda harus memenuhi persyaratan kelayakan berikut ini. Untuk memenuhi persyaratan kelayakan Anda harus:

- berupa satu dari jenis entitas berikut:
 - entitas riset Indonesia dengan pendaftaran resmi yang sah, misal, universitas, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, dan organisasi penyandang disabilitas (OPD)
 - sebuah entitas riset Australia dengan Nomor Usaha Australia (*Australian Business Number – ABN*), Nomor Perusahaan Australia (*Australian Company Number – ACN*), atau Nomor Perusahaan Masyarakat Adat (*Indigenous Corporation Number – ICN*)
 - sebuah entitas / perusahaan Indonesia dengan pendaftaran hukum yang sah
 - sebuah entitas/perusahaan Australia dengan Nomor Usaha Australia (*Australian Business Number – ABN*), Nomor Perusahaan Australia (*Australian Company Number – ACN*), atau Nomor Perusahaan Masyarakat Adat (*Indigenous Corporation Number – ICN*))
 - sebuah organisasi amal atau nir laba Australia atau Indonesia
 - sebuah instansi/badan pemerintah daerah Australia atau Indonesia
 - sebuah instansi/badan pemerintah Negara Bagian/Teritorial/Provinsi Australia atau Indonesia
 - sebuah instansi/badan Pemerintah Federal/Pusat Australia atau Indonesia
 - sebuah otoritas perundang-undangan Australia
- bersedia untuk menyediakan atau mengembangkan pedoman perlindungan anak untuk proyek Anda jika melibatkan mereka yang berusia di bawah 18 tahun atau mereka yang rentan lainnya dan mematuhi peraturan Perlindungan DFAT.
 - [Kebijakan Perlindungan Anak](#)
 - [Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual](#)
 - [Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial](#)

Semua organisasi yang ikut serta harus berbasiskan di Australia atau Indonesia. Anda tidak memenuhi persyaratan kelayakan permohonan jika Anda:

- bukan orang Australia, penduduk permanen Australia, organisasi Australia atau berbasis di dalam sebuah organisasi Australia atau
- bukan orang Indonesia, penduduk permanen Indonesia, sebuah organisasi Indonesia atau berbasis dalam sebuah organisasi Indonesia.

4.3 Kegiatan hibah yang memenuhi persyaratan

4.3.1 Untuk apa saja dana hibah dapat digunakan

Biaya-biaya yang diajukan di hibah haruslah yang diperkenankan, wajar, dan langsung dapat dialokasikan untuk kegiatan yang didukung. KONEKSI akan mendanai biaya yang ditanggung oleh Organisasi Australia dan BRIN akan mendanai biaya yang ditanggung oleh organisasi Indonesia.

Sebuah permohonan akan perlu memisahkan biaya-biaya yang akan ditutup oleh KONEKSI atau oleh BRIN. Ini akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Format Anggaran yang disediakan pada Tahap 2 – Proposal Lengkap.

KONEKSI	BRIN
<ul style="list-style-type: none"> ● Biaya untuk izin penelitian BRIN. Catatan: proyek yang Organisasi Riset BRIN sebagai anggota konsorsium dapat mengajukan pembebasan dari biaya ini. ● Kontribusi terbatas untuk biaya pelaksanaan adalah wajar, termasuk persentase dari gaji dan biaya <i>overhead</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Semua pengeluaran terkait langsung penelitian, termasuk penggantian biaya perjalanan ke lokasi organisasi peneliti Indonesia.

<ul style="list-style-type: none"> • Semua biaya penelitian langsung, termasuk penggantian biaya perjalanan ke lokasi organisasi peneliti Australia. • Penggantian biaya perjalanan bagi peserta diskusi kelompok. • Biaya-biaya perangkat lunak yang diperlukan. • Pengumpulan data (rekaman video, penyusunan survei internet), persiapan dan pengodean (coding). • Penerbangan kelas ekonomi, biaya akomodasi sederhana, tunjangan makan dan perjalanan, transportasi lainnya. • Biaya visa ke Indonesia dan Australia • Komunikasi dan penerjemahan. • Penyewaan tempat dan catering. • Iklan dan promosi, desain grafis, fotografi, dan bahan cetak. • Biaya-biaya produksi, termasuk biaya kargo dan upah seniman. • Partisipasi konferensi, ketika setidaknya satu peserta dari proyek atau pertemuan tersebut memberikan presentasi dan konferensi tersebut berkaitan langsung dengan kesempatan hibah. • Akomodasi yang layak (termasuk biaya pendamping) • Biaya untuk mitra Indonesia yang dianggap tidak dapat dibiayai oleh BRIN (Akses Terbuka, biaya pengeditan dan publikasi, biaya pendamping) 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya penggunaan laboratorium BRIN, termasuk biaya staf pendukung BRIN. • Biaya-biaya perangkat lunak berlisensi yang diperlukan. • Pengumpulan data (rekaman video, penyusunan survei internet), persiapan dan pengodean (coding). (hanya diizinkan untuk penyewaan selama durasi penelitian) • Penerbangan kelas ekonomi, biaya akomodasi sederhana, tunjangan makan dan perjalanan, transportasi lainnya. • Catering (hanya berlaku jika pertemuan atau diskusi kelompok fokus berlangsung di dalam masing-masing institusi yang bersangkutan, bukan sebagai bagian dari paket di hotel atau pusat konvensi)
--	---

Biaya teknologi hanya dapat dimasukkan jika teknologi itu merupakan komponen kritis bagi proyek yang diusulkan. Hibah tidak bisa mengikutkan pembayaran biaya belajar atau pembayaran apa pun ke diri sendiri atau untuk penasihat.

Anda hanya dapat menggunakan hibah untuk membayar biaya-biaya yang telah didetailkan dan disepakati di dalam anggaran dan perjanjian hibah Anda. Organisasi yang sekarang ini merupakan penerima pendanaan dari *Australian Official Development Assistance* (ODA) akan harus mengungkapkannya dan mendemonstrasikan bahwa Skema Hibah Kolaboratif Bersama KONEKSI-BRIN tidak berpotensi menduplikasi pendanaan ini.

4.3.2. Untuk apa saja dana hibah tidak dapat digunakan

Anda tidak dapat menggunakan Skema Hibah Kolaboratif Bersama KONEKSI-BRIN untuk hal-hal berikut:

KONEKSI	BRIN
<ul style="list-style-type: none"> • Pembelanjaan modal, termasuk pembelian bangunan atau kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi keilmiahan, termasuk pengeditan atau penerjemahannya.

<ul style="list-style-type: none"> ● Menutupi biaya retrospeksi (sudah lewat) atau pendanaan berulang untuk kegiatan ● Kegiatan yang sudah secara komersial bisa berjalan sendiri ● Kegiatan yang akan memberikan keuntungan komersial kepada sang pemohon (misal, mempromosikan bisnis pribadi pemohon) ● Biaya yang ditimbulkan dari penyusunan permohonan hibah atau dokumen terkait ● Kegiatan yang menjadi tanggung jawab utama dari badan-badan Pemerintah Persemakmuran, Negara Bagian, Teritorial atau Lokal (misal, riset akademis, bantuan usaha, proyek bantuan pembangunan) ● Kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dasar atau menengah, termasuk studi tur, di mana perjalanan oleh sejumlah signifikan siswa menjadi unsur utama dari proposal ● Beasiswa untuk individu (maha)siswa dan ● Proyek yang telah selesai. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kehadiran konferensi. Hanya jika setidaknya seorang peserta dari proyek atau pertemuan menjadi pembicara atau konferensi secara langsung relevan dengan kesempatan hibah. ● Pembelanjaan modal, termasuk pembelian bangunan atau kendaraan ● Menutupi biaya retrospeksi (sudah lewat) atau pendanaan berulang untuk kegiatan ● Kegiatan yang sudah secara komersial bisa berjalan sendiri ● Kegiatan yang akan memberikan keuntungan komersial kepada sang pemohon (misal, mempromosikan bisnis pribadi pemohon) ● Biaya yang ditimbulkan dari penyusunan permohonan hibah atau dokumen terkait ● Kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dasar atau menengah, termasuk studi tur, di mana perjalanan oleh sejumlah signifikan siswa menjadi unsur utama dari proposal ● Proyek yang telah selesai. ● Biaya untuk asisten pribadi atau pendamping dalam tim penelitian atau peserta dalam penelitian ● Gaji untuk pegawai negeri dan biaya untuk institusi pemerintah Indonesia
--	---

5. Kategori Pendanaan

5.1. Jenis hibah dan proyek

Jumlah pendanaan akan ditentukan oleh kematangan tahap penelitian dan kegiatannya, pekerjaan yang sudah ada di bidang yang relevan dan kekuatan dampak dari penelitian berdasarkan jejaring dan pengalaman. Sekretariat akan mencoba mendanai gabungan dari penelitian pengembangan dan kegiatan penelitian yang telah matang dan mendorong proyek pada semua tahapan untuk mengajukan permohonan. Putaran pendanaan kali ini tidak akan mendukung permohonan bertunas. Sebaliknya, prioritas diberikan untuk mengembangkan proyek dan kemitraan yang telah memiliki dasar yang kuat, memungkinkan mereka untuk memajukan penelitiannya menuju dampak yang lebih besar.

Permohonan untuk kedua kategori pendanaan akan dinilai bersaing terhadap permohonan lainnya dari kategori yang sama. Sebagai contoh, permohonan hibah bertumbuh hanya akan dinilai terhadap permohonan hibah bertumbuh lainnya dan tidak akan bersaing dengan yang ada di kategori berbuah. Indikasi kategori pendanaan secara visual ditampilkan di bawah.

Tabel 2: Kategori Pendanaan – Jenis, tujuan dan dampak hibah dan proyek

Jenis Hibah	Bertumbuh (<i>Growing</i>)	Berbuah (<i>Flourishing</i>)
Durasi Pendanaan	2 tahun (maksimal)	2 tahun (maksimal)
Besar Pendanaan	Hingga 400.000 dolar Australia Catatan: jumlah total ini sudah termasuk pendanaan dari BRIN yang dibatasi hingga Rp. 1.000.000.000/ proyek / tahun untuk mitra(-mitra) Indonesia. Ini termasuk biaya untuk mobilitas peneliti dan prasarana / pengeluaran laboratorium.	Hingga 500.000 dolar Australia Catatan: jumlah total ini sudah termasuk pendanaan dari BRIN yang dibatasi hingga Rp. 1.000.000.000/ proyek / tahun untuk mitra(-mitra) Indonesia. Ini termasuk biaya untuk mobilitas peneliti dan prasarana / biaya penggunaan laboratorium.
Tujuan	<p>Untuk membangun dari upaya yang telah ada</p> <p>Untuk upaya pengembangan moderat, dengan potensi untuk menghasilkan dampak yang relevan bagi kebijakan atau teknologi.</p> <p>Upaya penelitian yang telah ada untuk memajukan pengembangan inovasi kebijakan atau teknologi; mempertajam atau meningkatkan konsep atau prototipe di tahap awal, mengevaluasi ketergunaan, keefektifan dan dampak inovasi kebijakan atau teknologi; memperkuat proses kolaborasi dan kapasitas untuk menghasilkan penelitian bermutu tentang topik yang relevan; bukti akan konsep, prototipe.</p> <p>Untuk membentuk keterlibatan yang matang yang selaras dengan prioritas kebijakan atau kebutuhan industri untuk meningkatkan kesempatan pengadopsian dan penerapan; kontribusi terhadap narasi atau isi kebijakan yang baru atau yang berubah secara lokal, nasional, internasional.</p>	<p>Untuk memajukan penelitian</p> <p>Untuk upaya penelitian yang sudah jauh berkembang, matang menuju ke arah kebijakan atau teknologi</p> <p>Proyek telah terbentuk baik dan matang untuk menghasilkan penelitian bermutu tinggi tentang topik yang relevan; membentuk regulasi dan pedoman dan berkontribusi terhadap pengambilan kebijakan berbasis bukti melalui temuan-temuan, wawasan dan rekomendasi penelitian.</p> <p>Untuk mendorong perubahan di keseluruhan sistem dengan memperkenalkan pendekatan, alat dan solusi inovatif yang mentransformasikan praktik, proses dan sikap konvensional, memberi manfaat kepada keseluruhan sistem dan sektor; kontribusi terhadap perubahan cara kerja, di dalam kepercayaan / sistem tata kelola sistem.</p>
Dampak yang dicari	Penelitian terapan pada tahap awal; meningkatnya kesadaran dan pengakuan pemerintah dan/atau industri akan hasil-hasil penelitian; penerapan metodologi yang inklusi; keterlibatan dengan pengguna akhir/pembuat kebijakan atau industri; ikut serta di dalam dialog kebijakan; kontribusi terhadap produk atau teknologi baru atau lebih baik (perbaikan terhadap lingkungan, pengembangan, pengujian atau perluasan langsung)/inkubasi.	Perubahan terhadap satu kebijakan atau kebijakan baru, sistem praktik, produk, kapasitas, berujung kepada perubahan keseluruhan sistem; publikasi; penggunaan bukti perspektif dan pengalaman masyarakat; atau yang berakibat pada manfaat sosio-ekonomi yang lebih luas; evaluasi pengguna akan prototipe; pengujian / percepatan produk.

	Tingkat Kesiapan Teknologi: 4-5-6 (untuk definisi selengkapnya lihat Lampiran 2) dan produk tersebut memprioritaskan etika, keselamatan di semua fase desain.	Tingkat Kesiapan Teknologi: 7-8-9 (untuk definisi selengkapnya lihat Lampiran 2) dan produk tersebut memprioritaskan etika, keselamatan di semua fase desain .
--	--	---

5.2. Pengalaman masa lampau dan bukti yang diharuskan

Tabel 3: Kategori Pendanaan – pengalaman masa lampau dan bukti yang dipersyaratkan

Jenis Hibah	Bertumbuh (<i>Growing</i>)	Berbuah (<i>Flourishing</i>)
<p>Bukti akan kelayakan persyaratan melalui pengalaman peserta dan mitra proyek yang terlibat</p> <p>Harap sampaikan hal-hal berikut, yang relevan dengan jenis proyek yang Anda ajukan, sebutkan pengalaman masa lampau yang relevan yang akan digunakan untuk melakukan penelitian berupaya untuk mendapatkan dampak yang sesuai.</p>	<p>Organisasi Utama dan Mitra mendemonstrasikan pengalaman penelitian terhadap permasalahannya.</p> <p>Pengalaman teknis terlihat di dalam pelaksanaan kegiatan yang serupa (penelitian atau proyek).</p> <p>Bukti akan pengembangan penelitian sebelumnya yang relevan terhadap topik yang mendukung diberikannya kesempatan pengembangan lebih lanjut di dalam hibah ini.</p> <p>Bukti kinerja di Indonesia terkait tujuan penelitian yang diajukan.</p> <p>Rekam jejak sebelumnya akan proyek/pendanaan/rangkaian keluaran (artikel akademis, berkas kebijakan, kerangka kerja teknis, metodologi inklusi, komersialisasi) yang relevan terhadap pekerjaan yang diproposalkan.</p> <p>Mendemonstrasikan keselarasan dengan Tingkat Kesiapan Teknologi: 4-5-6 (untuk definisi selengkapnya lihat Lampiran 2).</p>	<p>Organisasi Utama dan Mitra mendemonstrasikan pengetahuan akan penelitian sebelumnya atau yang sedang ada di bidangnya, mendemonstrasikan pendanaan sebelumnya dan mendemonstrasikan serangkaian keluaran (artikel akademis, berkas kebijakan, kerangka kerja teknis, komersialisasi) yang relevan dengan pekerjaan yang diproposalkan.</p> <p>Mendemonstrasikan upaya di masa lalu untuk melakukan penelitian di bidang fokusnya; menyediakan bukti bahwa upaya-upaya mendasar telah dilakukan di bidang ketertarikan tersebut.</p> <p>Mendemonstrasikan jejaring kerja pemangku kepentingan yang relevan untuk mendukung pembangunan dan penghasilan dampak penelitian.</p> <p>Mendemonstrasikan upaya-upaya sebelumnya untuk memastikan bahwa sebuah kegiatan penelitian dapat meninggalkan dampak positif, termasuk strategi untuk menerjemahkannya (menjadi hal positif).</p> <p>Bukti akan penelitian bersama di masa lampau yang ditujukan untuk reformasi sektor, perubahan kebijakan atau pemajuan teknologi.</p> <p>Mendemonstrasikan pengalaman dan strategi yang digunakan untuk mengelola kolaborasi penelitian internasional yang berhasil antara mitra-mitra Australia dan Indonesia.</p> <p>Mendemonstrasikan keselarasan dengan Tingkat Kesiapan Teknologi: 7-8-9 (untuk definisi selengkapnya lihat Lampiran 2).</p>

6. Mempersiapkan Permohonan Anda

Dalam mempersiapkan permohonan Anda, mohon untuk memahami bahan di bawah ini tentang aspek yang unik dari BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama dan mengakses materi video (tersedia di situs KONEKSI dan BRIN yaitu <http://bit.ly/BRINKONEKSIJointCall> dan <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>). Informasi di bawah mencakup informasi yang perlu Anda siapkan bagi EoI dan proposal lengkap Anda, jika proyek Anda terpilih. Bagian di bawah juga memberikan informasi tentang tiga aspek unik dari Skema Hibah Kolaboratif Bersama KONEKSI-BRIN: kemitraan, GEDSI dan dampak.

6.1 Kemitraan

Kemitraan adalah unsur integral dari desain BRIN – KONEKSI Panggilan Bersama. Sekretariat menghargai kemitraan penelitian Indonesia dan Australia berdasarkan sejumlah perspektif yang disebutkan di bawah ini:

Tabel 4: Kemitraan

Pendekatan multi disiplin untuk menangani permasalahan yang kompleks	Kemitraan penelitian mempertemukan keterampilan, pengetahuan dan para peneliti yang saling melengkapi, menawarkan sebuah cara bekerja lebih dari sekedar pendekatan satu disiplin (tunggal)
Menggabungkan sumber daya untuk dampak yang lebih besar	Kemitraan penelitian memberikan kesempatan bagi sumber daya yang terbatas sebaik mungkin dan memberikan cara bagi berbagai bentuk kontribusi berbentuk jasa dan barang serta kontribusi moneter
Menggabungkan berbagai ragam pengetahuan untuk menciptakan pengetahuan yang baru	Kemitraan penelitian menawarkan kesempatan bagi para aktor baru untuk berkontribusi terhadap agenda trans-disiplin, dan mendefinisikan berbagai jalan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik
Mempertanyakan pendekatan konvensional untuk menghasilkan pengetahuan	Kemitraan penelitian menawarkan kesempatan untuk membangun praktik baru dan lebih berkeadilan di dalam menghasilkan dan menghasilkan ulang pengetahuan

Para pemohon yang diundang ke Tahap 2 (tahap proposal lengkap) akan dinilai berdasarkan kekuatan dan keberlanjutan kemitraannya. Komponen kemitraan pada penilaian berbobot 25% dari keseluruhan komponen teknis. Fokus penilaian adalah pada keberlanjutan dan potensi bagi kemitraan untuk menciptakan kesempatan untuk menghasilkan bentuk-bentuk inovatif pengetahuan atau transfer teknologi dan potensinya untuk manfaat lokal, sebagai contoh, di dalam hal keterampilan dan berjejaring, termasuk kesempatan untuk terlibat secara internasional.

6.2 Rencana kemitraan

Sekretariat bertujuan untuk mendukung serangkaian kemitraan yang beragam yang membentang antara kedua bangsa, pelaku negara dan non negara serta beragam disiplin akademis. Sekretariat mendukung kemitraan baru dan yang telah terbentuk untuk mengembangkan penelitian terapan

demi tujuan-tujuan pembangunan Indonesia. Prinsip-prinsip keadilan menjadi hal mendasar untuk agenda Kemitraan ini.¹¹

Setelah dianugerahkan BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama, mitra-mitra konsorsium diharapkan untuk mengembangkan sebuah rencana singkat kemitraan bersama semua mitra untuk mengakui, mengidentifikasi dan merespons potensi ketidaksetaraan yang ada di dalam kemitraan antara negara dan wilayah, disiplin, hierarki, gender dan abilitas/disabilitas. Tujuan dari rencana kemitraan ini adalah untuk memaksimalkan potensi kemitraan yang diusulkan untuk menciptakan kesempatan untuk menghasilkan bentuk-bentuk inovatif pengetahuan atau transfer teknologi dan potensi bagi manfaat lokal (untuk meningkatkan keterampilan, jejaring dan hubungan).

4 pilar Rencana Kemitraan adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Empat Pilar Rencana Kemitraan

4 Pilar Kemitraan	
Tujuan dan Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> ● Apakah ada tujuan dan sasaran yang berbeda, atau bahkan bersaing? Contoh, Tujuan akademis vs. Tujuan LSM ● Apa mungkin secara bersama mengembangkan serangkaian tujuan bersama atau yang satu dominan, jika demikian, mengapa?
Hubungan	<ul style="list-style-type: none"> ● Apakah terdapat cara kerja untuk mengatasi transisi tantangan / perselisihan dari orang-orang yang terlibat? ● Titik penghubung untuk kemitraan dan komunikasi ● Protokol komunikasi internal dan eksternal
Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> ● Distribusi sumber daya lintas mitra ● Menangani ketidakadilan melalui sumber daya, seperti akomodasi yang wajar untuk disabilitas, mementor para junior, akses untuk jurnal-jurnal
Proses Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ● Proses bisnis kegiatan / keluaran penelitian ● Keluaran dan tanggung jawab penelitian yang diharapkan, persentase kontribusi yang proporsional terhadap keluaran ● Penulisan dan kepemilikan intelektual ● Komunikasi dan diseminasi temuan-temuan penelitian, peran dan tanggung jawab

6.3. GEDSI dalam penelitian

Meningkatkan dan memajukan kesetaraan gender, hak-hak disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) adalah tujuan inti dari Skema Hibah Kolaboratif Bersama KONEKSI-BRIN. Bagi para pemohon yang diundang ke Tahap 2 (tahap proposal lengkap), GEDSI dinilai diberikan bobot 25% dari keseluruhan nilai komponen teknis.

6.3.1 Penanda GEDSI

Untuk membantu mengartikulasikan pengintegrasian GEDSI di proyek Anda, Sekretariat telah mengembangkan penanda-penanda GEDSI. Ini adalah cara bagi para pemohon untuk mengidentifikasi

¹¹ KONEKSI mengembangkan Pendekatan Kemitraan KONEKSI berdasarkan penelitian dan wawancara dengan para mitra. Lihat Bexley dan Williams (2024) 'Partnering for success: four tips for getting research collaborations right in Indonesia'. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/partnering-for-success-4-tips-for-getting-research-collaborations-right-in-indonesia/>

keinginan proyek tentang GEDSI, dan bagi penilai untuk menilai klaim yang dibuat tentang GEDSI di dalam permohonan secara keseluruhan. Selaras dengan praktik terbaik internasional,¹² Sekretariat akan menggunakan empat penanda GEDSI untuk merujuk ke masing-masing bidang fokus yaitu kesetaraan gender (Tabel 6), disabilitas (Tabel 7) dan inklusi sosial (Tabel 8). Keempat penanda memastikan bahwa setiap proyek dapat berkontribusi terhadap hasil-hasil GEDSI Skema Hibah Kolaboratif Bersama KONEKSI-BRIN dan bahwa **semua upaya-upaya GEDSI diakui**.

Pemohon harus memenuhi persyaratan minimum setidaknya satu penanda GEDSI untuk mengindikasikan tingkat upaya yang dilakukan: mulai muncul, sensitif atau transformatif. Penggunaan penanda memberikan kesempatan untuk menilai diri, serta juga kemungkinan untuk memilih lebih dari satu kategori di lintas gender, disabilitas dan inklusi sosial untuk mengidentifikasi interseksionalitas. Pemohon tidak akan dirugikan karena jumlah dari penanda yang berbeda yang digunakan. Pemohon didorong untuk memilih penanda GEDSI yang paling relevan untuk proyek mereka.

Penanda mengindikasikan tingkat upaya dan fokus GEDSI dalam setiap proyek dan memungkinkan adanya spektrum upaya yang penuh untuk berkontribusi terhadap tujuan-tujuan GEDSI Sekretariat. Selain itu, penanda GEDSI akan membantu Sekretariat di dalam memonitor anggarannya yang menyasarkan GEDSI, menuju rekomendasi DFAT bahwa pendanaan yang memadai disiapkan untuk memastikan program atau proses pengembangan strateginya telah inklusi gender dan disabilitas serta akses.¹³

6.3.2. Penanda Kesetaraan Gender

Penanda Kesetaraan Gender adalah alat untuk mengidentifikasi dan menilai sejauh mana pemohon hibah telah mengadopsi pertimbangan-pertimbangan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan menjunjung hak-hak perempuan di dalam tujuan, kegiatan dan pengaturan kemitraannya. Berdasarkan penilaian ini, pemohon hibah harus memilih satu kategori: tidak ada, baru muncul, sensitif, atau transformatif.

Tabel 6: Penanda Kesetaraan Gender

Kategori	Persyaratan Minimum
Tidak ada unsur kesetaraan gender	Kegiatan atau permohonan hibah penelitian tidak diharapkan berkontribusi terhadap kesetaraan gender.
Baru muncul	Kesetaraan gender bukan salah satu tujuan primer dari kegiatan atau hibah penelitian, tapi terdapat tingkat kesadaran minimum akan ketidaksetaraan gender. Kriteria minimum: <ul style="list-style-type: none"> • Ketidaksetaraan dan perbedaan antara gender diidentifikasi di dalam permohonan, dengan beberapa data dipilah per jenis kelamin digunakan.
Sensitif	Kegiatan atau permohonan hibah tidak secara eksplisit menangani kesetaraan gender atau pemberdayaan perempuan, tapi telah mengambil langkah-langkah

¹² Buku Pegangan tentang Penanda Kebijakan Kesetaraan Gender OECD-DAC, <https://www.oecd.org/dac/gender-development/Handbook-OECD-DAC-Gender-Equality-Policy-Marker.pdf>. UN Development Group (2013) [Gender Equality Marker Guidance Note](#); UN Women (n.a.) [Disability Inclusion Markers](#), UN In Brief; CARE (2017) [CARE Gender Marker, Case Studies and Lessons Learned](#), CARE. UN (2018) [Quality assurance of Gender Equality Markers – Improving accuracy and consistency, Guidance Note](#), UNSCEB. World Bank (2019) [Good Practice Note Environment & Social Framework for IPF Operations, Gender](#); O'Donnell, M et al (2021) [Gender Equality Policy Markers: A beginner's Guide](#), Center for Global Development.

¹³ DFAT (2021) Inklusi Disabilitas di dalam program pembangunan DFAT, Catatan Praktik Baik April 2021.

	<p>untuk mempertimbangkan dampak dari kegiatan atau hibah terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.</p> <p>Kriteria minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidaksetaraan dan perbedaan gender kunci telah diidentifikasi di dalam permohonan, perbedaan dampak didiskusikan, dan data terpilih dimasukkan, metode yang diusulkan sensitif gender. • Sumber daya untuk menangani ketidaksetaraan yang diidentifikasi telah didetailkan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada. • Sedikit keterlibatan dengan kelompok-kelompok perempuan diusulkan dan langkah-langkah telah diambil untuk mengidentifikasi dan memitigasi segala potensi dampak negatif. • Keseimbangan gender telah dipertimbangkan di dalam komposisi tim peneliti.
Transformatif	<p>Kesetaraan gender disasarkan oleh kegiatan atau permohonan hibah; atau sebuah kegiatan atau permohonan hibah penelitian dengan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender sebagai hasil utamanya.</p> <p>Kriteria minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidaksetaraan dan perbedaan gender, dan dampaknya, diidentifikasi dan data terpilih dimasukkan. • Keluaran, hasil, dan rekomendasi berfokus pada kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. • Kemitraan memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keanekaragaman dan inklusi. • Keterlibatan kelompok-kelompok perempuan atau para perempuan sangat penting bagi kegiatan atau permohonan hibah dan langkah-langkah diambil untuk mengidentifikasi dan memitigasi segala potensi dampak negatif. • Kepemimpinan perempuan di dalam tim peneliti dipertimbangkan sebagai hal sangat penting bagi proyek.

Beberapa pemohon akan diminta untuk memberikan anggaran yang terperinci untuk juga memasukkan untuk tanggung jawab pengasuhan. Penanda Gender akan dilengkapi bersama alokasi anggaran mendetail untuk modifikasi yang diperlukan untuk memungkinkan para perempuan dan pengasuh mendapatkan peluang yang sama seperti mereka yang tidak memiliki kewajiban pengasuhan, seperti akomodasi yang wajar bagi mereka yang memiliki tanggung jawab pengasuhan. Biaya tanggung jawab pengasuhan dapat berupa:

- Kecemasan terkait transportasi dan keselamatan (misal, akankah transportasi yang aman disediakan bagi perempuan dan pengasuh) baik untuk tim peneliti atau peserta penelitian.
- Biaya pengasuh di tim peneliti atau peserta dalam penelitian.

Pedoman penganggaran untuk tanggung jawab pengasuhan akan dimasukkan ke dalam instruksi keuangan untuk pemohon hibah penelitian.

6.3.3. Penanda Inklusi Disabilitas

Penanda Inklusi Disabilitas memberikan sebuah alat untuk memungkinkan pemohon hibah untuk menilai diri akan sejauh mana proposal mereka telah mengadopsi pertimbangan-pertimbangan untuk mempromosikan hak-hak disabilitas di dalam tujuan, kegiatan dan pengaturan kemitraannya. Berdasarkan penilaian ini, pemohon hibah harus memilih satu kategori: tidak ada, baru muncul, sensitif, atau transformatif.

Tabel 7: Penanda Inklusi Disabilitas

Kategori	Persyaratan Minimum
Tidak ada unsur inklusi disabilitas	Kegiatan atau permohonan hibah penelitian tidak diharapkan berkontribusi terhadap inklusi disabilitas
Baru muncul	Hak-hak disabilitas bukan merupakan salah satu tujuan kegiatan atau hibah penelitian, tapi terdapat tingkat kesadaran minimum akan permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas. Kriteria minimum: <ul style="list-style-type: none"> Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas diidentifikasi di dalam hibah penelitian atau desain kegiatan, dengan data terpilah digunakan untuk mendukung proposal.
Sensitif	Kegiatan atau permohonan hibah tidak secara eksplisit menangani inklusi disabilitas, tapi telah mengambil langkah-langkah untuk mempertimbangkan dampak dari kegiatan atau hibah terhadap para penyandang disabilitas. Kriteria minimum: <ul style="list-style-type: none"> Aspek disabilitas kunci telah diidentifikasi di dalam analisis, berbagai dampak dibahas, dan data terpilah di dalam metode diusulkan. Sumber daya untuk mengatasi hambatan yang diidentifikasi didetailkan terhadap kegiatan. Keterlibatan kelompok-kelompok inklusi disabilitas diusulkan, dan langkah-langkah diambil untuk mengidentifikasi dan memitigasi segala potensi dampak negatif.
Transformatif	Permohonan hibah inklusi disabilitas dengan hak-hak disabilitas sebagai hasil utamanya. Kriteria minimum: <ul style="list-style-type: none"> Analisis, metodologi, keluaran, hasil dan rekomendasi berfokus pada hak-hak disabilitas. Permasalahan dan dampak disabilitas dari kegiatan atau permohonan hibah penelitian terhadap para penyandang disabilitas diidentifikasi dan data terpilah dimasukkan. Kemitraan memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keanekaragaman dan inklusi yang mempromosikan penyandang disabilitas di dalam tim peneliti. Keterlibatan penyandang disabilitas sangat penting bagi kegiatan atau permohonan hibah dan langkah-langkah diambil untuk mengidentifikasi dan memitigasi segala potensi dampak negatif.

Pemohon hibah akan diminta memberikan anggaran terperinci untuk akomodasi yang wajar. Penanda Inklusi Disabilitas akan dilengkapi bersama alokasi anggaran terperinci bagi modifikasi yang diperlukan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama seperti mereka yang tanpa disabilitas, misal, akomodasi yang wajar bagi penyandang disabilitas. Biaya-biaya akomodasi yang wajar dapat berupa:

- Transport yang akses dan aksesibilitas (misal, bidang miring sementara, alat bantu)
- Komunikasi yang akses (misal, teks layar pada pengumuman video, format bahasa mudah dibaca, juru bahasa isyarat)
- Biaya bagi asisten atau perawat pribadi bagi anggota tim peneliti atau peserta penelitian.

Pedoman penganggaran untuk akomodasi yang wajar akan dimasukkan ke dalam instruksi keuangan untuk pemohon hibah penelitian.

Penanda disabilitas ini akan membantu Sekretariat di dalam memonitor anggarannya yang menyasarkan inklusi disabilitas sesuai rekomendasi DFAT bahwa pendanaan yang memadai disiapkan untuk memastikan program atau proses pengembangan strateginya inklusi disabilitas dan akses (sekitar 3 hingga 5 persen dari anggaran).¹⁴

6.3.4. Penanda Inklusi Sosial

Penanda Inklusi Sosial memberikan sebuah alat untuk memungkinkan pemohon hibah untuk menilai diri sejauh mana proposal mereka telah mengadopsi pertimbangan-pertimbangan untuk mempromosikan inklusi sosial di dalam tujuan, kegiatan dan pengaturan kemitraannya. Inklusi sosial dapat berupa memasukkan kaum muda, manula, kelompok-kelompok terpinggirkan, dan mereka yang tinggal di daerah dan tempat terpencil. Berdasarkan penilaian ini, pemohon hibah harus memilih satu kategori: tidak ada, baru muncul, sensitif, atau transformatif.

Tabel 8: Penanda Inklusi Sosial

Kategori	Persyaratan Minimum
Tidak ada unsur inklusi sosial	Kegiatan atau permohonan hibah penelitian tidak diharapkan berkontribusi terhadap inklusi sosial.
Baru muncul	Inklusi sosial bukan merupakan salah satu tujuan kegiatan atau hibah penelitian, tapi terdapat tingkat kesadaran minimum akan permasalahan yang dihadapi kelompok-kelompok tersebut. Kriteria minimum: <ul style="list-style-type: none"> Hambatan yang dihadapi kelompok-kelompok terpinggirkan diidentifikasi di dalam hibah penelitian atau desain kegiatan, dengan data terpilah digunakan untuk mendukung proposal.
Sensitif	Kegiatan atau permohonan hibah tidak secara eksplisit menangani inklusi sosial, tapi telah mengambil langkah-langkah untuk mempertimbangkan dampak dari kegiatan atau hibah terhadap kelompok-kelompok terpinggirkan. Kriteria minimum: <ul style="list-style-type: none"> Aspek kunci tentang terpinggirkannya kelompok-kelompok tertentu telah diidentifikasi di dalam analisis, berbagai dampak dibahas, dan data terpilah di dalam metode diusulkan. Sumber daya untuk mengatasi hambatan yang diidentifikasi didetailkan terhadap kegiatan. Keterlibatan kelompok-kelompok rentan diusulkan, dan langkah-langkah diambil untuk mengidentifikasi dan memitigasi segala potensi dampak negatif.
Transformatif	Kegiatan-kegiatan atau permohonan hibah menyasarkan inklusi sosial; atau kegiatan atau permohonan hibah penelitian bersama menjadikan tentang hak-hak satu kelompok terpinggirkan tertentu sebagai fokus dari hasilnya.

¹⁴ DFAT (2021) Inklusi Disabilitas di dalam program pembangunan DFAT, Catatan Praktik Baik April 2021.

	<p>Kriteria minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Analisis, keluaran, hasil dan rekomendasi berfokus pada hak-hak kelompok-kelompok terpinggirkan. ● Permasalahan dan dampak inklusi sosial dari kegiatan atau permohonan hibah penelitian terhadap kelompok-kelompok terpinggirkan diidentifikasi dan data terpilah dimasukkan. ● Kemitraan memiliki komitmen yang kuat terhadap praktik inklusi dan keanekaragaman. ● Keterwakilan kelompok-kelompok terpinggirkan sangat penting bagi kegiatan atau permohonan hibah dan langkah-langkah diambil untuk mengidentifikasi dan memitigasi segala potensi dampak negatif.
--	---

6.4. Penelitian yang Berdampak

Semua proyek-proyek penelitian kolaboratif yang didanai oleh Sekretariat adalah penelitian terapan dan harus mengontribusikan pengetahuan baru bagi kebijakan atau teknologi (dikenal sebagai K2P atau K2I). Sekretariat telah mengidentifikasi 2 (dua) kategori pendanaan yang merujuk kepada pengharapan-pengharapan berbeda dari tujuan dan dampaknya, dijelaskan lebih lanjut di [Bagian 5 Kategori Pendanaan](#), dan Sekretariat mendefinisikan dampak secara luas, dari menerapkan metodologi-metodologi baru hingga membuat perubahan sistemis. Direkomendasikan agar pemohon mempertimbangkan pendekatan-pendekatan inovatif untuk mengkomunikasikan penelitian mereka selama siklus penelitian menggunakan baik pendekatan-pendekatan tradisional (contoh, artikel jurnal dengan akses terbuka) dan non-tradisional (contoh, blog, tulisan opini, video singkat).

Dampak berbobot 25% di Tahap 2 (proposal lengkap) dan dinilai berdasarkan dampak dari penelitian, rencana pemangku kepentingan dan kapasitas pelaksanaan serta dampak kemitraan. Komponen-komponen ini memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk mengidentifikasi kekuatan kemitraan mereka terhadap kolaborasi dan terhadap menghasilkan dampak maksimum.

6.5. Penggunaan kecerdasan buatan di dalam menyusun permohonan Anda

Jika pemohon menggunakan AI generatif dan teknologi yang dibantu AI di dalam proses penulisan penyusunan permohonan hibah, maka teknologi-teknologi ini hanya boleh digunakan untuk meningkatkan tingkat keterbacaan dan bahasa karya tersebut. Penggunaan teknologi ini harus dilakukan dengan pengawasan dan kendali manusia, dan pemohon harus meneliti dan mengedit hasilnya dengan seksama, karena AI dapat menghasilkan keluaran yang terdengar berwibawa tapi kemungkinan tidak tepat, tidak lengkap atau bias. Pemohon yang pada akhirnya memegang tanggung jawab dan akuntabilitas atas isi karyanya.

Pemohon tidak boleh memasukkan AI dan teknologi yang dibantu AI ke dalam daftar sebagai pemohon atau penulis permohonan, serta juga tidak boleh mengutip AI sebagai penulis. Kepengarangan berimplikasi terhadap adanya tanggung jawab dan tugas-tugas yang hanya dapat diatribusikan dan dilakukan oleh manusia. Setiap pemohon bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan integritas permohonannya telah ditangani dengan pantas. Pemohon juga bertanggung jawab untuk memastikan karyanya orisinal, para pemohon yang disebutkan memenuhi persyaratan kelayakan, dan karya tersebut tidak melanggar hak pihak ketiga sebelum diserahkan.

7. Tahap 1: Penilaian Pernyataan Minat (Eol)

7.1. Kriteria penilaian untuk Eol

Pemohon yang memenuhi syarat untuk Pernyataan Minat (EOI) akan dinilai menggunakan kriteria penilaian yang luas:

- Persyaratan kelayakan kemitraan: Kemitraan harus setidaknya memasukkan satu organisasi Australia, satu organisasi Indonesia dan satu Mitra Industri.
 - Kelayakan durasi: Proyek untuk diselesaikan dalam waktu 2 tahun (maksimum)
 - Kelayakan besarnya pendanaan:
 - Bertumbuh: hingga 400.000 Dolar Australia
 - Berbuah: hingga 500.000 Dolar Australia
- Catatan:** Jumlah total kini sudah termasuk pendanaan dari BRIN yang dibatasi hingga Rp. 1.000.000.000/ proyek / tahun untuk mitra-mitra) Indonesia. Ini sudah termasuk untuk segala biaya terkait mobilitas peneliti dan prasarana / biaya penggunaan laboratorium.
- Keselarasan dengan tema-tema Keanekaragaman Hayati Laut: konsep proyek memberikan pernyataan yang jelas dan beralasan tentang tujuan, metode, keluaran yang dihasilkan, dan hasil yang selaras topik yang dipilih.
 - Daya Tanggap GEDSI: pernyataan GEDSI selaras dengan kategori arus utama GEDSI atau spesifik GEDSI yang telah dipilih sendiri, serta juga selaras dengan penanda GEDSI.
 - Dampak dan hasil-hasil proyek yang relevan: pernyataan dengan jelas mengidentifikasi manfaat dan dampak yang sesuai dari proyek berdasarkan kategori pendanaan dan dampak yang dipilih.

Eol yang gagal untuk mendemonstrasikan semua kriteria penilaian ini tidak akan maju ke Tahap 2.

7.2 Pengisian Eol

Komponen-komponen penilaian dipetakan ke dalam formulir Eol ([Lampiran 4 – format Pernyataan Minat KONEKSI-BRIN](#)) untuk mengindikasikan pengharapan dari permohonan). Eol sendiri hanya akan dapat diterima melalui Sistem Informasi Manajemen KONEKSI (KONEKSI MISI). Eol akan dinilai dan akan menentukan apakah organisasi Anda akan diundang untuk ikut serta ke Tahap 2 (yaitu, proses permohonan hibah lengkap).

Pemohon yang memenuhi kelayakan harus mengikuti proses yang dijelaskan di bawah ini:

7.2.1. Membuat sebuah login

Organisasi Utama **Australia** harus membuat sebuah *login* untuk mengakses KONEKSI MISI.

7.2.2. Mengakses bahan-bahan sumber

Pemohon harus mengenalkan diri mereka dengan semua sumber daya yang ada di KONEKSI MISI.

7.2.3. Memulai permohonan Anda

Menunjuk satu organisasi Indonesia yang akan menjadi Organisasi Utama.

- **Organisasi Utama:** harus ada satu organisasi Australia **dan** satu organisasi Indonesia yang akan menjadi Organisasi Utama
- **Kemitraan indikatif:** Buat daftar para mitra yang diinginkan.

Sumber daya personel dan alokasi waktu harus diperhitungkan dengan benar untuk memastikan bahwa mereka tidak membebankan 100 persen waktu mereka untuk masing-masing proyek. Ini karena organisasi dan konsorsium dapat mengajukan lebih dari satu permohonan. Jika Organisasi Utama menyerahkan lebih dari satu, maka ini harus dilihat sebagai proposal hibah yang terpisah.

7.2.4. Mengundang tim peneliti Anda untuk menilai dan mengedit permohonan

Organisasi utama Australia harus mengundang organisasi utama Indonesia untuk mengakses dan berkolaborasi pada permohonan. Organisasi utama juga dapat mengundang anggota konsorsium penelitian lainnya. Untuk melakukan ini, klik "*Invite a Colleague*," masukkan alamat emailnya, dan pilih opsi yang memungkinkan mengundang rekan sejawat untuk mengedit EoI. Kemudian, klik "*Send Invitation Email*" diikuti dengan "*Save & Close*."

7.2.5. Menyerahkan permohonan Anda

Permohonan dapat disimpan dan diubah secara daring sebelum diserahkan. Anda harus memastikan bahwa permohonan sudah lengkap dan akurat dan diserahkan sesuai dengan Pedoman ini dan formulir permohonannya.

Anda tidak dapat mengubah permohonan Anda setelah tanggal dan waktu penutupan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Sekretariat. Jika Anda menemukan kesalahan di dalam permohonan Anda setelah diserahkan, atau jika ada perubahan pada detail kontak atau informasi penting lainnya untuk menyelesaikan proyek, selama tidak mengubah substansi dari permohonan Anda, maka Anda harus menghubungi Sekretariat di cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id.

7.2.6. Siapa yang akan menilai EoI?

Sebuah Komite Kepatuhan, yang dibentuk oleh Sekretariat, akan melakukan penilaian dari masing-masing Pernyataan Minat berdasarkan kriteria pemilihan EoI. Komite Kepatuhan kemudian akan menyetujui konsep proyek untuk lanjut ke putaran berikutnya (Tahap 2) atau menolak proposal tersebut.

7.2.7. Notifikasi untuk EoI yang berhasil

Pemohon yang berhasil mau pun tidak akan diberitahukan melalui email. Pemohon yang berhasil akan diundang untuk lanjut ke Tahap 2 dan untuk menyerahkan sebuah permohonan hibah lengkap.

8. Tahap 2: Proses Permohonan Hibah

Berdasarkan undangan ke Tahap 2, pemohon diharuskan untuk menyerahkan sebuah permohonan hibah lengkap, termasuk komponen-komponen teknis dan keuangannya.

8.1. Kriteria penilaian permohonan

Anda perlu menjawab kriteria penilaian berikut ini di dalam permohonan hibah Anda. Sekretariat akan menilai permohonan Anda berdasarkan pembobotan yang diberikan untuk setiap kriteria. Seberapa mendetail informasi dan jumlah bukti pendukung yang Anda berikan di dalam permohonan Anda adalah relatif terhadap besar, kompleksitas serta jumlah hibah yang dimohonkan.

Penilaian Uji Kelayakan

1. Registrasi hukum organisasi.
2. Alamat fisik dan situs internet resmi.
3. Pengalaman organisasi.
4. Dokumen-dokumen kebijakan dan permohonan organisasi yang relevan.
5. Pengaturan audit.
6. Praktik manajemen keuangan.
7. Penipuan dan korupsi.
8. Sistem integritas.
9. Daftar periksa yang dilarang dan manajemen risiko.
10. Kebijakan Pencegahan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual dan Perlindungan Anak.

Kriteria Penilaian Proposal

2.1 Pilihan topik dan mutu proyek – 25%

2.1.1 Keselarasan topik dan konsep proyek.

- Konsep proyek selaras dengan bidang dan tema prioritas Keanekaragaman Hayati (silakan merujuk ke peta topik).
- Nilai penting, inovasi dan relevansi dari topik yang dipilih di dalam konteks Keanekaragaman Hayati.

2.1.2 Manfaat, ketelitian dan metodologi penelitian.

- Fokus, pertanyaan dan metodologi proyek penelitian berstandar tinggi, dan didasarkan atas literatur akademis terkini dan sesuai.
- Kerangka kerja konseptual dan metodologi yang jelas dan didesain dengan baik.
- Hipotesis/rasional yang jelas dan didukung dengan baik.
- Desain proyek yang jelas dan metode penelitian yang sesuai.
- Proyek menangani permasalahan penting untuk memajukan bidang penelitian tersebut.

2.1.3 Sumber daya, anggaran dan ketercapaian.

- Kecukupan dan kesesuaian anggaran, termasuk kontribusi tunai dan bentuk natura dijanjikan oleh organisasi-organisasi peserta.
- Sumber daya: akses terhadap sumber daya, prasarana, peralatan dan atau fasilitas untuk pengumpulan data dan penyelesaian proyek.
- Kesesuaian anggaran: Kecukupan dan kesesuaian anggaran, termasuk kontribusi tunai dan bentuk natura dijanjikan oleh organisasi-organisasi peserta.
- Ketercapaian tujuan-tujuan proyek dalam kerangka anggaran dan waktu yang diusulkan.

2.2 Kemitraan yang diusulkan – 25%

2.2.1 Kesesuaian Kemitraan

- Kesesuaian Organisasi Utama terhadap topik penelitian dan tujuan proyek yang dipilih
- Kesesuaian mitra-mitra yang diusulkan terhadap topik penelitian dan tujuan proyek yang dipilih
- Komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan di dalam proses penulisan dan kegiatan-kegiatan proyek, seperti bukti akan desain bersama dan rencana untuk penulisan bersama

2.2.2 Potensi Kemitraan

- Potensi dari kemitraan yang diusulkan dalam menciptakan kesempatan untuk menghasilkan bentuk-bentuk teknologi atau transfer pengetahuan yang inovatif
- Potensi bagi manfaat lokal (keterampilan, jejaring, koneksi)

2.3 Strategi dampak – 25%

2.3.1 Relevansi dampak yang diusulkan terhadap kebijakan/inovasi

- Kesesuaian dampak yang diusulkan bagi kebijakan penelitian atau bidang inovasi
- Kelayakan dan perlunya menghasilkan dampak di bidang kebijakan/inovasi
- Kesesuaian dari dampak yang diusulkan dengan kegiatan penelitian

2.3.2 Kesesuaian strategi untuk mewujudkan dampak (termasuk rencana pemangku kepentingan)

- Relevansi dan strategi dampak yang sesuai, berdasarkan apakah proyek ingin membuat dampak terhadap kebijakan atau inovasi
- Rencana pemangku kepentingan, termasuk pengintegrasian keterlibatan pemangku kepentingan dengan penelitian, dan strategi untuk melakukan promosi, dan/atau diseminasi hasil penelitian

2.3.3 Kapasitas pelaksanaan untuk dampak

- Peran dan tanggung jawab yang jelas dan dapat dilakukan, dan komitmen/kepemilikan dari setiap mitra peserta terhadap tujuan-tujuan dampak

- Kapasitas dari setiap mitra untuk menjalankan kegiatan mereka yang telah direncanakan untuk dampak

2.4 Responsivitas GEDSI – 25%

2.4.1 Desain dan tujuan penelitian responsif GEDSI

- Artikulasi dari cara-cara bagaimana proyek akan menangani ketidaksetaraan dan memajukan kesetaraan gender, hak-hak disabilitas atau inklusi sosial melalui desain penelitian

2.4.2 Metode dan proses responsif GEDSI

- Tingkat keterlibatan dengan kelompok-kelompok GEDSI melalui beberapa tahap penelitian, termasuk desain bersama dan pertimbangan-pertimbangan konsultasi
- Mengidentifikasi metodologi inklusi yang sesuai.

2.4.3 Hasil dan strategi dampak responsif GEDSI

- Mengidentifikasi keluaran-keluaran dan hasil-hasil penelitian yang diusulkan yang sesuai, bermanfaat, dan relevan.

8.2. Pengisian permohonan Tahap 2 Anda

Permohonan hanya akan diterima melalui Sistem Informasi Manajemen BRIN-KONEKSI (KONEKSI MISI) dan sistem Pendanaan BRIN.

Permohonan terdiri dari beberapa komponen:

Organisasi utama Australia:

- **Proposal teknis:** Sebuah contoh menampilkan format permohonan untuk Tahap 2 Permohonan Hibah dapat ditemukan di [Lampiran 5](#); akan tetapi, Anda kan perlu mengisinya melalui KONEKSI MISI.
- **Rencana Kegiatan:** Sebuah format untuk menggambarkan rencana kegiatan Anda akan disediakan untuk pemohon yang diundang di KONEKSI MISI. Anda akan perlu mengunduh format tersebut, dan setelah mengisinya, berkas ini harus diunggah ke bagian yang relevan pada bagian permohonan daring Anda.
- **Proposal keuangan:** Sebuah format untuk menggambarkan anggaran untuk Permohonan Hibah Tahap 2 akan disediakan untuk pemohon yang diundang di KONEKSI MISI. Anda akan perlu mengunduh format tersebut, dan setelah mengisinya, berkas ini harus diunggah ke bagian yang relevan pada bagian permohonan daring Anda. Dokumen-dokumen pendukung untuk anggaran harus disimpan di *drive* pemohon dan BRIN-KONEKSI harus diberikan tautan untuk mengaksesnya.
- **Uji kelayakan:** Anda juga akan perlu menyelesaikan Penilaian Uji Kelayakan secara daring (universitas Australia, lembaga pemerintah Indonesia, universitas-universitas Indonesia yang diakui dan terdaftar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, dikecualikan dari mengisi formulir ini dengan memberikan konfirmasi dan pernyataan status lembaga mereka). Termasuk dalam uji ini adalah unsur keuangan dan anggaran.

Organisasi utama Indonesia:

- **Unggah permohonan Anda ke Sistem BRIN:** Baik proposal teknis dan anggaran **harus diunduh** dari KONEKSI MISI dan kemudian diunggah ke sistem Pendanaan BRIN.
- Peneliti utama Indonesia **harus mendaftarkan** alamat email dari semua peneliti Indonesia di dalam konsorsium penelitiannya. **Setiap peneliti harus mengkonfirmasi** keikutsertaan mereka di dalam proyek dengan mengikuti tautan yang disediakan pada sistem Pendanaan BRIN.

8.3. Penilaian permohonan hibah

Permohonan Hibah Tahap 2 akan diproses menggunakan dua alur penilaian secara sinkronis yang merefleksikan kategori kriteria penilaian hibah: satu alur untuk penilaian umum dan uji kelayakan, dan yang lainnya tentang manfaat (merit) dari penelitian. Keduanya akan digabungkan dan diurutkan oleh Sekretariat, yang akan mengembangkan rekomendasi. Lihat tabel di bawah.

Tabel 9: Penilaian gambaran umum permohonan hibah

Pernyataan Minat (Tahap 1)
Sekretariat akan melakukan penilaian setiap organisasi yang menyerahkan Pernyataan Minat. Sekretariat akan menolak atau menyetujui konsep proyek berdasarkan kriteria penilaian EOI.
Proposal Lengkap (Tahap 2)
LANGKAH 1: Sekretariat Melakukan penilaian umum atas proposal, dan anggaran, uji kelayakan, dan pemeriksaan keamanan.
LANGKAH 2: Penilaian ahli sejawat Penilaian sejawat ahli tentang komponen teknis dilakukan oleh para ahli penelitian dari Indonesia dan Australia. Mereka akan menilai proposal teknis dan anggaran berdasarkan kriteria penilaian. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dinilai.
Keputusan Hibah Berdasarkan hasil penilaian ahli sejawat, Sekretariat akan menyusun sebuah daftar proposal peringkat-peringkat teratas untuk diajukan ke Komite Teknis BRIN - DFAT untuk mendapatkan persetujuan. Jika tidak terdapat keberatan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia akan kemudian mengesahkan pendanaan dan prioritas hibah yang berhasil.

Komite Kepatuhan Sekretariat akan melakukan uji kelayakan dan penilaian risiko ketaatan dari setiap organisasi yang menyerahkan permohonan hibah. Permohonan yang tidak memenuhi kriteria penilaian akan dikeluarkan dari penilaian lebih jauh pada tahap ini di dalam proses.

Semua permohonan Tahap 2 yang memenuhi persyaratan penghalang di dalam kriteria penilaian akan dikaji oleh ahli akademis dengan keahlian disiplin yang relevan. Sekelompok ahli terlebih dahulu akan dikumpulkan terdiri dari akademisi Indonesia dan Australia yang sesuai dengan bidang yang relevan, termasuk dengan keahlian disiplin Keanekaragaman Hayati Laut, keahlian responsif GEDSI, dan keahlian negara Indonesia. Kemudian, para ahli yang relevan dari kelompok ini akan diidentifikasi untuk masing-masing proposal hibah dan dinominasikan untuk membentuk kelompok Penilai Sejawat Ahli spesifik untuk masing-masing permohonan.

Para ahli akan diminta untuk menggunakan keahlian akademis mereka untuk menilai permohonan hibah berdasarkan kriteria penilaian. Semua penilai akan dipersyaratkan untuk mematuhi Pedoman Penilai Sejawat Skema Hibah Kolaboratif Bersama BRIN-KONEKSI dan melewati proses Konflik Kepentingan.

Sekretariat kemudian akan melaporkan ke Komite Teknis BRIN - DFAT untuk penilaian tidak keberatan akan rekomendasi hibah. Komite ini akan terdiri dari perwakilan dari Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia.

DFAT dan BRIN kemudian akan menilai permohonan berdasarkan kebijakannya, menentukan pemohon yang berhasil dan membuat persetujuan akhir tentang permohonan hibah.

Undangan untuk para penilai ahli sejawat akan disediakan di situs BRIN dan KONEKSI yaitu <http://BRINKONEKSIJointCall> dan <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> dari 21 Juni hingga 26 Juli 2024.

8.4. Siapa yang akan menyetujui hibah?

Komite Teknis BRIN – DFAT sebagai pihak perwakilan yang kemudian akan mengambil keputusan akhir untuk menyetujui hibah berdasarkan rekomendasi dari Sekretariat.

Keputusan delegasi ini bersifat final dalam semua hal, termasuk:

- persetujuan hibah
- jumlah pendanaan hibah yang akan dianugerahkan.

Sekretariat memegang hak sepenuhnya untuk menawarkan yang kurang dibandingkan yang diinginkan pemohon. Pemohon dapat memilih untuk tidak melanjutkan dengan hibah yang ditawarkan ke mereka. Pemohon tidak dapat mengajukan banding atas keputusan akhir yang diambil oleh DFAT dan BRIN.

8.5. Pemberitahuan hasil Tahap 2 (permohonan hibah)

Anda akan diberitahukan akan hasil dari permohonan Anda secara tertulis melalui email.

Jika Anda berhasil, Anda juga akan diberitahukan tentang segala bentuk ketentuan khusus yang disematkan ke hibah.

9. Permohonan hibah yang berhasil

9.1. Perjanjian Hibah

Jika Anda berhasil:

- Organisasi Utama Australia akan melakukan perjanjian hibah dengan KONEKSI.
- Organisasi Utama Indonesia akan melakukan perjanjian hibah dengan BRIN.

Syarat dan ketentuan standar untuk perjanjian hibah akan berlaku dan tidak dapat diubah. Segala bentuk ketentuan tambahan yang dilampirkan ke hibah akan diidentifikasi di dalam penawaran hibah atau selama masa negosiasi perjanjian hibah.

Catatan: Sekretariat mempersyaratkan setiap mitra yang diusulkan di dalam proyek terpilih untuk menyerahkan sebuah surat niat untuk menjadi mitra sub kontrak dari Organisasi Utama. Surat ini merupakan salah satu persyaratan yang diharuskan untuk kontrak.

BRIN dan KONEKSI akan menegosiasikan persetujuan dengan pemohon yang berhasil pada November 2024. Jika terdapat penundaan yang tidak beralasan di dalam menyelesaikan perjanjian hibah, penawaran hibah akan ditarik, dan hibah akan dianugerahkan ke pemohon yang berbeda.

Ketika penerima hibah gagal memenuhi kewajiban dari perjanjian hibah, BRIN dan KONEKSI dapat menahan atau menanggukkan pendanaan kepada penerima hibah dan/atau mempersyaratkan penerima hibah untuk membayar kembali semua atau sebagian dari hibah. Tidak ada kompensasi yang harus dibayarkan untuk pemutusan dalam kondisi seperti ini.

Anda jangan membuat komitmen keuangan hingga perjanjian hibah telah dieksekusi oleh BRIN dan KONEKSI

9.2. Bagaimana hibah akan dibayarkan

Perjanjian hibah akan mencantumkan jumlah maksimum hibah yang akan dibayarkan.

BRIN dan KONEKSI akan memberikan pembayaran awal pengeksekusian perjanjian hibah setelah menerima faktur (*invoice*) yang valid. Kami akan melakukan pembayaran-pembayaran berikutnya, yang dijelaskan di dalam perjanjian hibah, secara bertahap berdasarkan laporan interim Anda, termasuk pelunasan akhir, dan berdasarkan penerimaan faktur yang sah.

Hibah akan dianugerahkan dalam mata uang yang tercantum dalam anggaran (baik Dolar Australia atau Rupiah). Anda bertanggungjawab atas segala bentuk perbedaan keuangan yang mungkin terjadi sejak saat penyerahan permohonan hingga saat proyek sedang berlangsung, karena adanya fluktuasi nilai tukar.

9.3. Variasi perjanjian hibah

Kami menyadari kejadian-kejadian tidak diinginkan dapat mempengaruhi perkembangan proyek. Dalam hal seperti ini, Anda dapat mengajukan variasi proyek, antara lain:

- perubahan tonggak pencapaian proyek tapi konsisten dengan tujuan awal proyek
- perpanjangan kerangka waktu yang wajar untuk penyelesaian proyek.

Skema Hibah Kolaboratif Bersama BRIN-KONEKSI tidak memperbolehkan peningkatan terhadap jumlah dana hibah yang telah disetujui

Jika Anda ingin mengusulkan perubahan pada perjanjian hibah, Anda harus melakukannya dalam bentuk tertulis sebelum tanggal berakhirnya perjanjian hibah. Hubungi Sekretariat untuk informasi di cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id untuk informasi lebih lanjut. Sekretariat tidak akan mempertimbangkan perubahan setelah tanggal berakhirnya perjanjian hibah.

Anda tidak dapat berasumsi bahwa permohonan variasi akan berhasil. Sekretariat akan mempertimbangkan permintaan Anda berdasarkan faktor-faktor seperti:

- bagaimana variasi ini akan mempengaruhi hasil-hasil proyek
- konsistensi terhadap tujuan kebijakan keanekaragaman hayati dan segala kebijakan terkait dari departemen
- perubahan waktu pembayaran hibah
- ketersediaan dana program.

9.4. Pengumuman hibah publik

Jika berhasil, hibah Anda akan dimasukkan ke dalam situs KONEKSI dan BRIN dalam waktu 21 hari dari tanggal mulai berlaku.

9.5. Umpan Balik

Jika Anda tidak berhasil, Anda dapat meminta umpan balik dari Sekretariat dalam waktu satu bulan setelah diberitahukan akan hasilnya. Sekretariat akan memberikan umpan balik dalam bentuk tertulis dalam waktu 3 bulan umpan balik dimintakan.

10. Mempersiapkan Mulainya Hibah Anda

10.1. Pemberian dalam Jumlah Tetap (*Fixed Amount Awards*)

Skema BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama mengadopsi pendekatan *Fixed Amount Awards* (FAA) terhadap penyaluran pembayaran hibah. Berdasarkan pendekatan ini, pembayaran bertahap akan dilakukan berdasarkan persetujuan atas 'pencapaian' – atau pelaksanaan yang telah disepakati antara KONEKSI dan BRIN dengan setiap penerima hibah. Ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar bagi

mitra di dalam mengelola hibah menggunakan mekanisme keuangan internal mereka sendiri berdasarkan standar akunting yang dapat diaudit dan menghindari membebani mereka secara berlebihan dengan pelaporan keuangan yang mendetail.

FAA berfokus terutama pada keluaran (*output*) dan hasil, di mana nilai hibah kepada organisasi penerima (penerima hibah) didasarkan pada jumlah tetap yang telah disepakati dan pembayaran tidak didasarkan pada biaya yang sebenarnya yang dibebankan ke penerima hibah. Akuntabilitas penerima hibah utamanya berdasarkan pada kinerja dan hasil.

FAA sesuai digunakan ketika pekerjaan yang akan dilakukan dapat dinilai dengan tingkat kepastian tertentu. Contoh mekanisme yang tepat untuk menentukan nilai yang sesuai mencakup pengalaman entitas dengan jenis pekerjaan serupa untuk hasil dan biaya yang dapat diprediksi dengan andal, atau entitas dapat dengan mudah mendapatkan estimasi harga (contoh, melalui lelang, penawaran, katalog) untuk unsur-unsur biaya yang signifikan.

Karakteristik FAA antara lain adalah:

- **Jumlah ditentukan sebelumnya:** hibah menyebutkan jumlah tetap dari uang yang akan disediakan untuk penerima hibah. Jumlah ini ditentukan selama proses permohonan hibah dan disepakati oleh BRIN-KONEKSI dan penerima hibah.
- Penerima hibah dibayarkan jumlah yang tepat seperti dinyatakan saat mencapai pencapaian, tanpa melihat apakah mereka mengeluarkan lebih atau kurang untuk menyelesaikannya.
- Pembayaran dilakukan berdasarkan pencapaian yang memuaskan. Verifikasi biaya yang sebenarnya bukan menjadi persyaratan bagi pembayaran dan laporan keuangan tidak diperlukan.
- **Keluwesan anggaran:** penerima hibah memegang kebijaksanaan sendiri untuk mengalokasikan ulang secara wajar dana hibah selama pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan proyek, selama tujuan program secara keseluruhan dapat diwujudkan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.

Proses

- **Penetapan Anggaran Hibah:** Anggaran hibah yang diusulkan haruslah ditetapkan sebagai hal yang adil dan wajar. Ini melibatkan sebuah kajian dan analisis usulan anggaran yang menyeluruh.
- **Pemastian Jumlah Hibah:** Setelah anggaran hibah telah disetujui, jumlah yang dianugerahkan sudah pasti. Jumlah ini kemudian dialokasikan ke berbagai pencapaian proyek.
- **Pengalokasian Pembayaran Pencapaian:** Pembayaran pencapaian adalah jumlah yang telah ditentukan/ditulis sebelumnya yang sudah pasti untuk setiap pencapaian. Jumlah ini akan tetap sama tanpa memandang biaya sebenarnya yang dikeluarkan untuk mewujudkan pencapaian tersebut.
- **Jumlah Hibah telah Ditentukan:** Karena jumlah hibah telah ditentukan, maka pelaporan biaya atas pengeluaran yang sebenarnya tidaklah diperlukan.

Implikasi bagi Pelaporan Keuangan, Anggaran, dan Penyaluran

Pelaporan Keuangan:

- Penyerahan sebuah laporan keuangan dengan perincian biaya per item, lengkap dengan tanda terima pengeluaran, tidak menjadi persyaratan bagi pembayaran hibah dan tidak dipersyaratkan untuk diserahkan ke KONEKSI.
- Penerima hibah BRIN-KONEKSI diharuskan untuk merekam semua transaksi keuangan hibah dan menyusun sebuah laporan keuangan sesuai dengan persyaratan dan praktik yang ada di lembaga mereka. KONEKSI dan BRIN berhak menentukan untuk mengkaji laporan tersebut ketika diminta.

- Para Penerima hibah BRIN-KONEKSI secara efektif mengelola alokasi hibah untuk memastikan bahwa jumlah hibah yang telah ditentukan sebelumnya ini menutupi biaya-biaya yang diperlukan untuk mewujudkan pencapaian.

Anggaran:

- Mekanisme FAA memberikan keleluasaan yang sesuai bagi penerima hibah untuk mengalokasikan ulang dana di antara kategori-kategori anggaran, selama total anggaran yang disetujui dan tujuan-tujuan serta keluaran-keluaran (*outputs*) tetap tidak berubah.

Pencairan:

- Penerima hibah diharuskan untuk mematuhi kebijakan dan prosedur lembaga mereka sendiri di dalam pencairan dana hibah.
- Mekanisme FAA memberikan keleluasaan yang sesuai kepada penerima hibah untuk mencairkan pembayaran untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya yang muncul selama pelaksanaan proyek. Akan tetapi, jika biaya sebenarnya melebihi jumlah hibah, penerima hibah akan bertanggungjawab untuk menutupi biaya tambahan ini.
- Keleluasaan ini tidak termasuk pembayaran yang ditujukan untuk biaya-biaya yang tidak diizinkan, seperti dijabarkan di Pedoman Keuangan Skema Hibah Kolaboratif Bersama BRIN-KONEKSI

10.2. Melibatkan mitra

Organisasi Utama bertanggungjawab untuk melibatkan secara hukum semua mitra, sebagai sebuah organisasi. Keterlibatan dapat berupa sub kontrak dengan sebuah organisasi mitra. Organisasi Utama yang memegang akuntabilitas untuk melakukan uji kelayakan atas semua mitra. Organisasi Utama direkomendasikan untuk melakukan uji kelayakan kepada semua mitranya.

10.3. Asuransi ganti rugi

Untuk Organisasi Utama Australia, di saat Anda mempersiapkan kemitraan Anda, direkomendasikan untuk Anda memahami persyaratan bagi organisasi Anda akan asuransi ganti rugi profesional. Sebagai contoh, beberapa universitas Australia mengharuskan para individunya untuk memiliki status hukum atau asuransi ganti rugi profesional. Beberapa asosiasi profesional Australia memberikan cakupan ganti rugi. Silakan lihat di bawah sumber tentang Asuransi Ganti Rugi Profesional <https://www.acs.org.au/professionalrecognition/ict-liability-insurance.html>, yang meliputi:

- Ganti Rugi Profesional (Asuransi Kesalahan & Penghilangan Tanggung Jawab) – \$10 juta
- Tanggung Jawab Publik & Tanggung Jawab Produk (Asuransi Tanggung Jawab Gabungan Umum) – \$20 juta

10.4. Gambaran Umum proses etika/perizinan

Semua BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama diharuskan untuk mendapatkan izin etika dan perizinan penelitian. Ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia (termasuk mereka yang dipekerjakan oleh lembaga Indonesia dan lembaga Australia). Etika dan perizinan ini merupakan satu proses yang dikelola oleh BRIN. Izin etika dikeluarkan oleh BRIN atas basis sebuah proyek penelitian. Perizinan penelitian dikeluarkan kepada individu yang terdaftar di proyek. Warga negara Indonesia diharuskan untuk menyerahkan izin etikanya (tidak akan dikeluarkan bersamaan dengan perizinan). Semua penerima hibah harus mengikuti peraturan izin etika BRIN (<https://klirenetik.brin.go.id/berkas-digital>), termasuk persyaratan terkait data dan keluaran-keluarannya.

Proyek penelitian yang berhasil didorong untuk menggunakan layanan dipercepat dari Sekretariat untuk mendapatkan perizinan penelitian agar dapat memulai penelitian Anda tepat waktu.

Catatan: Ada biaya terkait dengan perizinan penelitian ini. Proyek yang mengikutsertakan Organisasi Penelitian BRIN sebagai anggota konsorsiumnya dapat memohonkan pembebasan atas biaya ini.

11. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan hibah

11.1. Tanggung Jawab Anda

Jika ada menerima hibah, Anda harus menyerahkan sebuah laporan kegiatan hibah sesuai dengan kerangka waktu yang ada di perjanjian hibah. Contoh format dari laporan ini akan disediakan oleh Sekretariat. Sekretariat akan mengharapkan Anda melaporkan tentang:

- Perkembangan terhadap pencapaian proyek yang telah disepakati, termasuk GEDSI, seperti yang tercantum di dalam perjanjian hibah Anda
- perkembangan terhadap pendalaman hubungan secara aktif dan perkembangan proyek Anda
- kontribusi para peserta secara langsung yang terkait proyek
- keterlibatan para pemangku kepentingan.

Anda juga akan bertanggungjawab untuk:

- memenuhi syarat dan ketentuan dari perjanjian hibah dan mengelola serta mempromosikan kegiatan secara efisien dan efektif
- taat terhadap persyaratan-persyaratan penyimpanan catatan, pelaporan, dan pembebasan seperti yang dijabarkan di perjanjian hibah
- semua pengaturan administrasi terkait dengan proyek termasuk pengaturan visa dan perjalanan, biaya visa, pajak bandara, transportasi darat, asuransi perjalanan dan kesehatan bagi peserta proyek dengan asuransi kesehatan dan rumah sakit yang meliputi untuk luar negeri dan di Australia bagi pengunjung yang bukan bagian dari *Medicare* (termasuk biaya evakuasi dan kematian) dan asuransi yang diperlukan bagi peralatan dan biaya akomodasi serta pengaturannya
- asuransi lainnya, termasuk kompensasi pekerja, sesuai yang dipersyaratkan oleh UU dan ganti rugi profesional, asuransi kesehatan dan tanggung jawab publik, sesuai dengan persyaratan proyek
- mematuhi semua perundang-undangan nasional dan internasional yang berlaku.

11.2. Tanggung Jawab Sekretariat

Sekretariat akan:

- memenuhi syarat dan ketentuan yang disebutkan di dalam perjanjian hibah
- menyediakan administrasi hibah tepat waktu
- mengevaluasi kinerja penerima hibah
- menyediakan dukungan teknis terkait permasalahan kemitraan, dampak dan GEDSI.

Sekretariat akan memonitor perkembangan proyek Anda dengan menilai laporan-laporan yang diserahkan Organisasi Utama, mungkin menghadiri acara-acara proyek dan melakukan kunjungan lokasi untuk mengkonfirmasi detail dari laporan jika diperlukan. Sesekali Sekretariat mungkin perlu memeriksa kembali klaim yang diberikan, atau mengajukan audit independen atas klaim dan pembayaran yang dilakukan.

Pendanaan yang dianugerahkan oleh Sekretariat kepada organisasi Anda tidak berarti bahwa *Department of Foreign Affairs and Trade* dan BRIN mendukung pandangan penerima hibah yang terlibat di dalam kegiatan pendanaan.

11.3. Persyaratan Pelaporan dan Keluaran BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama

Tujuan utama dari BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama adalah untuk mendanai penelitian. Sekretariat bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan pelaporannya. Proses kemitraan dan pengalaman dalam menyusun dan melaksanakan penelitian serta pelaksanaan penelitian dan berbagi hasil penelitian adalah hal-hal yang menjadi perhatian Sekretariat. Siklus hibah dimulai ketika

Organisasi Utama menandatangani perjanjian hibah. Di bawah adalah gambaran umum singkat tentang persyaratan dan tanggung jawab:

Tabel 10: Persyaratan pelaporan

Persyaratan	Jatuh Tempo	Pihak yang Bertanggungjawab
Perkembangan Terkini per Kuartal	Akhir dari kuartal tahun pertama dan setiap kuartal selama masa hibah	Organisasi Utama Australia berkolaborasi dengan Organisasi Utama Indonesia dan para mitra
Rencana Kemitraan	Akhir dari Kuartal Pertama tahun Pertama	Organisasi Utama Australia berkolaborasi dengan Organisasi Utama Indonesia dan para mitra
Pemeriksaan Kesehatan Kemitraan	Pada bulan pertama dan setiap bulan ke 10 setelahnya	Organisasi Utama Australia dan Indonesia, dan setiap mitra di dalam kemitraan penelitian
Laporan Keuangan BRIN	Sebelum meminta pembayaran cicilan	Organisasi Utama Indonesia harus melaporkan keuangannya secara eksklusif untuk hibah BRIN yang telah disetujui. Pelaporan keuangan untuk organisasi Utama Australia tidak diperlukan di bawah Hibah KONEKSI ini
Laporan akhir keuangan BRIN	Pada akhir masa periode penelitian	Organisasi Utama Indonesia
Laporan akhir BRIN	Empat Belas (14) hari sebelum berakhirnya Hibah.	Organisasi Utama Indonesia

Keluaran yang harus dihasilkan oleh Organisasi Utama Indonesia, atas ketentuan Pemerintah Indonesia:

1. Ketua periset memiliki 2 (dua) publikasi yang ditulis bersama mitra riset sebagai 1st author (penulis pertama) dan/ atau corresponding author yang diterima (*accepted*) pada jurnal ilmiah internasional bereputasi menengah atau tinggi; dan/ atau
2. Kekayaan Intelektual dengan status minimal terdaftar; dan
3. Komitmen industri yang dituangkan dalam surat pernyataan kesediaan (*Letter of Intent*) mengembangkan produk riset menuju komersialisasi

11.3.1. Laporan Perkembangan per Kuartal KONEKSI

Laporan pembaruan perkembangan per Kuartal KONEKSI diharuskan bagi Organisasi Utama Australia yang berkolaborasi dengan Organisasi Utama dan mitra-mitra Indonesia.

Laporan perkembangan per Kuartal KONEKSI ditujukan untuk memberikan informasi tepat waktu akan perkembangan kegiatan, risiko-risiko penelitian, keluaran-keluaran kunci, dan ‘jangkauan’ dari masing-masing keluaran di antara ‘pengguna pengetahuan’ – perantara, pembuat kebijakan, kelompok-kelompok industri atau jejaring dan koalisi. Melacak ‘jangkauan’ atau ‘keterlibatan’ dengan para pelaku ini merupakan yang sangat penting guna memahami sebaik apa posisi sebuah penelitian

kolaboratif untuk mempengaruhi kebijakan (K2P) atau praktik inovatif (K2I). 5 pertanyaan pemantauan berikut akan dijawab selama proses pelaksanaan hibah:

- Apakah kita melakukan apa yang diharapkan?
- Tantangan apa yang mempengaruhi proyek penelitian kita?
- Bagaimana kita bekerja sama?
- Bagaimana kita melibatkan para pemangku kepentingan terkait, jejaring, dan potensi pengguna dari kegiatan-kegiatan penelitian kita?
- Tanda-tanda penyerapan, penggunaan, dan pengaruh apa yang telah kita lihat?

11.3.2. Rencana Kemitraan KONEKSI

Rencana Kemitraan KONEKSI diharuskan bagi Organisasi Utama Australia yang berkolaborasi dengan Organisasi Utama dan mitra-mitra Indonesia.

Rencana Kemitraan KONEKSI mendorong para mitra untuk mempertimbangkan bagaimana mereka akan menangani permasalahan yang ada di setiap pilar rencana kemitraan, dan indikator apa yang akan dikembangkan tim proyek untuk mengukur keberhasilan kegiatan dan keterlibatan tim. Dalam kuartal pertama dari hibah yang berhasil, rencana ini sudah dibuat secara bersama dengan semua mitra dan disesuaikan secara khusus untuk memastikan keberhasilan proyek penelitian. Serangkaian pertanyaan dikembangkan oleh Sekretariat untuk memandu proses ini seperti yang dijelaskan di bagian [6.2 Rencana Kemitraan](#). Sekretariat akan memberikan sesi-sesi informatif dan lokakarya-lokakarya untuk mendukung pengembangan Rencana Kemitraan ini dalam kuartal pertama masa hibah.

11.3.3. Pemeriksaan Kesehatan Kemitraan

Pemeriksaan Kesehatan Kemitraan dipersyaratkan dari organisasi-organisasi utama Australia dan Indonesia, serta dari para mitra di kemitraan penelitian.

Sebuah daftar periksa di [Lampiran 6 – Pemeriksaan Kesehatan Kemitraan](#) disusun berdasarkan 4 pilar kunci kemitraan: Konteks, Hubungan, Sumber Daya dan Proses Kerja untuk diisikan oleh setiap mitra di dalam kemitraan penelitian.

11.3.4. Laporan Keuangan BRIN

Organisasi utama Indonesia harus memberikan laporan keuangan secara eksklusif hanya untuk hibah yang disetujui dari BRIN. Pelaporan keuangan untuk organisasi mitra Australia di bawah KONEKSI tidaklah diperlukan. Sebuah laporan keuangan yang menunjukkan **setidaknya 80% dari hibah** telah digunakan menjadi persyaratan bagi organisasi utama Indonesia **untuk memohon cicilan pembayaran berikutnya**.

11.3.5. Laporan Akhir Keuangan BRIN

Sebuah laporan akhir keuangan menunjukkan bagaimana hibah BRIN telah digunakan akan diserahkan oleh organisasi utama Indonesia pada akhir periode penelitian.

11.3.6. Laporan Akhir BRIN

Sebuah laporan akhir proyek penelitian akan diserahkan oleh organisasi utama Indonesia 14 hari sebelum akhir dari periode penelitian yang telah ditentukan. Semua keluaran yang dihasilkan dari proyek harus memasukkan logo BRIN dan LPDP. Penggunaan logo KONEKSI harus mengikuti Pedoman KONEKSI.

12. Kejujuran

Sekretariat akan memastikan bahwa proses hibah adil, sesuai dengan pedoman yang telah diterbitkan, memasukkan pengaman-pengaman yang terhadap penipuan, kegiatan yang melanggar hukum dan perlakuan lainnya yang tidak pantas.

Catatan: Sekretariat memegang hak untuk merevisi Pedoman BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama. Ketika ini terlaksana, pedoman yang telah direvisi tersebut akan diterbitkan di situs KONEKSI dan BRIN.

12.1. Keluhan dan proses umpan balik pemohon

Sekretariat akan menampilkan semua pertanyaan yang disampaikan ke Sekretariat ke halaman *Frequently Asked Questions* (Pertanyaan yang sering ditanyakan) di situs KONEKSI.

Semua keluhan tentang proses hibah harus disampaikan secara tertulis kepada cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id.

Sekretariat tidak akan memberikan umpan balik kepada pemohon yang tidak berhasil pada tahap Eol.

Sekretariat hanya akan memberikan umpan balik kepada pemohon hibah yang tidak berhasil di Tahap 2 yang mengajukan permintaan umpan balik. Terdapat 3 komponen umpan balik, diberi nilai untuk membantu pemohon untuk mengidentifikasi posisinya permohonannya secara keseluruhan. Sekretariat akan memberikan umpan balik yang diajukan dalam waktu 3 bulan sejak adanya email permohonan.

Tabel di bawah memberikan contoh umpan balik yang diberikan Sekretariat dari penilaian peninjau sejawat untuk sebuah proposal penelitian. Sekretariat akan memberikan informasi tentang rangking kuartil dari setiap kriteria. Kuartil satu merujuk ke 75–100% dari permohonan yang tidak berhasil, yang kedua merujuk ke 50–75% dari permohonan yang tidak berhasil, ketiga merujuk ke 25–50% dari permohonan yang tidak berhasil dan yang keempat merujuk ke 25% teratas dari permohonan yang tidak berhasil. Informasi ini didasarkan dari formulir nilai penilaian rekan sejawat ahli.

Tabel 11: Contoh Umpan Balik Sekretariat

Judul Proposal	Penelitian ABC				
Pemohon	Dr XYZ		Email:		
Kriteria Penilaian	Pilihan Topik dan Mutu Proyek	Kemitraan yang Diusulkan	Strategi Dampak	Daya Tanggap GEDSI	Nilai Keseluruhan
Nilai 1					
Nilai 2					
Rangking Keseluruhan	Kuartil keempat dari permohonan yang tidak berhasil dalam putaran skema				

12.2. Konflik Kepentingan

Bentuk konflik kepentingan apa pun dapat mempengaruhi kinerja hibah. Mungkin akan ada konflik kepentingan, atau dianggap sebagai konflik kepentingan, jika Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Pemerintah Indonesia, atau siapa saja anggota komite penilaian dan/atau Anda atau staf Anda:

- memiliki hubungan profesional, komersial, atau pribadi dengan pihak yang dapat mempengaruhi proses pemilihan permohonan, seperti misalnya seorang pegawai negeri Australia atau Indonesia
- memiliki hubungan dengan sebuah organisasi yang mungkin ikut campur atau membatasi pemohon untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan adil dan independen, atau
- memiliki hubungan dengan, kepentingan dalam, sebuah organisasi yang mana ia akan menerima keuntungan pribadi jika organisasi tersebut mendapatkan pendanaan di bawah hibah keanekaragaman hayati ini.

Anda akan diminta untuk mendeklarasikan, sebagai bagian dari permohonan Anda, segala bentuk atau yang dianggap bentuk konflik kepentingan atau yang, sejauh sepengetahuan Anda, memang tidak ada konflik kepentingan.

Jika Anda kemudian mengidentifikasi terdapat konflik kepentingan atau potensi untuk itu atau yang mungkin muncul terkait dengan sebuah permohonan hibah, Anda harus menginformasikan BRIN-KONEKSI secara tertulis segera. Anggota komite dan pejabat lainnya termasuk pengambil keputusan juga harus mendeklarasikan segala bentuk konflik kepentingan.

Lampiran

Lampiran 1 – Peta Topik

BRIN-KONEKSI PANGGILAN BERSAMA

Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024

Peta topik berikut mengidentifikasi topik-topik prioritas bagi Pemerintah Indonesia terkait permasalahan bioekonomi. Hanya topik-topik yang masuk ke dalam kategori-kategori ini yang akan memenuhi persyaratan. Fokus penelitian memberikan contoh akan jenis penelitian yang akan didanai. Keselarasan yang kuat dengan contoh fokus penelitian direkomendasikan.

KONEKSI-BRIN menyambut permohonan-permohonan proyek penelitian di bidang-bidang berikut:

Topik	Contoh fokus penelitian
Penggunaan keanekaragaman hayati untuk pangan	<ul style="list-style-type: none">• Penelitian untuk mengidentifikasi dan mengembangkan teknologi dan praktik untuk mendapatkan produk-produk laut untuk dikembangkan sebagai sumber daya makanan yang berkelanjutan dan menilai dampak dan mekanisme atau penggunaan sumber daya terhadap masyarakat dan ekosistem• Penelitian untuk mengidentifikasi dan mengembangkan teknologi berkelanjutan bagi pengolahan potensi keanekaragaman hayati laut untuk pangan• Penelitian untuk mengidentifikasi dan mengembangkan teknologi untuk pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian makanan yang berkelanjutan dengan menggunakan bahan-bahan dari keanekaragaman hayati laut• Penelitian untuk mengidentifikasi dan mengembangkan optimasi teknologi dan data untuk mendukung ketahanan dan ketangguhan pangan melalui penggunaan keanekaragaman hayati laut
Penggunaan keanekaragaman hayati untuk kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Penelitian untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi dan mengembangkan potensi senyawa pada biota laut bagi pengembangan obat-obatan dan dampak keberlanjutannya bagi masyarakat dan ekosistem• Penelitian untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi dan menggunakan keanekaragaman hayati laut bagi pengembangan vaksin dan untuk beragam penyakit, seperti penyakit menular, kanker dan penyakit degeneratif
Penggunaan keanekaragaman hayati untuk energi	<ul style="list-style-type: none">• Penelitian untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi dan menggunakan biota laut (mikro alga, makro alga, plankton, phytoplankton) untuk menghasilkan bahan bakar bio (biodiesel dan bioethanol), biogas, hidrogen dan bioremediasi laut serta dampak keberlanjutannya bagi masyarakat dan ekosistem• Penelitian untuk teknologi <i>monitoring</i> dan pengawasan untuk menguji kelayakan energi terbarukan yang didapatkan dari keanekaragaman hayati laut di daerah perdesaan dan terpencil

Lampiran 2 – Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)¹⁵

TKT 1	Riset Dasar. Riset keilmuan awal telah dilakukan dan dilaporkan. Prinsip telah dipostulasikan dan diamati secara kualitatif. Fokus kepada penemuan baru dan bukan penerapan. Catatan: Skema hibah kolaborasi ini tidak mendanai hal ini.
TKT 2	Riset Dasar. Formulasi konsep dan/atau penerapan formulasi. Penerapan praktis awal diidentifikasi. Potensi materi atau proses untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan atau mendapatkan penerapannya dikonfirmasi. Catatan: Skema hibah kolaborasi ini tidak mendanai hal ini.
TKT 3	Riset Dasar. Fungsi Penting atau Pembuktian Konsep Dilakukan. Maju ke riset terapan dan pengembangan tahap awalnya dimulai. Studi dan pengukuran laboratorium memvalidasi prediksi analisis dari berbagai unsur dari teknologi. Catatan: Skema hibah kolaborasi ini tidak mendanai hal ini
TKT 4	Riset Terapan. Testing / Validasi Komponen/Proses Prototipe Alfa dalam Laboratorium: Desain, pengembangan, dan pengujian laboratorium akan komponen/proses. Hasil memberikan bukti bahwa sasaran kinerja mungkin bisa didapatkan berdasarkan sistem proyek atau dimodelkan.
TKT 5	Riset Terapan. Validasi proses dari komponen dan/atau sub sistem terwujud di dalam lingkungan yang relevan.
TKT 6	Riset Terapan. Demonstrasi prototipe sistem/proses di dalam lingkungan yang relevan (tingkat sistem prototipe beta).
TKT 7	Riset Pengembangan. Sistem prototipe diverifikasi: demonstrasi prototipe sistem/proses di lingkungan operasional (tingkat sistem prototipe beta).
TKT 8	Riset Pengembangan. Sistem dimasukkan ke Desain Komersial: sistem/proses yang sebenarnya lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi (demonstrasi pra komersial).
TKT 9	Riset Pengembangan. Sistem terbukti dan siap untuk Pengembangan Komersial Sepenuhnya: Sistem yang sebenarnya terbukti melalui keberhasilan penggunaan di lingkungan operasional dan siap untuk digunakan secara komersial sepenuhnya.

¹⁵ Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi

Lampiran 3 – Penilaian Uji Kelayakan

Kedua Organisasi Utama (dari Australia **dan** Indonesia) diharuskan untuk menyerahkan penilaian uji kelayakan ini di Tahap 2 (proposal lengkap)

Penafian atau *Disclaimer*

Jika organisasi Anda adalah sebuah lembaga pendidikan Australia, perguruan tinggi Indonesia (diakui dan terdaftar pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), dan insitusi pemerintah Indonesia, Anda dikecualikan dari proses uji kelayakan Sekretariat. Untuk mengkonfirmasi status organisasi Anda sebagai Lembaga Pendidikan Australia, perguruan tinggi Indonesia (diakui dan terdaftar pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), dan insitusi pemerintah Indonesia, silakan beri tanda centang di kotak di bawah, cukup isi Indikator Nomor 1 untuk memastikan organisasi/lembaga Anda terdaftar di daftar penyedia pendidikan tinggi Australia dan menandatangani bagian pernyataan di bawah dari formulir ini.

Nama resmi Organisasi Utama:	
Organisasi-Organisasi Mitra:	
Judul Penelitian:	
Periode Hibah:	
Lokasi Penelitian:	

Organisasi / lembaga kami terdaftar dan tunduk terhadap mekanisme-mekanisme standar dan akuntabilitas ketaatan kebijakan Australia dan Indonesia.

No.	Indikator	Respons Pemohon	Bukti/Dokumen Pendukung
1	<p>Pendaftaran hukum organisasi</p> <p>Sekretariat mengharuskan hal ini untuk memverifikasi legitimasi Pemohon</p> <p>Jika organisasi/lembaga Anda adalah sebuah lembaga pendidikan Australia, mohon konfirmasi apabilatelaherdaftar di Registrasi Nasional Instansi Mutu dan Standar Pendidikan Tersier (teqsa.gov.au)</p>	<p>Mohon berikan jawaban yang mendetail dan menyeluruh untuk setiap indikator. Ini akan memungkinkan Sekretariat untuk menilai kapasitas organisasi Anda sepenuhnya dalam mengelola hibah dan memberikan kami kepercayaan tentang risiko-risiko terkait dengan kemitraan dengan organisasi Anda. Jika Anda hanya memberi jawaban 'Ya' atau 'Tidak' tanpa penjelasan lebih lanjut, maka ini dianggap tidak memadai, dan Sekretariat dapat melihat organisasi Anda sebagai risiko tinggi untuk kemitraan</p>	<p>Mohon berikan dokumentasi pendukung atau tautan untuk informasi yang dapat mendukung jawaban Anda</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendaftaran lembaga dari badan pemerintah / akreditasi yang relevan Jika organisasi beroperasi di Australia, informasi pendaftaran seperti <i>Australian Business Number (ABN)</i>, <i>Australian Company Number (ACN)</i>, <i>Indigenous Corporation Number (ICN)</i>, atau perincian pendaftaran Badan Amal dan Nirlaba Australia Nomor Pokok Wajib Pajak
2	<p>Alamat fisik dan situs internet resmi</p> <p>Sekretariat mengharuskan penentuan keberadaan Pemohon dengan mendapatkan alamat fisiknya serta situs internet resminya yang menjadi sumber informasi primer tentang organisasi. Ini memungkinkan Sekretariat untuk menilai keselarasan organisasi dengan tujuan-tujuan Sekretariat dan mendapatkan wawasan tentang transparansi dan komitmennya terhadap pelibatan publik</p>		<ol style="list-style-type: none"> Alat fisik sekarang ini Situs Internet resmi
3	<p>Pengalaman organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Segala bentuk informasi kinerja terkini dan relevan (contoh, evaluasi dan kajian eksternal atau independen atau referensi dari profesional) Daftar kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek terkini yang mendemonstrasikan kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi lainnya atau detail tentang pengaturan-pengaturan sub-hibah 		<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi independen atau surat referensi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Surat ini harus memverifikasi pekerjaan atau hibah yang pernah dilakukan sebelumnya. Daftar kegiatan atau tautan ke publikasi tentang proyek-proyek sebelumnya

4	<p>Dokumen dan pelaksanaan kebijakan organisasi yang relevan</p> <p>Sekretariat diharuskan untuk memastikan bahwa dana hibah yang diberikan ke organisasi yang mendemonstrasikan tata kelola yang kuat, perilaku beretika, dan komitmen untuk mencegah penipuan dan korupsi yang sejalan dengan misi dan nilai-nilai DFAT dan BRIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah organisasi memiliki dokumen-dokumen berikut: Kebijakan Administrasi Umum, Kebijakan Akuntansi dan Keuangan, Kebijakan Pengadaan, Kode Perilaku, Kebijakan Pengendalian Penipuan, Kebijakan Anti Korupsi dan Suap, dan Kebijakan Konflik Kepentingan? • Apakah kepemimpinan senior, termasuk dewan pimpinan, mendemonstrasikan komitmen terhadap kebijakan-kebijakan ini melalui menaati dan mempromosikannya? • Apakah dokumen-dokumen kebijakan ini dengan mudah dapat diakses semua pegawai? • Apakah dokumen-dokumen kebijakan ini secara berkala dikaji dan diperbaharui untuk memastikan kejelasan dan relevansinya? • Apakah para pegawai, termasuk dewan pimpinan, mengakui pemahaman dan komitmen mereka untuk menaati kebijakan-kebijakan ini? • Apakah organisasi melakukan sesi-sesi pelatihan dan program orientasi secara teratur untuk memastikan para pegawai memahami kebijakan-kebijakan ini? • Apakah organisasi mengirimkan pengingat secara teratur dan hal terkini tentang kebijakan-kebijakan ini agar para pegawai tetap mendapatkan informasinya? 		<ul style="list-style-type: none"> a. Salinan atau tautan ke kebijakan-kebijakan yang relevan atau SOP proses usaha b. Salinan atau tautan ke formulir pengakuan atau persetujuan dari pegawai dan dewan pimpinan mengindikasikan komitmen mereka untuk menaati kebijakan c. Salinan atau tautan ke bahan dan isi pelatihan (bukti bahwa pelatihan telah dilakukan)
5	<p>Pengaturan audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah organisasi tunduk untuk diaudit dan seberapa sering? • Siapa yang melakukan audit dan apa hasil audit dari tiga (3) tahun terakhir? • Seberapa sering pihak manajemen mengikuti temuan-temuan audit? 		<ul style="list-style-type: none"> a. Salinan atau tautan ke laporan audit selama 3 tahun terakhir

6	<p>Praktik manajemen keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang menyusun, mengkaji dan menyetujui anggaran? • Bagaimana anggaran digunakan untuk mendukung perencanaan, penilaian/<i>monitoring</i> kinerja dan pengambilan keputusan? • Siapa yang memiliki otoritas untuk memerintahkan pembayaran? • Siapa yang melakukan fungsi pembukuan dan akuntansi dan siapa yang mengkaji ulangnya? • Apakah fungsi akuntansi dan keuangan dilakukan berbagi dengan yang lain? • Bagaimana organisasi melakukan pembayaran (tunai, transfer uang, dll.)? • Apa Anda menggunakan sistem akuntansi terkomputer untuk mencatat transaksi keuangan dan membuat laporan? • Bagaimana dokumen akuntansi dan keuangan disimpan dan diamankan dan berapa lama disimpan/dipertahankan? 		<p>a. Salinan atau tautan ke SOP proses kebijakan atau usaha terkait yang berhubungan dengan praktik-praktik manajemen keuangan</p>
7	<p>Penipuan dan korupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika ada, detail tentang investigasi-investigasi terkait penipuan atau korupsi sekarang atau belum lama (2 tahun terakhir) yang dilakukan organisasi eksternal atau entitas lain yang terkait • Apakah organisasi menandatangani pernyataan untuk menyatakan komitmen dan menerima tanggung jawab untuk tidak mengizinkan penipuan dan korupsi? • Apa organisasi menyediakan program pelatihan dan kesadaran tentang pencegahan penipuan dan korupsi? • Apakah organisasi memiliki sebuah mekanisme perlindungan pelapor? 		<p>a. Identifikasi kasus penipuan atau korupsi apa pun yang pernah terjadi sebelum ini dan penyelesaiannya (jika ada)</p> <p>b. Salinan atau tautan ke kebijakan dan prosedur anti penipuan</p>
8	<p>Sistem integritas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa Anda memiliki kebijakan etika yang matang? • Apakah mekanisme konflik kepentingan telah ada? • Apakah transparansi keuangan dijaga untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas? • Apakah praktik-praktik pengendalian dan tata kelola internal secara teratur dievaluasi? 		<p>a. Salinan kode etika dan kebijakan etika tertulis organisasi</p> <p>b. Dokumentasi prosedur pengungkapan konflik kepentingan</p> <p>c. Dokumentasi bentuk apa pun dari pengungkapan atau laporan keuangan ke publik</p> <p>d. Dokumentasi langkah-langkah perbaikan yang telah diambil untuk merespons temuan-temuan audit</p>

9	<p>Daftar periksa yang terlarang dan manajemen risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfirmasikan bahwa organisasi tidak ada di daftar sanksi pemerintah mana pun juga • Konfirmasikan bahwa organisasi tidak terlibat dengan individu atau entitas yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan melawan hukum atau terorisme • Bagaimana organisasi memeriksa integritas CV dari caling pegawai, kontraktor atau mitra proyek? • Apa organisasi menggunakan pemeriksaan riwayat kejahatan untuk menyaring calon pegawai, kontraktor atau mitra proyek? Jika ya, dalam hal apa itu dilakukan? 		<p>a. https://www.nationalsecurity.gov.au/what-australia-is-doing/terrorist-organisations/listed-terrorist-organisations</p> <p>b. https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list</p>
10	<p>Kebijakan Pencegahan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (PSEAH) & Kebijakan Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah organisasi memiliki PSEAH & dan Kebijakan Perlindungan Anak dan pedomannya? • Aakah organisasi memiliki kebijakan, sistem dan praktik penilaian risiko PSEAH & Perlindungan Anak? • Apakah organisasi memiliki bukti akan pelatihan PSEAH & Perlindungan Anak bagi para stafnya? 		<p>a. Masukkan segala bentuk kebijakan atau SOP tentang PSEAH dan Perlindungan Anak</p>

Pernyataan

Saya dengan ini menyatakan bahwa informasi yang saya berikan di dalam formulir ini adalah nyata dan benar sejauh pengetahuan saya. Atas nama organisasi, saya juga mengakui bahwa segala bentuk ketidakjujuran yang disengaja dapat menyebabkan penolakan permohonan atau pemutusan segera dari hibah.

Tanda Tangan

Nama:

Jabatan:

Tanggal:

Lampiran 4 – Format Pernyataan Minat Hibah BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama

Pemohon harus menggunakan sistem KONEKSI MISI untuk memasukkan informasi yang disebutkan di bawah.

Panggilan Proposal: Bioekonomi Indonesia: Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024

Petunjuk

1. Organisasi Utama diharuskan mengisi semua bagian dari permohonan ini di Sistem Informasi Manajemen KONEKSI (MISI) dan menyerahkannya sebelum tenggat waktu yang ditetapkan
2. Mohon hindari penggunaan akronim, tanda kutip, dan huruf-huruf kapital, selain untuk KONEKSI, BRIN, GEDSI, K2P dan K2I

Jika Anda memiliki kesulitan teknis di dalam mengisi formulir ini, silakan menghubungi: cfpjointcall@KONEKSI-kpp.id

Bagian 1: Detail Pengajuan Proposal

Judul Proyek	<<Tulisan Teks – ini dapat diedit untuk permohonan Tahap 2>>
Kode Bidang Penelitian (FoR) Pilih maksimum dua kode FoR yang sesuai dengan proposal Anda	Menu tarik-turun (lihat MISI)
Tanggal Awal & Akhir Kegiatan	Awal Kegiatan: Akhir Kegiatan:
Total permohonan pendanaan yang diusulkan (AUD)	

Bagian 2: Kategori Proyek

Mohon nominasikan alur proyek yang Anda inginkan.

Pilih jalur dampak yang Anda usulkan:

Dampak yang diusulkan	Silakan pilih satu
Kebijakan	
Teknologi	

Pilih tingkat keterlibatan GEDSI Anda:

Keterlibatan GEDSI yang diusulkan	Silakan pilih satu
Pengarusutamaan GEDSI	
Spesifik GEDSI	

Pilih kategori pendanaan proyek Anda:

Kategori pendanaan yang diusulkan	Silakan pilih satu
Bertumbuh (hingga 400.000 AUD)	
Berbuah (hingga 500.000 AUD)	

Bagian 3: Persyaratan Kelayakan Kemitraan

Kemitraan Anda harus setidaknya memiliki satu organisasi Australia dan satu organisasi Indonesia.

Organisasi Utama

Organisasi Utama Australia	
Nama Organisasi	<< Sebutkan nama organisasi >>
Jenis Organisasi	(menu tarik-turun: lihat MISI)
Status hukum entitas	(menu tarik-turun: lihat MISI)
Nomor Registrasi Hukum (Nomor Usaha Australia)	
Alamat Organisasi	<<Masukkan alamat organisasi >> Negara Bagian Negara
Situs Internet Organisasi	<<Masukkan situs internet organisasi >>
Nama penghubung dari Organisasi Utama	<<Masukkan nama penghubung dari Organisasi Utama>>
Email penghubung	<< Masukkan Email penghubung>>
Nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari penghubung – opsional	<< Masukkan Nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari sang penghubung>> (opsional)

Organisasi Utama Indonesia	
Nama Organisasi	<< Masukkan nama organisasi >>
Jenis Organisasi	(menu tarik-turun: lihat MISI)
Status hukum entitas	(menu tarik-turun: lihat MISI)
Nomor registrasi hukum (nomor registrasi badan hukum Indonesia)	
Alamat Organisasi	<<Masukkan alamat organisasi >> Provinsi Negara

Situs Internet Organisasi	<<Masukkan situs internet organisasi >>
Nama penghubung dari Organisasi Utama	<<Masukkan nama penghubung dari Organisasi Utama>>
Email penghubung	<< Masukkan Email penghubung>>
Nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari penghubung – opsional	<< Masukkan Nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari penghubung>>

Organisasi Mitra

Agar memenuhi syarat kelayakan, Anda harus menominasikan setidaknya satu mitra Australia dan satu mitra Indonesia. Permohonan hibah lengkap Tahap 2 harus memasukkan daftar lengkap dari semua organisasi yang terlibat di dalam proyek. Selain organisasi mitra kedua, kami mengundang Anda untuk menambahkan mitra yang sudah diketahui atau berpotensi untuk itu di tahap Eol ini.

Organisasi Mitra yang diusulkan untuk terlibat	
Nama Organisasi (1)	<< Masukkan nama organisasi >>
Jenis Organisasi	(menu tarik-turun: lihat MISI)
Status hukum entitas	(menu tarik-turun: lihat MISI)
Nomor registrasi hukum (nomor registrasi badan hukum Indonesia, Nomor Usaha Australia)	
Nama, email, dan nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari penghubung Organisasi Mitra 1	<<Masukkan nama, email, nomor HP/ <i>WhatsApp</i> penghubung dari Organisasi Mitra 1>> <small>This contact should</small>
Nama Organisasi (2)	<< Masukkan nama organisasi >>
Jenis Organisasi	(menu tarik-turun: lihat MISI)
Status hukum entitas	(menu tarik-turun: lihat MISI)
Nomor registrasi hukum (nomor registrasi badan hukum Indonesia, Nomor Usaha Australia)	
Nama, email, dan nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari penghubung Organisasi Mitra 2	<<Masukkan nama, email, nomor HP/ <i>WhatsApp</i> penghubung dari Organisasi Mitra 2>> <small>This contact should</small>
Nama Organisasi (3)	<< Masukkan nama organisasi >>
Jenis Organisasi	(menu tarik-turun: lihat MISI)
Status hukum entitas	(menu tarik-turun lihat MISI)
Nomor registrasi hukum (nomor registrasi badan hukum Indonesia, Nomor Usaha Australia)	

Nama, email, dan nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari penghubung Organisasi Mitra 3	<<Masukkan nama, email, nomor HP/ <i>WhatsApp</i> penghubung dari Organisasi Mitra 3>> <i>This contact should</i>
Opsi untuk menambahkan Organisasi Mitra lebih banyak lagi	

Bagian 4: Penelitian & Pendekatan yang Diusulkan

Nominasikan topik

Pilih tema dan topik yang relevan (Lihat [Lampiran 1 – Peta Topik](#)):

Tema	Sektor	Silakan pilih topik /topik-topik dari menu drop down (dapat lebih dari satu)
Keanekaragaman Hayati Laut	Kesehatan	Menu tarik-turun (lihat MISI)
	Pangan	Menu tarik-turun (lihat MISI)
	Energi	Menu tarik-turun (lihat MISI)

Konsep Proyek

Jelaskan topik dan pendekatan yang Anda pilih sesuai dengan kriteria penilaian pernyataan minat (EoI). Berikan pernyataan konsep proyek tidak lebih dari 300 kata dengan memberikan ringkasan penelitian yang diusulkan, termasuk tujuan, metode, keluaran dan hasil yang diharapkan.

Judul Proyek: (Harap tulis kembali di sini. Ini tidak menjadi bagian dari batas jumlah kata)

<<Masukan Teks>>

Respon terhadap aspek GEDSI

Pilih satu atau lebih kategori dan tingkat sejauh mana proyek Anda akan berdampak terhadap kategori-kategori berikut (lihat bagian [6.3 GEDSI di dalam Penelitian](#) atau klik ikon deskripsi penanda)

Penanda Inklusi Disabilitas	Pilih satu atau lebih kategori (lihat MISI)
Penanda Kesetaraan Gender	Pilih satu atau lebih kategori (lihat MISI)
Penanda Inklusi Sosial	Pilih satu atau lebih kategori (lihat MISI)

Jelaskan pendekatan yang Anda pilih terhadap aspek GEDSI (terkait dengan pilihan Anda di dalam pendekatan 'arus utama' atau 'spesifik'). Mohon untuk tidak melebihi 200 kata dan usahakan untuk merangkum analisis, tujuan, keluaran dan hasil GEDSI. (Kami menerima kemungkinan adanya tumpang tindih dari jawaban yang Anda berikan di bagian Konsep Proyek di atas).

<<Masukan Teks >>

Strategi dampak yang diusulkan

Jelaskan strategi yang Anda usulkan untuk menghasilkan dampak, terkait dengan manfaat dan dampak proyek. Rujuk ke jenis pendanaan di dalam Pedoman (lihat bagian 5.1 Grant dan jenis-jenis proyek). Mohon untuk tidak melebihi 200 kata.

<<Masukkan Teks>>

Lampiran 5 – BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama: Bioekonomi Indonesia:
Memaksimalkan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut yang Berkelanjutan 2024
Format Proposal Teknis

Petunjuk

1. Semua pemohon diminta untuk melengkapi seluruh bagian dari formulir permohonan ini dan menyerahkan formulir permohonan ini sesuai tenggat waktu
2. Terdapat beberapa bagian yang telah terisi dari permohonan Pernyataan Minat Anda. Mohon ditinjau kembali dan diedit untuk kesesuaiannya.
3. Mohon menghindari penggunaan akronim, tanda kutip, dan karakter huruf besar, selain dari KONEKSI, BRIN, GEDSI, K2P dan K21.
4. Dengan menandatangani dan menyerahkan permohonan ini, pemohon mengesahkan terhadap Pernyataan Anti-Teroris (Bagian 8).
5. Isu formulir pada bagian yang ditandai dengan <<Teks>> (beri informasi seperti yang diperlukan).

Jika Anda memiliki kesulitan teknis di dalam mengisi formulir ini, silakan menghubungi:

cfpjointcallbrin@koneksi-kpp.id

Bagian 1: Detail Permohonan

Judul Proyek	<<Masukkan Teks>>
Kode Bidang Penelitian	Menu turun-tarik (lihat MISI)
Tanggal Awal & Akhir Kegiatan	Awal Proyek: Akhir Proyek:
Total permohonan pendanaan yang diusulkan (AUD)	

Bagian 2: Kategori Proyek

Silakan nominasikan aliran proyek yang Anda inginkan

Nominasikan jalan dampak yang diusulkan:

Dampak Diusulkan	Silakan pilih satu
Kebijakan	
Teknologi	

Nominasikan tingkat keterlibatan GEDSI Anda:

Keterlibatan GEDSI yang diusulkan	Silakan pilih satu
Pengarusutamaan GEDSI	
Spesifik GEDSI	

Nominasikan kategori pendanaan proyek Anda:

Kategori Pendanaan yang diusulkan	Silakan pilih satu
Bertumbuh	
Berbuah	

Bagian 3: Persyaratan Kelayakan Kemitraan

Kemitraan Anda harus memiliki setidaknya satu organisasi Australia dan satu organisasi Indonesia.

Organisasi Utama

Organisasi Utama Australia	
Nama Organisasi	<< Masukkan nama organisasi >>
Jenis Organisasi	(menu turun-tarik: lihat MISI)
Status hukum entitas	(menu turun-tarik: lihat MISI)
Nomor Registrasi Hukum (Nomor Usaha Australia)	
Alamat Organisasi	<<Masukkan alamat organisasi >> Negara Bagian Negara
Situs Internet Organisasi	<<Masukkan situs internet organisasi >>
Nama penghubung dari Organisasi Utama	<<Masukkan nama penghubung dari Organisasi Utama>>
Email sang penghubung	<< Masukkan Email sang penghubung>>
Nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari penghubung – opsional	<< Masukkan Nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari sang penghubung>> - opsional
Nama Peneliti Utama	<<Masukkan Nama Peneliti Utama>>
Email Peneliti Utama	<< Masukkan Email Peneliti Utama>>
Nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari Peneliti Utama	<< Masukkan Nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari Peneliti Utama>>

Organisasi Utama Indonesia	
Nama Organisasi	<< Masukkan nama organisasi >>
Jenis Organisasi	(Menu turun-tarik: lihat MISI)
Status hukum entitas	(Menu turun-tarik: lihat MISI)
Nomor registrasi hukum (nomor registrasi badan hukum Indonesia)	

Alamat Organisasi	<<Masukkan alamat organisasi >> Provinsi Negara
Situs Internet Organisasi	<<Masukkan situs internet organisasi >>
Nama penghubung dari Organisasi Utama	<<Masukkan nama penghubung dari Organisasi Utama>>
Email penghubung	<< Masukkan Email sang penghubung>>
Nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari sang penghubung – opsional	<< Masukkan Nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari sang penghubung>> opsional
Nama Peneliti Utama	<<Masukkan Nama Peneliti Utama>>
Email Peneliti Utama	<< Masukkan Email Peneliti Utama>>
Nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari Peneliti Utama	<< Masukkan Nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari Peneliti Utama>>

Organisasi Mitra

Agar memenuhi syarat kelayakan, Anda harus menominasikan setidaknya satu mitra Australia dan satu mitra Indonesia. Permohonan hibah lengkap Tahap 2 harus memasukkan daftar lengkap dari semua organisasi yang terlibat di dalam proyek. Selain organisasi mitra kedua, kami mengundang Anda untuk menambahkan mitra yang sudah diketahui atau berpotensi dari tahap EoI.

Organisasi mitra yang diusulkan untuk terlibat	
Nama Organisasi (1)	<< Masukkan nama organisasi >>
Jenis Organisasi	(menu turun-tarik: lihat MISI)
Status hukum entitas	(menu turun-tarik: lihat MISI)
Nomor registrasi hukum (nomor registrasi badan hukum Indonesia, Nomor Usaha Australia)	
Nama, email, dan nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari penghubung Organisasi Mitra 1	<<Masukkan nama, email, nomor HP/ <i>WhatsApp</i> penghubung dari Organisasi Mitra 1>> <small>This contact should</small>
Nama Organisasi (2)	<< Masukkan nama organisasi >>
Jenis Organisasi	(menu turun-tarik: lihat MISI)
Status hukum entitas	(menu turun-tarik: lihat MISI)
Nomor registrasi hukum (nomor registrasi badan hukum Indonesia, Nomor Usaha Australia)	
Nama, email, dan nomor HP/ <i>WhatsApp</i> dari penghubung Organisasi Mitra 2	<<Masukkan nama, email, nomor HP/ <i>WhatsApp</i> penghubung dari Organisasi Mitra 2>> <small>This contact should</small>

Nama Organisasi (3)	<< Masukkan nama organisasi >>
Jenis Organisasi	(menu turun-tarik: lihat MISI)
Status hukum entitas	(menu turun-tarik: lihat MISI)
Nomor registrasi hukum (nomor registrasi badan hukum Indonesia, Nomor Usaha Australia)	
Nama, email, dan nomor HP/WhatsApp dari penghubung Organisasi Mitra 3	<<Masukkan nama, email, nomor HP/WhatsApp penghubung dari Organisasi Mitra 3>> <small>This contact should</small>
Opsi untuk menambahkan Organisasi Mitra	

Bagian 4: Penelitian & pendekatan yang diusulkan

Pilih Topik

Tema	Sektor	Silakan pilih topik dari menu turun-tarik (dapat lebih dari satu)
Keanekaragaman Hayati Laut	Kesehatan	Menu turun-tarik (lihat MISI)
	Pangan	Menu turun-tarik (lihat MISI)
	Energi	Menu turun-tarik (lihat MISI)

Konsep dan pendekatan proyek

Konfirmasikan pernyataan konsep proyek tidak lebih dari 300 kata memberi rangkuman tentang penelitian yang diusulkan, termasuk tujuan(-tujuan), metode, keluaran dan hasil yang diharapkan.

Judul Proyek: (Silakan diisi lagi di sini. Ini tidak menjadi bagian dari batasan jumlah kata)

<<Masukkan Teks>>

Sumber daya, anggaran, dan pencapaian

idak lebih dari 300 kata, jelaskan kecukupan dan kesesuaian dari sumber daya yang diusulkan di dalam anggaran Anda.

<<Masukkan Teks>>

Pernyataan Kelayakan

Tidak lebih dari 100 kata, mohon indikasikan mengapa Anda percaya penelitian dan dampak yang Anda usulkan dapat diwujudkan dalam anggaran dan jangka waktu yang diusulkan.

<<Masukkan Teks>>

Kemitraan yang Diusulkan

Kesesuaian Kemitraan

Tidak lebih dari 200 kata, jelaskan mengapa organisasi Anda dan Mitra paling sesuai untuk proyek yang diusulkan dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip kesetaraan BRIN-KONEKSI.

<<Masukkan Teks>>

Potensi Kemitraan

Dengan tidak lebih dari 200 kata, jelaskan bagaimana kemitraan yang Anda usulkan akan menciptakan bentuk-bentuk inovatif pengetahuan dan potensi untuk manfaat lokal.

<<Masukkan Teks>>

Strategi Dampak

Jelaskan sasaran dampak penelitian Anda sesuai dengan jalur dampak yang Anda inginkan

Tidak lebih dari 200 kata, berikan sebuah pernyataan yang menjelaskan strategi Anda untuk mewujudkan manfaat dan dampak Proyek yang diharapkan. Lihat [Bagian 5 Kategori Pendanaan](#) (Berbibit, Bertumbuh, atau Berbuah)

<<Masukkan Teks>>

Rencana Pemangku Kepentingan

Tidak lebih dari 200 kata, berikan pernyataan yang menjelaskan rencana untuk melibatkan pemangku kepentingan yang sesuai untuk mewujudkan dampak strategi Anda. 'Pemangku Kepentingan' merujuk ke sekelompok aktor yang tidak terdaftar sebagai mitra di dalam proposal Anda, tetapi memainkan peran penting untuk memastikan Proyek Anda mendapatkan dampak maksimal selama siklus proyek Anda. Pemohon harus mengartikulasikan rencana untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok pelaku yang paling sesuai dan relevan yang akan dilibatkan, yang memahami, dan membantu proyek Anda untuk mewujudkan dampaknya.

Kapasitas pelaksanaan untuk dampak

idak lebih dari 200 kata, berikan pernyataan menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing mitra lembaga untuk mewujudkan pelaksanaan yang berdampak

<<Masukkan Teks>>

Respon terhadap aspek GEDSI

Konfirmasikan kategori dan sejauh mana proyek Anda akan berdampak terhadap kategori-kategori berikut (lihat bagian [6.3 GEDSI dalam penelitian](#)) atau klik ikon penanda pada KONEKSI MISI.

Desain dan tujuan penelitian yang responsif terhadap GEDSI

Idak lebih dari 200 kata, identifikasikan cara-cara Proyek Anda akan mengatasi ketidaksetaraan dan memajukan GEDSI. Kami menerima bahwa ada beberapa duplikasi dari bagian konsep dan pendekatan proyek (terkait dengan penanda GEDSI Anda)

<<Masukkan Teks>>

Metode dan proses yang responsif GEDSI

Dengan tidak lebih dari 200 kata, identifikasi tingkat keterlibatan dari kelompok-kelompok GEDSI melalui berbagai tahapan penelitian yang berbeda, termasuk di dalam perancangan bersama dan pertimbangan konsultasi penelitian

<<Masukkan Teks>>

Hasil-hasil dan strategi dampak yang responsif GEDSI

Dengan tidak lebih dari 200 kata, identifikasi keluaran-keluaran dan hasil-hasil yang diusulkan dari penelitian yang relevan

<<Masukkan Teks>>

Bagian 5: Surat Komitmen Mitra Industri

Mohon mengunggah surat komitmen dari Mitra Industri (untuk ikut serta di dalam proyek penelitian) ke MISI.

Bagian 6: Rencana Kegiatan

Silakan mengunduh format yang disediakan untuk menyerahkan rencana kegiatan dan kemudian diunggah ke MISI.

Bagian 7: Uji Kelayakan

Mohon selesaikan Penilaian Uji Kelayakan secara daring (universitas-universitas Australia dikecualikan dari mengisi formulir ini dengan *memberikan konfirmasi dan pernyataan tentang status lembaga mereka*).

Bagian 8: Anggaran

Mohon mengunduh format yang disediakan untuk menyerahkan usulan anggaran dan mengunggahnya ke MISI.

Dokumen-dokumen pendukung untuk anggaran harus disimpan dalam *drive* pemohon dan BRIN-KONEKSI harus diberikan tautan untuk mengaksesnya. BRIN-KONEKSI akan meminta pemohon untuk menyerahkan dokumen-dokumen pendukung Proposal Keuangan. Pemohon dipersilakan untuk menyerahkan dokumen pendukung lebih awal.

Bagian 9: Pernyataan Publik Skema Hibah Kolaboratif Bersama BRIN-KONEKSI

idak lebih dari 100 kata, berikan sebuah pernyataan dengan bahasa yang lugas yang mendemonstrasikan bagaimana kegiatan yang diusulkan bernilai untuk mendukung kemitraan penelitian kolaboratif yang berkeadilan antara Australia dan Indonesia. Tulis pernyataan Anda dengan bahasa yang jelas dan lugas. Pernyataan ini akan digunakan di situs BRIN-KONEKSI jika permohonan Anda berhasil.

<<Masukkan Teks>>

Bagian 10: Pernyataan

- 1. Pemohon, sejauh pengetahuannya sekarang** tidak pernah memberikan, dalam 10 tahun terakhir, dan akan melakukan semua langkah-langkah sewajarnya untuk memastikan tidak dan tidak akan dengan sengaja menyediakan, bahan, dukungan atau sumber daya kepada individu atau entitas mana pun yang melakukan, mencoba melakukan, mengadvokasi, memfasilitasi atau berpartisipasi di dalam aksi-aksi teroris, atau telah melakukan, mencoba melakukan, memfasilitasi atau berpartisipasi di dalam aksi-aksi teroris seperti yang didefinisikan di Paragraf 3 di bawah.
- 2. Pemohon harus menggunakan upaya terbaiknya** untuk memastikan bahwa dana yang disediakan berdasarkan kontrak ini tidak baik secara langsung mau pun tidak langsung memberikan dukungan atau sumber daya kepada organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan terorisme. Jika, selama masa kontrak, Pemohon menemukan hubungan apa pun juga dengan organisasi atau individu mana pun yang terkait dengan terorisme, maka ia harus segera memberitahukan BRIN-KONEKSI. Daftar lengkap orang dan entitas tersebut tersedia dari DFAT di <https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list> . Daftar 'organisasi teroris' tersedia di *National Security* Australia di: www.nationalsecurity.gov.au.
- 3. Langkah-langkah berikut ini memungkinkan pemohon untuk menaati kewajibannya berdasarkan Paragraf 1:**

- a) Sebelum menyerahkan dukungan atau sumber daya material kepada seorang individu atau entitas, pemohon hendaknya memverifikasi bahwa sang individu atau entitas tidak ditunjuk oleh Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang dibentuk berdasarkan Resolusi DK-PBB 1267 (1999) (Komite 1267) [yaitu individual atau entitas yang terkait dengan Taliban, Osama bin Laden, atau Organisasi Al Qaida]. Untuk menentukan apakah ada penunjukan individu atau entitas yang diterbitkan oleh Komite 1267, Penerima harus merujuk ke daftar konsolidasi yang tersedia daring di situs Komite:
<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>
- b) Sebelum memberikan dukungan atau sumber daya material kepada individu atau entitas, pemohon akan mempertimbangkan semua informasi tentang individu atau entitas yang ia ketahui dan semua informasi publik yang tersedia dengan wajar yang ia perlu sadari.
- c) Pemohon juga akan menerapkan prosedur peninjauan/*monitoring* dan pengawasan yang wajar untuk menjaga terhadap kemungkinan bantuan dibelokkan untuk mendukung kegiatan teroris.

4. Untuk tujuan Pernyataan ini:

- a) 'Dukungan dan sumber daya material' berarti instrumen mata uang atau moneter atau sekuritas keuangan, layanan keuangan, penginapan, pelatihan, nasihat atau bantuan ahli, rumah persembunyian, dokumentasi atau identifikasi palsu, peralatan komunikasi, fasilitas, senjata, zat berbahaya, bahan peledak, personalia, transportasi, dan aset fisik lainnya, kecuali pengobatan atau material keagamaan
 - b) 'Aksi teroris' berarti: Suatu tindakan yang dilarang berdasarkan salah satu dari 12 konvensi dan protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang terorisme (lihat konvensi PBB tentang terorisme, Situs Internet: <http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp>)
 - Sebuah aksi yang sudah direncanakan, kekerasan bermotif politik dilakukan terhadap sasaran non-kombatan oleh kelompok-kelompok atau pelaku-pelaku gelap dalam negara; atau
 - Segala bentuk tindakan lainnya ditujukan untuk mengakibatkan kematian atau luka badan yang serius terhadap seorang masyarakat sipil, atau kepada siapa saja yang tidak secara aktif ikut serta di dalam tindakan permusuhan di dalam situasi konflik bersenjata, ketika tindakan ini, berdasarkan sifat dan konteksnya, adalah untuk mengintimidasi sekelompok penduduk, atau untuk memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk berbuat atau untuk tidak berbuat tindakan apa pun.
 - c) 'Entitas' berarti kemitraan, asosiasi, perusahaan atau organisasi, kelompok atau sub kelompok.
 - d) Kewajiban pemohon berdasarkan Paragraf 1 tidak berlaku untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang didapatkan melalui cara biasa di dalam kegiatan usaha melalui kontrak atau pembelian, misalnya utilitas, penyewaan, pasokan kantor, bahan bakar, dll., kecuali pemohon memiliki alasan untuk percaya bahwa sang vendor atau penyedia barang atau jasa tersebut melakukan, mencoba melakukan, mengadvokasi, memfasilitasi atau berpartisipasi di dalam aksi-aksi teroris, atau telah melakukan, mencoba melakukan, memfasilitasi atau berpartisipasi di dalam aksi-aksi teroris.
5. Atas nama organisasi pemohon, Saya memahami dan mengakui bahwa penyerahan catatan konsep ini tidak menjamin adanya pendanaan atau bantuan teknis dari BRIN-KONEKSI Panggilan Bersama. Solusi yang diajukan tidaklah melanggar kekayaan intelektual atau hak-hak lainnya dari organisasi lain mana pun.

Organisasi: <<Masukan Teks>>	Tanggal: <<Masukkan Teks>>
Nama Pegawai yang berwenang: <<Masukan Teks>>	Tandatangan:

Lampiran 6 – Pemeriksaan Kesehatan Kemitraan

Pemeriksaan kesehatan kemitraan dilakukan dua kali selama masa hibah: setelah perjanjian hibah ditandatangani dan pada akhir dari periode hibah. Semua mitra diharapkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ini. Informasi digunakan Sekretariat untuk memetakan perubahan dan memberikan bukti akan perubahan pada kemitraan yang berkontribusi terhadap tujuan akhir program KONEKSI yaitu meningkatnya pemahaman bersama.

Indikator “kesehatan yang baik’ dari Kemitraan			
1. Konteks			
Mitra memahami konteks penelitian dan kebijakan dari proyek yang diusulkan			
Mitra mengetahui proyek-proyek sebelumnya di bidang ini, dan kesenjangan Pengetahuan-ke-Kebijakan / Pengetahuan ke Inovasi bidang ini			
Para mitra telah mengidentifikasi dan mengenalkan diri mereka dengan literatur-literatur kunci tentang proyek mereka			
Para mitra sadar akan tantangan-tantangan signifikan dihadapi proyek (jika terdapat tantangan, buat daftarnya dan bahas dalam tim Anda)			
2. Maksud dan tujuan			
Maksud dari kemitraan diartikulasikan dengan baik, secara internal mau pun eksternal			
Para mitra termotivasi dan terinspirasi untuk mencapai tujuan bersama			
Tujuan-tujuan telah disepakati secara bersama para mitra			
Kemitraan menjaga relevansi dan tetap berada pada jalur untuk mewujudkan maksud dan tujuannya			
Kemitraan melakukan apa yang memang ingin dilakukannya			
3. Hubungan			
Para mitra memahami sudah pandang atau kepentingan masing-masing, dan jelas tentang motivasi masing-masing			
Terdapat kepercayaan di dalam kemitraan			
Para mitra dapat mengandalkan satu sama lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah disepakati			
Para mitra saling menawarkan bantuan dan secara bersama-sama memecahkan permasalahan			
Peran para mitra dengan jelas ditentukan dari dalam tim sendiri			
Para mitra merasa diberdayakan dan mampu untuk proyek ini			
Para mitra dapat belajar dari satu sama lain dan berbagi praktik-praktik terbaik secara terbuka			

Para mitra telah mempertimbangkan keberadaan posisi mereka di dalam tim, dan bagaimana ini dapat mempengaruhi proyek			
Para mitra telah mempertimbangkan bias tidak sadar mereka masing-masing, dan bagaimana ini dapat mempengaruhi proyek			
4. Sumber daya – kemitraan memiliki akses yang cukup ke			
Keterampilan-keterampilan umum, seperti keterampilan komunikasi dan berorganisasi			
Keterampilan teknis untuk menyelesaikan proyek			
Pengetahuan dan keterampilan akan peran GEDSI di dalam penelitian			
Pengetahuan dan keterampilan dalam Pengetahuan ke Inovasi			
Pengetahuan dan Keterampilan dalam Pengetahuan ke Kebijakan			
Kemitraan dan pengalaman relevan lainnya			
Jejaring kerja dan lingkaran pengaruh yang penting			
Sarana, seperti kantor dan ruang rapat, peralatan			
Sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya			
5. Proses kerja			
Apa yang perlu diwujudkan dan kerangka waktu dari proyek jelas			
Para individu bertanggungjawab atas apa yang harus mereka wujudkan			
Proses untuk menerima/mendistribusikan pendanaan efektif			
Proses komunikasi dan dokumentasi efektif			
Proses monitoring dan pelaporan efektif, para mitra memiliki hak berpendapat yang setara di dalam desain dan pelaksanaannya			
Terdapat kejelasan sekitar tujuan-tujuan proyek sejak awal proses dan setelahnya			
Komunikasi dalam beragam bentuknya cukup sering dilakukan			
Informasi dapat diakses dan penerjemahan bahan disediakan ketika diperlukan			
Para mitra transparan tentang asumsi, tujuan, kebutuhan, pendorong dan penghambat mereka			
Para mitra secara teratur dan konsisten hadir di rapat-rapat			
Catatan akan pertemuan tim disimpan dengan baik dan dokumentasi mendukung para mitra dalam pengambilan keputusan			

Lampiran 7 – Akronim

AI	Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)
ABN	Australian Business Number (Nomor Usaha Australia)
ACN	Australian Company Number (Nomor Perusahaan Australia)
ACOLA	Australian Council of Learned Academies (Dewan Akademis Pembelajaran Australia)
AEDT	Australian Eastern Daylight Time (Waktu Musim Panas Timur Australia)
AEST	Australian Eastern Standard Time (Waktu Standar Timur Australia)
BAPPENAS	National Development Planning Agency (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional)
BRIN	National Innovation and Research Agency (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
CfP	Call for Proposal (Undangan Proposal)
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan - Australia)
EOI	Expression of Interest (Pernyataan Minat)
EOIO	End of Investment Outcomes (Hasil Akhir Investasi)
FAA	Fixed Amount Award (Penganugerahan dalam Jumlah Tetap)
GoA	Government of Australia (Pemerintah Australia)
GoI	Government of Indonesia (Pemerintah Indonesia)
GEDSI	Gender Equality, Disability and Social Inclusion
GST	Goods and Services Tax (Pajak Barang dan Jasa)
ICN	Indigenous Corporation Number (Nomor Perusahaan Masyarakat Adat)
Kemendikbudristek	Ministry of Education Culture Research and Technology (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - Indonesia)
KONEKSI	<i>Kolaborasi Pengetahuan, Inovasi, dan Teknologi</i> or Knowledge, Innovation, and Technology Collaboration, also known as the Knowledge Partnership Platform, KPP). Terjemahan bahasa Inggrisnya 'connection'.
K2I	Knowledge-to-Innovation (Pengetahuan menuju Inovasi)
K2P	Knowledge-to-Policy (Pengetahuan menuju Kebijakan)
MISI	KONEKSI Management Information System (Sistem Informasi Manajemen KONEKSI)
ODA	Official Development Assistance (Bantuan Pembangunan Resmi)
PTC	Program Technical Committee (BRIN - DFAT) (Komite Teknis Program)
TRL	Technology Readiness Level (Tingkat Kesiapan Teknologi – TKT)
WIB	Western Indonesia Time (Waktu Indonesia Barat)